

M LIT PERPUSTAKAAN  
UNIV. NEGERI PADANG

## LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING



### PEMETAAN ORIENTASI POLITIK DAN RESPONS POLITIK PETANI SUBSISTEN TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI SUMATERA BARAT

Oleh

Rahmadani Yustika, S.Sos, M.Si  
Siska Sasmita, S.IP

DITERIMA TGL.	3-6-2010
SUMBER HARGA:	Hd
KOLEKSI	K1
NO. INVENTARIS	286/Hd/2010-p1(1)
KLASIFIKASI	306.2 Yus p.1 (1)

Dibiayai oleh Dana DIPA Tahun Anggaran 2009  
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penelitian  
Nomor: 0192.0/023-04.2/III/2009 tanggal 31 Desember 2008

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DESEMBER 2009

## HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

1. Judul Penelitian : Pemetaan Orientasi Politik dan Respons Politik Petani Subsisten Terhadap Kebijakan Publik di Sumatera Barat
  
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Rahmadani Yusran.S.Sos, M.Si
  - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c. NIP : 19730927 200501 1 004
  - d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
  - e. Jabatan Struktural : -
  - f. Bidang Keahlian : Kebijakan Publik
  - g. Fakultas/Jurusan : Ilmu-Ilmu Sosial/Ilmu Sosial Politik
  - h. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang
  - i. Tim Peneliti
    - Nama Lengkap : Siska Sasmita, S.IP
    - Bidang Keahlian : Sistem Informasi Manajemen
    - Fakultas /Jurusan : Ilmu-Ilmu Sosial/Ilmu Sosial Politik
    - Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang

### 3. Pendanaan dan jangka Waktu Penelitian:

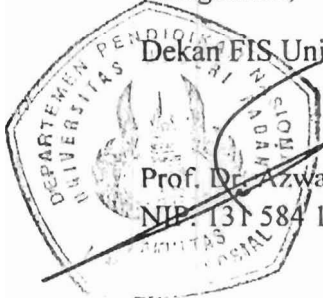
- a. Jangka Waktu penelitian yang diusulkan : 2 tahun
- b. Biaya Total yang diusulkan : 96.252.000,-
- c. Biaya yang disetujui tahun I (2009) : 40.500.000,-

Padang, Desember 2009

Mengetahui,

Dekan FIS Univ. Negeri Padang

Prof. Dr. Azwar Ananda, MA  
NIP. 131.584.117



Ketua Peneliti

Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si  
NIP. 19730927 200501 1 004

Menyetujui:  
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang

Prof. Dr. Anhad Fauzan, M.Pd., M.Sc.

NIP. 19680430199001 1 001



## RINGKASAN PENELITIAN

Penelitian ini dirancang untuk dua tahun, Pada tahun pertama ini penelitian bertujuan, pertama, mendiskripsikan keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam pembentukan orientasi politik petani dan responsnya terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat; kedua, mengidentifikasi dan mendeskripsikan kecenderungan (predisposisi) petani dalam merespon kebijakan pemerintah (daerah) di bidang pertanian.

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori dan penjelasan dalam memahami perilaku politik individu khususnya masyarakat petani dengan latar kultur etnis yang mengitarinya. Tidak seperti penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini dirancang sebagai salah satu bahan perbandingan terhadap kajian perilaku politik individu (*political behavior*) dan orientasinya terhadap kebijakan publik sehingga dimungkinkan adanya pengembangan dan pengayaan terhadap teori, konsep dan proposisi dalam telaah perilaku politik. Dengan mengetahui teori, konsep dan proposisi terkait dengan perilaku petani, maka penelitian ini juga memetakan model orientasi politik dan kecenderungannya dalam merespons kebijakan publik. Hasil pemetaan terhadap petani ini jelas berguna untuk pemerintah daerah dalam upayanya mengkomodasi kepentingan petani di Sumatera Barat. Preferensi nilai politik petani yang berhasil dipetakan (*mapping*) dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan publik.

Walaupun demikian, hasil penelitian ini juga menghadirkan paparan yang mudah dipahami oleh praktisi politik terutama bagi aktivis partai politik. Bagi partai politik, kajian ini sangat bermanfaat secara praktis untuk memformulasikan kebijakan partai dan atau pemerintah yang sesuai dengan karakteristik psikologis konstituennya. Dengan demikian, setiap partai politik dapat menjadikan kajian ini sebagai salah satu referensi penting khususnya yang terkait dengan bagaimana mendapatkan dukungan petani dalam proses politik di tingkat lokal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu wawancara mendalam (*in depth interview*), diskusi kelompok terfokus (*Focus Group*

*Discussion*), dan dokumentasi. Penggunaan keempat pendekatan tersebut bersifat saling melengkapi sehingga dapat menjelaskan masalah yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di enam kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang dipilih secara *purposive sampling* dan *snowball sampling* guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan khususnya di daerah kabupaten yang memiliki lahan pertanian yang luas. Daerah tersebut adalah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman. Selanjutnya setiap kabupaten diwakili oleh satu nagari, yaitu 1) Nagari Minangkabau; 2) Nagari Koto Tengah; 3) Nagari Pasar Baru; 4) Nagari Pauh Kamba; 5) Nagari Aia Manggih; dan 6) Nagari Cupak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani subsisten di Sumatera Barat memiliki tradisi yang disebut dengan *balambe hari*. Tradisi *balambe hari* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dalam tradisi bertani subsisten di Sumatera Barat. Dengan *balambe hari* ini, petani secara fundamental menggariskan pengolahan sawah sebagai bagian dari tanggungjawab bersama, sehingga dalam prakteknya tidak ada sawah yang terlantarkan. *Balambe hari* juga menjadi sarana interaksi dan komunikasi serta wadah untuk mengaktualisasikan kebutuhan dan kepentingan antara sesama petani dalam proses pengolahan sawah. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada dalam tradisi *balambe hari* sangat menentukan bagaimana respons politik petani di Sumatera barat terhadap kebijakan pemerintah.

Petani di Sumatera Barat dalam mengolah sawah juga sudah mengalami proses modernisasi yang disebabkan oleh perubahan kondisi alam, kebijakan pemerintah dan pola pikir petani dalam mengolah sawah mereka. Diantara proses modernisasi tersebut, kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani memiliki peranan yang besar dan mendasar memberikan pengaruh bagi petani. Determinasi pemerintah menyebabkan tradisi *balambe hari* perlahan-lahan ditinggalkan oleh petani. Namun demikian, kebijakan pemerintah tersebut tidak benar-benar dapat mendeterminasi pola pikir petani dalam mengolah sawah. Kenderungan ini terlihat ketika petani secara rasional menempuh berbagai alternatif untuk menyesuaikan diri dengan berbagai



perubahan yang terjadi dan kembali melaksanakan tradisi *balambe hari* meskipun suasana bantinya sudah mengalami pergeseran nilai.

Sebagai sebuah bentuk kearifan local, tradisi *balambe hari* sudah semestinya tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam membuat kebijakan tertentu. Pemerintah sebaiknya mengakomodasi nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam tradisi *balambe hari* yang selama ini dinilai sangat bermanfaat bagi petani di Sumatera Barat dalam mengelola sawah. Dengan demikian, dukungan petani terhadap implementasi kebijakan pemerintah di bidang pertanian akan semakin luas dan lebih baik.

Sebaliknya, pemerintah dapat memformulasikan kebijakan tertentu agar kebijakan pemerintah dibidang pertanian mudah diimplementasikan, misalnya Memperhatikan karakteristik alam dan tipologi sawah yang ada di Sumatera Barat, sebaiknya pemerintah memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada petani untuk menentukan sendiri jenis bibit dan memilih cara produksi sendiri, menjamin ketersediaan air dan kesuburan tanah, melakukan pengawasan yang ketat terhadap harga dan distribusi pupuk bersubsidi karena kebijakan pemerintah selama ini membuat petani sangat tergantung kepada pupuk bersubsidi.

## EXECUTIVE SUMMARY

### **Pemetaan Orientasi Politik dan Respons Politik Petani Subsisten Terhadap Kebijakan Di Sumatera Barat**

**Oleh : Rahmadani Yusran dan Siska Sasmita.  
Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut, pertama, mendeskripsikan keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam pembentukan orientasi politik petani dan responsnya terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat; kedua, mengidentifikasi dan mendeskripsikan kecenderungan (predisposisi) petani dalam merespon kebijakan pemerintah (daerah) di bidang pertanian.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terlebih dahulu dilakukan elaborasi terhadap keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam pembentukan orientasi politik dan respons politik petani terhadap kebijakan public di Sumatera Barat. Kemudian mendeskripsikan kecenderungan (predisposisi) petani dalam merespon kebijakan pemerintah (pemda).

Penelitian dilakukan difokuskan pada enam kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Adapun enam kabupaten tersebut adalah: 1) Kabuapten Tanah Datar, 2) Kabupaten Agam, 3) Kabupaten Solok, 4) Kabupaten Padang Pariaman, 5) Kabupaten Pasaman, dan 6) Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya pada masing-masing kabupaten di pilih satu nagari untuk dijadikan seting penelitian, yaitu 1) Nagari Minangkabau, 2) Nagari Koto Tangah, 3) Nagari Cupak, 4) Nagari Pauh Kamba, 5) Nagari Aia Manggih, dan 6) Nagari Pasar Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditetapkan secara *purposive sampling* dan *snowball sampling* yang meliputi petani subsisten di setiap di kabupaten.

Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa petani subsisten di Sumatera Barat memiliki tradisi yang disebut dengan *balambe hari*. Tradisi *balambe hari* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dalam tradisi bertani subsisten di Sumatera Barat. Dengan *balambe hari* ini, petani secara fundamental menggariskan pengolahan sawah sebagai bagian dari tanggungjawab bersama, sehingga dalam prakteknya tidak ada sawah yang terlantarkan. *Balambe hari* juga menjadi sarana interaksi dan komunikasi serta wadah untuk mengaktualisasikan

kebutuhan dan kepentingan antara sesama petani dalam proses pengolahan sawah. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada dalam tradisi *balambe hari* sangat menentukan bagaimana kecenderungan (predisposisi) petani dalam merespons kebijakan pemerintah (pemda) di Sumatera Barat.

Petani di Sumatera Barat dalam mengolah sawah juga sudah mengalami proses modernisasi yang disebabkan oleh perubahan kondisi alam, kebijakan pemerintah dan pola pikir petani dalam mengolah sawah mereka. Diantara proses modernisasi tersebut, kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani memiliki peranan yang besar dan mendasar memberikan pengaruh bagi petani. Determinasi pemerintah menyebabkan tradisi *balambe hari* perlahan-lahan ditinggalkan oleh petani. Namun demikian, kebijakan pemerintah tersebut tidak benar-benar dapat mendeterminasi pola pikir petani dalam mengolah sawah. Kecenderungan ini terlihat ketika petani secara rasional menempuh berbagai alternatif untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi dan kembali melaksanakan tradisi *balambe hari* meskipun suasana bantinya sudah mengalami pergeseran nilai.

Dengan demikian, *balambe hari* merupakan sebuah bentuk kearifan lokal, maka sudah semestinya tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam membuat kebijakan tertentu. Pemerintah sebaiknya mengakomodasi nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam tradisi *balambe hari* yang selama ini dinilai sangat bermanfaat bagi petani di Sumatera Barat dalam mengelola sawah. Dengan demikian, dukungan petani terhadap implementasi kebijakan pemerintah di bidang pertanian akan semakin luas dan lebih baik.

Sebaliknya, pemerintah dapat memformulasikan kebijakan tertentu agar kebijakan pemerintah dibidang pertanian mudah diimplementasikan, misalnya Memperhatikan karakteristik alam dan tipologi sawah yang ada di Sumatera Barat, sebaiknya pemerintah memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada petani untuk menentukan sendiri jenis bibit dan memilih cara produksi sendiri, menjamin ketersediaan air dan kesuburan tanah, melakukan pengawasan yang ketat terhadap harga dan distribusi pupuk bersubsidi karena kebijakan pemerintah selama ini membuat petani sangat tergantung kepada pupuk bersubsidi.

## PENGANTAR

Kegiatan penelitian dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

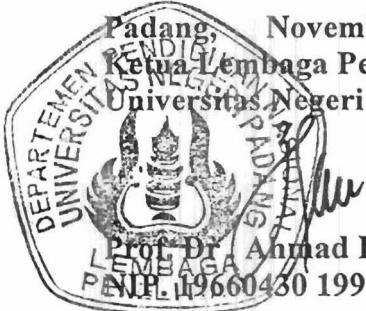
Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdiknas RI melalui Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Universitas Negeri Padang dengan surat perjanjian kerja Nomor: 1721/H35/KU/DIPA/2009 Tanggal 11 Mei 2009 telah membiayai pelaksanaan penelitian dengan judul *Pemetaan Orientasi Politik dan Respons Politik Petani Subsisten Terhadap Kebijakan Publik Di Propinsi Sumatera Barat*.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, serta telah diseminarkan ditingkat nasional. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdiknas yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian tahun 2009. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang baik dari DP2M, penelitian ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Semoga hal yang demikian akan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, November 2009  
Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Negeri Padang,  
  
Prof. Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd., M.Sc.  
LEMBAGA PENELITIAN  
PENILAIAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
P.N.P. 19660430 199001 1 001

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>RINGKASAN PENELITIAN</b> .....	ii
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b> .....	v
<b>PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	
B. Rumusan Permasalahan .....	2
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN</b> .....	3
<b>BAB III TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	
A. Tujuan Penelitian .....	16
B. Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB IV METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	18
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	20
B. Temuan dan Pembahasan Penelitian .....	28
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	54
<b>LAMPIRAN</b> .....	56
<b>DRAFT ARTIKEL ILMIAH</b> .....	57
<b>SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN</b> .....	85

# BAB I PENDAHULUAN

## I LATAR BELAKANG

Keterlibatan masyarakat petani di Indonesia dalam politik adalah akibat berlangsungnya suatu perubahan sosial yang dipengaruhi oleh kaum kolonial (Wertheim, 1999:26-27). Perubahan ini menempatkan setiap petani sebagai subjek politik khususnya yang berhubungan langsung dengan kehidupan komunitasnya. Ini ditandai dengan seringnya konflik bernuansa ekonomi dan politik yang disertai kekerasan baik dengan negara atau dengan kelompok lain yang didukung oleh negara. Kuntowijoyo (2002:1-2) memiliki asumsi dasar yang menarik melihat kecenderungan terlibatnya petani dalam politik. *Pertama*, adanya kesenjangan (sosial) yang berdampak pada munculnya polarisasi kepentingan antara dua kelompok yaitu petani penggarap dan tuan tanah. Dalam kehidupan modern saat ini, realitas konflik kedua kelompok tersebut meluas ke bentuk lain yakni konflik antara pihak swasta (investor perkebunan) yang didukung negara sebagai pemilik tanah lahan dengan buruh kontrak (petani penggarap) yang secara historis adalah pemilik sesungguhnya.

*Kedua*, adalah kecenderungan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat etnis Jawa. Menurut Kuntowijoyo terdapatnya ketegangan kultural antara mereka yang kuat beragama atau kelompok santri dengan yang tidak kuat beragama atau kelompok abangan. *Ketiga*, munculnya konflik dalam masyarakat di pedesaan terutama yang berhubungan dengan perubahan sosial ekonomi (modernisasi) dengan budaya. Perubahan sosial budaya menyebabkan masyarakat petani memiliki nilai-nilai baru dalam kehidupannya. Sementara realitas yang terjadi dalam masyarakat di sekitar kehidupan mereka masih mempertahankan nilai kultur yang kental dengan budaya lokal yang dominan. Inilah yang memicu konflik nilai dalam diri mereka yang setiap saat dapat menjelma menjadi konflik terbuka dengan komunitas lain. Tetapi persoalannya benarkah petani tersebut dengan memiliki orientasi politik?

Secara teori dapat dipahami bahwa orientasi politik individu sangat bergantung pada bagaimana individu tersebut mempersepsikan lingkungan politik di sekitarnya. Proses mempersepsikan lingkungan ini berhubungan langsung dengan aspek kognisi mereka. Muara dari proses ini akan melahirkan partisipasi politik yang otonom (Greenstein, 1975:8) Jelasnya, partisipasi dan orientasi politik yang otonom tersebut terkait dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki individu. Dengan pengetahuan inilah individu kebanyakan mendasari respons politiknya (Morgan, 1986). Tetapi dalam kenyataannya, ternyata tingkat pengetahuan kelompok petani ini relatif rendah, sehingga apa yang diharapkan terkait dengan partisipasi politiknya yang otonom dan orientasi politik mereka menjadi tidak jelas. Apalagi kalau kelompok petani ini dituntut merespons kebijakan publik yang dibuat pemerintah daerah.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka penelitian ini mencoba mendalami kecenderungan yang terjadi dalam diri petani terkait dengan orientasi politik dan respons mereka terhadap kebijakan publik. Beberapa pertanyaan mendasar diajukan untuk memberi arah dan fokus pada penelitian ini, yaitu bagaimanakah keberadaan nilai-nilai budaya minangkabau mempengaruhi orientasi politik petani dan responsnya terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat? Apakah preferensi nilai budaya ke-Minangkabau-an tersebut mempengaruhi kecenderungan (predisposisi) petani dalam merespons kebijakan pemerintah (daerah) di bidang pertanian?

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

Kajian keterlibatan petani dalam politik bukanlah hal yang baru bagi ilmuwan sosial. Ini terlihat dari banyaknya karya penelitian yang dilahirkan. Karya Scott (1981, 1993, 2000) mengilhami banyak peneliti untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sesungguhnya keterlibatan petani dalam konflik politik di beberapa negara di Asia Tenggara. Khusus untuk Indonesia, Clifford Geertz (1960, 1965, 1974) memberi fokus pada keberadaan kaum tani dan masyarakat lokal di Indonesia khususnya terkait dengan dinamika kehidupan petani dan perubahan sosial. Selain itu ilmuwan yang juga memberi perhatian khusus terutama yang terkait dengan kehidupan politik masyarakat rural di antaranya adalah Lev & Lyon (1970) dengan karya *Bases of conflicts in rural Java*, Anderson (1972) dengan *Idea of power in Javanese culture*, Kartodirdjo (1973) dengan karya *Protes movement in rural Java*, Kuntowijoyo (1985) dengan *Social change in an agrarian society: Madura 1850-1940*, dan Palmer (1969) dengan *Social status and power in Java*.

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini seperti konsep budaya politik dan preferensi *voting* individu sebagai bagian dari orientasi politik petani. Oleh karenanya uraiannya akan dibagi menurut pengelompokan tersebut.

#### **2.1 Budaya Politik di Indonesia**

Konsep budaya politik muncul mewarnai khasanah perpolitikan masyarakat dunia setelah Perang Dunia II. Sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat bahwa pasca Perang Dunia II perkembangan wacana politik mengalami kemajuan yang berarti. Sesuatu yang signifikan terjadi ketika kalangan ilmuwan politik menemukan sebuah fenomena progresif dalam madzhab positivisme, yaitu sebuah paham yang percaya bahwa ilmu sosial memberikan penjelasan akan gejala sosial seperti halnya ilmu-ilmu alam memberikan penjelasan terhadap gejala-gejala alam, dalam ilmu-ilmu



sosial termasuk ilmu politik. Madzhab positivisme ini dikuatkan oleh berlangsungnya *behavioral revolution* atau ada juga yang dinamakan dengan *behavioralism*.

Afan Gaffar (1999:97) mengemukakan perkembangan behavioralisme sebagai berikut.

adalah satu faktor penopang lahirnya revolusi behavioral ini adalah muncul dan berkembangnya kecenderungan baru dalam dunia penelitian, yaitu kecenderungan untuk mengadakan penelitian survey (*survey research*).

Kecenderungan seperti ini juga menambah pola pikir ilmuwan politik di Indonesia untuk menjelaskan fenomena politik dari aspek perilaku individu. Behavioralisme memandang bahwa dengan melihat individu sebagai unit analisis politik, maka gambaran tentang masalah politik akan dapat dijelaskan secara tepat, karena memang masalah kaum behavioral meyakini bahwa masalah politik memiliki keterkaitan dengan individu yang determinan dalam hadirnya masalah tersebut. Inilah yang diungkap secara tegas tentang adanya faktor dari dalam diri individu (*push factor*) dan faktor dari luar (*pull factor*). (Jaros & Grant, 1974: 245-271) Kedua faktor itulah pada akhirnya akan menentukan sikap individu (*attitudes*) yang lazim melahirkan perilaku politik (*political behavior*)

Bagi kalangan akademisi yang memang mendalami kajiannya tentang politik, tidaklah asing dengan teori budaya politik. Teori ini dikemukakan oleh Almond & Verba. Karya mereka yang monumental dan sangat berpengaruh dalam telaahan politik dari sudut pandangan ini adalah *The civic cultures: political attitude and democracy in five nations* (1963). Karya mereka ini menjadi rujukan banyak ahli politik untuk melihat fenomena perilaku politik individu.

Secara konseptual budaya politik sebagai sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik (Gaffar, 2000; Almond & Verba, 1963). Menyangkut “peranan yang dapat dimainkan” oleh individu tentunya dipengaruhi oleh orientasi nilai yang dipunyai individu tersebut. Orientasi nilai terbentuk oleh

sistem nilai yang pada akhirnya melahirkan sikap (*attitudes*). Inilah keterkaitan antara nilai dan sikap yang dimaksud tersebut (Gaffar, 1992).

Untuk memahami fenomena ini, banyak ahli menekankan studi perilaku ini pada sikap yang merupakan dasar psikologi perilaku. Pemahaman terhadap psikologi perilaku ini memunculkan variabel lain yang dapat diamati yaitu stimulus. Stimulus dipercaya dapat mempengaruhi individu bertindak. Dalam situasi tertentu stimulus merupakan variabel yang menguatkan (*reinforcing variable*) dalam respon perilaku khusus.

*The behavioral psychologist argues, therefore, that the laws which relate stimuli to behavioral response determine that pattern of an organism's behavior. In other words, an organism learns behavior patterns through reinforcement (Jaros & Grant, 1974:249).*

Dengan demikian, *reinforcing* juga memunculkan respon dari individu terhadap sesuatu yang disebut sikap. Sikap disini merupakan konstruksi teoritis. Sebab sikap tidak mengacu pada 'sesuatu' yang tampak di dunia nyata. Sikap adalah sesuatu yang abstrak dan hanya ada dalam pikiran (*mindset*). Konsep sikap dimasukan ke dalam teori-teori perilaku sebab ia berguna untuk menjelaskan perilaku manusia.

Lain halnya dengan Huntington (1975) yang melihat budaya politik suatu masyarakat, yakni terdiri dari sistem kepercayaan (*beliefs*) yang empiris mengenai simbol politik, nilai-nilai politik dan orientasi lain yang dapat dinyatakan secara ekspresif dari masyarakat terhadap objek-objek politik. Dari hasil kajian beberapa ahli yang dikutip Huntington bahwa budaya politik dan struktur politik adalah sesuatu yang sebangun (kongruen). Ada kesesuaian antara peran dan struktur politik di satu sisi, dengan pemusatan nilai-nilai politik dalam sistem di sisi lain. Dari nilai-nilai inilah, pada akhirnya akan membentuk orientasi individu terhadap sistem politik.

Secara teori, budaya politik meliputi orientasi kognitif, afektif dan partisipatif. *Pertama*, orientasi Kognitif biasanya hanya berupa pemahaman terbatas terhadap simbol-simbol, dan tanda lambang. Pemahaman ini sebatas pemahaman terhadap lambang negara, simbol-simbol negara dan lain sebagainya. Menurut Almond &

Verba (1963), fenomena inilah yang membentuk budaya politik parokial dalam masyarakat.

*Kedua*, orientasi afektif sedikit lebih maju dari orientasi kognitif. Disamping adanya pemahaman, ia juga melibatkan unsur emosionalitas terhadap unsur-unsur dan simbol-simbol negara. Orientasi ini membentuk budaya politik subjektif. Dan, *ketiga*, orientasi partisipatif telah melibatkan pemahaman yang tinggi disertai dengan pertimbangan yang rasional di samping emosi yang sangat dalam. Bentuk inilah yang ideal dalam interaksi individu dengan sistem politik yang modern.

Pada masyarakat tradisional, mereka hanya mengenal simbol-simbol politik dan lambang-lambang negara dalam suatu proses interaksi politik. Umumnya simbol-simbol dan lambang-lambang ini menjadi alat komunikasi politik negara yang cukup efektif. Dalam hal ini, biasanya aparaturnegara mengkonversikan nilai-nilai politik ke dalam simbol-simbol dan lambang-lambang kepada mereka. Proses gradual dari aktifitas ini meningkatkan pemahaman mereka yang pada akhirnya mempengaruhi predisposisi politik.

Yang menarik, individu berkecenderungan menjadi aktor politik. Ia dapat menentukan bagaimana bersikap terhadap suatu kebijakan atau bagaimana ia terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Oleh karenanya, individu akan selalu berorientasi pada lingkungan yang ada disekitar individu. Respon politik yang diberikan individu sangat bergantung bagaimana ia mempersepsikan lingkungan tersebut.

Tatanan nilai budaya suatu masyarakat dapat mempersepsikan seperti apa lingkungan (*environment*) yang ada disekitar mereka. Individu, dalam hal ini ia sebagai aktor politik, ketika mencoba memahami lingkungannya, akan mempolakan hubungan yang resiprokal guna kelangsungan hidupnya. Tentunya, pola hubungan ini akan membentuk hubungan yang positif (progresif), seperti adanya harmonisasi, dan bisa juga negatif (retrogresif) seperti munculnya konflik.

## **2.2 Preferensi *Voting* Individu Dalam Pemilihan Umum**

Diskusi tentang perilaku politik petani dapat dilihat dari partisipasinya dalam pemilihan umum. Kecenderungan ini ada kaitannya dengan perilaku memilih (*voting behavior*) individu dalam pemilu. (Sebenarnya banyak faktor yang turut mempengaruhi kecenderungan perilaku seseorang dalam proses politik. Bisa saja perubahan nilai-nilai politik yang diyakini sejak kecil melalui proses sosialisasi yang gradual dan intens bisa berubah seketika. Ataupun sebaliknya, keyakinan terhadap nilai-nilai politik tersebut muncul setelah mengalami suatu peristiwa politik yang luar biasa. Fenomena ini dapat dipahami dengan melihat pada kondisi lingkungan sekitar individu yang dianggap dapat menjadi pendorong perubahan kecenderungan tersebut. Bagi-sebagian ahli faktor eksternal seperti lingkungan menjadi sesuatu yang krusial dalam pembentukan kecenderungan dalam menganalisa perilaku *voting* seseorang. Stimulus yang diterima dan respons yang diberikan seseorang berada dalam suatu lingkungan yang akan mempengaruhi manifestasi sikap politik mereka. )

Dalam realitasnya keterkaitan antara tuntutan masyarakat dan tindakan pemerintah ternyata dihubungkan oleh sistem kepartaian yang kompetitif dalam suatu negara yang demokratis. Sementara dalam skala yang lebih kecil (mikro) hubungan tersebut juga dipengaruhi oleh perilaku politik individu dalam memilih partai politik dalam suatu pemilu yang pada akhirnya membuat pemerintahan. Untuk mengetahui bagaimana perilaku individu tersebut terjadi, ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku memilih (*voting*) individu. Dari gambaran dua pendekatan yang diurai di bawah ini akan dapat memperjelas kecenderungan individu dalam memilih partai politik pada setiap pemilu.

#### A. Mashab Sosiologis ✓

Pendekatan perilaku (*behavioral approach*) mendapat tempat dalam penelitian ilmu politik, banyak ilmuwan politik menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan perilaku memilih individu dalam pemilihan umum. Dan, selama bertahun-tahun pula Mashab Kolombia (*Colombia school*) mendominasi penjelasan terhadap perilaku memilih seseorang. Mashab Kolombia yang menghadirkan pendekatan sosiologis ini menganalisa perilaku memilih individu pada aspek lingkungan sosial ekonomi,

afialiasi etnis, tradisis keluarga, pekerjaan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin dan lain sebagainya. Di antara karya penelitian dari mashab ini adalah *The people's choice* tahun 1948 dan *Voting* tahun 1952 (Gaffar, 1992: 4-9).

Pendekatan sosiologis pada awalnya berasal dari Eropa, kemudian di Amerika Serikat dikembangkan oleh ilmuwan sosial yang mempunyai latar belakang pendidikan Eropa. Oleh sebab itu, ada sebutan bagi pendekatan ini sebagai model sosiologi politik Eropa. Istilah lain dalam pendekatan ini juga sangat beragam. Misalnya Denver (1989) menyebutnya sebagai *social determination approach*. Bagi mashab sosiologis, perilaku memilih seseorang (*voting behavior*) dipengaruhi oleh karakteristik latar belakang sosiologis, karakteristik orang tua dan status sosial seseorang (Niemi & Weisberg, 1984).

Kajian mendalam yang dilakukan oleh Pomper (1978:195-205) yang merinci pengaruh pengelompokan sosial dalam studi *voting behavior* ke dalam dua variabel, yaitu variabel predisposisi sosial ekonomi keluarga pemilih dan predisposisi sosial ekonomi pemilih (*voter*) mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Artinya, preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah atau ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak.

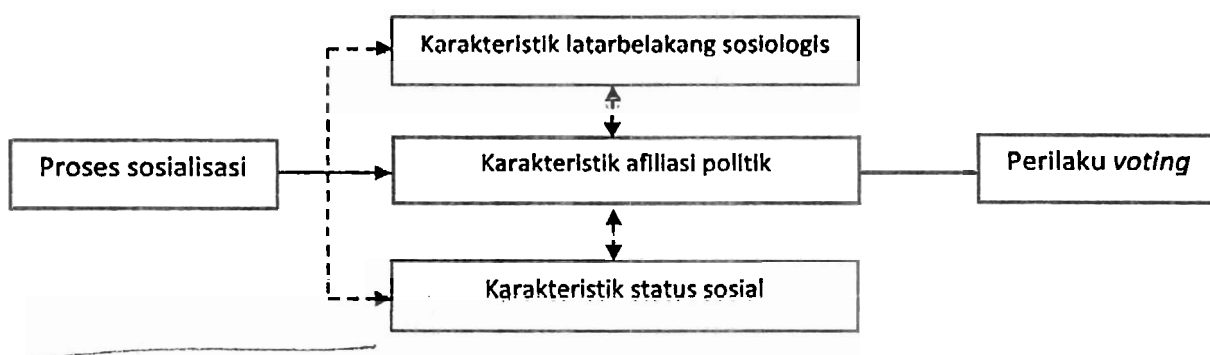
Variabel lain yang juga menjadi sorotan banyak ahli dengan menggunakan pendekatan ini adalah agama seseorang yang berpengaruh terhadap dukungan mereka kepada partai politik. Di Amerika Serikat misalnya penganut agama Katolik dan Yahudi, kulit hitam dan Hispanic (keturunan latin) merupakan pendukung setia Partai Demokrat. Sementara kaum Protestan Anglo Saxon memberikan dukungan pada Partai Republik (Niemi & Weisberg, 1984). Kecenderungan ini juga terjadi di banyak negara, agama dan asal usul budaya tertentu juga berpengaruh pada bentuk dukungan individu pada partai tertentu. Ini dapat dicontohkan di Indonesia, dimana kelompok santri tradisional yang menuntut ilmu agama di pesantren di Jawa Timur cenderung memberi dukungannya pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Dalam berbagai ragam perbedaan dalam struktur sosial yang paling tinggi pengaruhnya terhadap perilaku politik seseorang adalah faktor kelas (status ekonomi) terutama hampir di semua negara industri. Di Eropa kelompok penghasilan rendah

dan kelas pekerja cenderung memberikan suara pada Partai Sosialis atau Partai Komunis. Sedangkan kelompok menengah dan atas menjadi pendukung Partai Konservatif (Denver, 1989). Sherman & Kolker (1987:199-202) mencontohkan kecenderungan masyarakat kelas bawah dan kelas pekerja di Amerika Serikat, melalui organisasi buruh mereka cenderung mendukung Partai Demokrat, sedangkan kelas atas dan menengah menjadi pendukung Partai Republik.

Aspek lain dari pendekatan sosiologis ini adalah adanya hubungan pengaruh antara faktor geografis dengan perilaku memilih. Adanya rasa kedaerahan mempengaruhi dukungan seseorang terhadap partai politik. Di beberapa negara, wilayah tertentu mempunyai loyalitas terhadap partai tertentu, hingga bertahan selama beberapa waktu. Di Indonesia, seperti adanya loyalitas yang kuat terhadap Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan di Provinsi Bali dan Sumatera Utara. Atau loyalitas terhadap Partai Kebangkitan Bangsa di Jawa Timur, Partai Persatuan Pembangunan di Kalimantan dan Loyalitas terhadap Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Contoh lain di Skandinavia yang dijelaskan oleh Peterson & Rose (1996) yang juga melihat adanya hubungan yang signifikan antara ikatan-ikatan kedaerahan seperti adanya daerah *rural* dan *urban* sebagai basis sosial masyarakat dengan kecenderungan mereka melakukan aktifitas politik dan memberikan dukungan pada partai politik tertentu.

Gambar 2.1: Model pendekatan sosiologis



## B. Mashab Psikologis

Pendekatan ini merupakan fenomena yang muncul dari kalangan ilmuwan Amerika Serikat, karena dikembangkan sepenuhnya di Amerika Serikat melalui *Survey Research Center* di Universitas Michigan. Pendekatan psikologis dikenal juga dengan *Mashab Michigan*. Beberapa hasil penelitian dari kelompok Michigan ini memberi pengaruh yang luar biasa dalam analisa perilaku memilih ini di antaranya *The voter's decide* tahun 1954 dan *The American voter* tahun 1960 (Kristiadi, 1994:25).

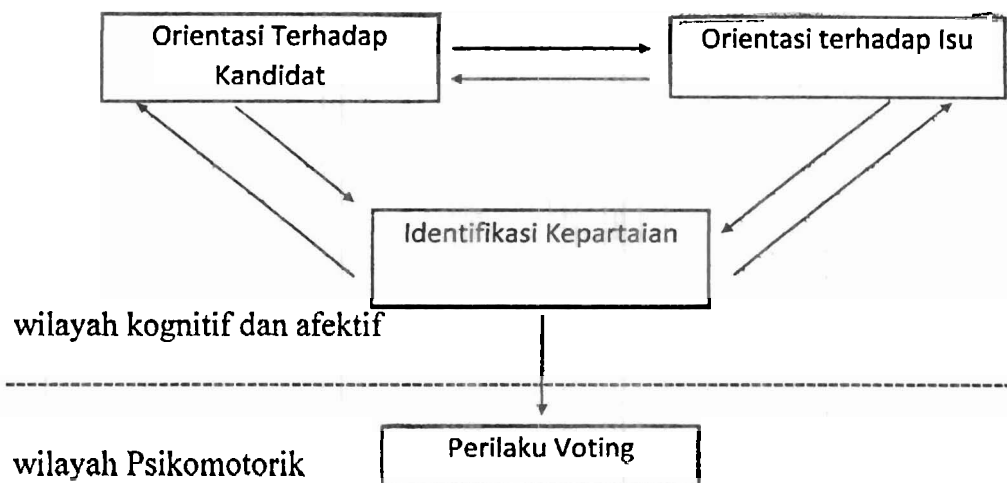
Munculnya pendekatan ini merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis yang kurang dapat menjelaskan secara metodologis kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam suatu masyarakat. Misalnya ketidakmampuan pendekatan sosiologis menjelaskan mengapa suatu kelompok masyarakat mendukung atau memilih partai politik tertentu. Yang ada adalah bahwa pendekatan sosiologis hanya menjelaskan kecenderungan kelompok masyarakat mendukung partai tertentu.

Fiorina (1981) menjelaskan bahwa pilihan seseorang terhadap partai politik tertentu melalui proses psikologis panjang. Akan tetapi putusan akhir orang tersebut sangat tergantung pula pada penilaiannya terhadap perkembangan politik kontemporer. Proses psikologis yang panjang yang berlangsung pada diri individu inilah yang melahirkan istilah identifikasi kepartaian (Campbell et al, 1960)

Pendekatan psikologis, cenderung mengidentifikasi perilaku memilih individu dari proses sosialisasi yang dilalui. Sosialisasi politik yang diterima seseorang pada masa kecil (baik lingkungan keluarga maupun perkawanan) sangat mempengaruhi pilihan politik mereka khususnya pada saat pertama kali menentukan pilihan politik. Dengan demikian, pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang adalah refleksi dari kepribadiannya merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik individu. Dan karenanya, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek variabel psikologis sebagai telaah utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu yang berkembang dan orientasi terhadap kandidat (Niemi & Weisberg, 1984).

Inti pendekatan psikologis adalah identifikasi seseorang terhadap partai tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap orang tersebut terhadap para calon dan isu-isu politik yang berkembang. Secara panjang lebar Campbell et al. (1960) menjelaskan proses terbentuknya perilaku pemilih dengan istilah *funnel of casuality*. Pengandaian ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena *voting* yang di dalam model terletak paling atas dari *funnel* (cerobong). Di gambarkan bahwa di dalam cerobong terdapat *axis* yang memiliki dimensi waktu. Kejadian-kejadian yang berhubungan satu sama lain bergerak dalam dimensi waktu tertentu, mulai dari dari mulut sampai ujung cerobong. Mulut cerobong adalah latar belakang sosial (misalnya, agama, ras, etnis, daerah), status sosial (pendidikan, pekerjaan, kelas) dan watak orang tua. Semua unsur tadi mempengaruhi identifikasi kepartaian seseorang yang merupakan bagian berikutnya dari proses tersebut. Pada tahap selanjutnya, identifikasi kepartaian akan mempengaruhi penilaian terhadap para kandidat dan isu-isu politik. Sedangkan proses yang paling dekat dengan perilaku pemilih adalah kampanye sebelum pemilu maupun kejadian-kejadian yang diberitakan media massa (Kristiadi, 1994: 30-31, cf. Niemi and Weisberg, 1984: 13-14).

Gambar 2.2: Model pendekatan mishap psikologis





## B.1 Variabel berpengaruh dalam mashab psikologis

### a) Identifikasi kepartaian

Identifikasi kepartaian diartikan sebagai bentuk perasaan seseorang secara personal terhadap partai yang dipilihnya. Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa identifikasi kepartaian adalah faktor jangka panjang yang penting dalam mempengaruhi pemberian suara pada pemilu. Mashab Michigan menekankan pada aspek sosial psikologis dari identifikasi kepartaian, bahwa orang belajar mengidentifikasi partai politik melalui proses sosialisasi gradual (Campbel et al, 1960). Kemudian pembentukan identifikasi kepartaian tersebut dianggap sama dengan cara seseorang mengembangkan afiliasi keagamaannya pada masa kanak-kanak (Miller & Shanks, 1996).

Meskipun terdapat pertanyaan penting menyangkut apakah identifikasi kepartaian tersebut stabil atau tidak pada diri seseorang, dalam realitasnya identifikasi kepartaian tetap menjadi variabel penting dalam memahami *voting*. Hal ini terlihat dari kesimpulan samar yang dibuat Niemi & Weisberg (1984: 276) "[p]arty identification is not totally stable, but it is sufficiently so as to preserve its preminent status in understanding voting."

Denver (1989:27-28) membedakan antara identifikasi kepartaian dengan *voting* sebagai berikut. Pertama, identifikasi kepartaian adalah bersifat psikologis, sementara *voting* adalah perilaku. Artinya identifikasi kepartaian ada dalam pikiran seseorang sehingga kita tidak dapat mengobservasinya. Sedangkan *voting* adalah tindakan seseorang yang dituangkan dalam secarik kertas atau alat bantu lainnya dan secara prinsip dapat diamati (walaupun pada umumnya dilakukan secara rahasia). Kedua, *voting* memiliki karakteristik waktu yang spesifik sementara identifikasi kepartaian tidak. *Voting* dapat terjadi di saat pemilu dalam periode tertentu atau kejadian lain yang berkaitan dengan pemilihan terhadap sesuatu, sementara identifikasi kepartaian berlangsung secara terus menerus tanpa memerlukan pemilu. Ketiga, identifikasi kepartaian beragam kedalamnya (*intensity*) sementara *voting*

tidak. Adakalanya seseorang menjadi pendukung kuat suatu partai, namun ada juga yang lain hanya mendukung biasa saja.

Di dalam studi *voting*, terutama yang terkait dengan pengaruh identifikasi kepartaian, terdapat dua penggolongan teoritis, yaitu kelompok tradisional yang melihat identifikasi kepartaian dan afiliasi partai individu yang terbentuk di awal-awal kehidupan individu melalui proses sosialisasi politik. Dalam hal ini identifikasi kepartaian diyakini stabil (tetap) dalam diri seseorang. Ini diyakini oleh Abramson (1975), Beck (1974), Campbell et al. (1960). Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok revisionis yang berpendapat bahwa identifikasi kepartaian individu tidak mesti stabil. Ini karena, menurut kelompok kedua ini, identifikasi kepartaian juga dipengaruhi oleh faktor politik dari dalam diri individu, seperti jarak preferensi individu dari kebijakan partai, evaluasi terhadap kandidat, evaluasi terhadap jalannya sistem politik saat itu dan intervensi dari kekuatan politik di luar diri individu tersebut. Ahli yang tergolong kelompok ini adalah Fiorina (1981).

Perbedaan yang paling mendasar antara kelompok tradisional dan kelompok revisionis dalam menjelaskan identifikasi kepartaian berkisar pada spesifikasi kekuatan-kekuatan yang menyebabkan keputusan akhir individu dalam *voting*. Kelompok tradisional lebih menekankan pada identifikasi kepartaian yang lalu merupakan faktor utama yang menentukan identifikasi kepartaian yang sekarang. Sebaliknya, kelompok revisionis secara khusus berasumsi bahwa faktor-faktor sistemik bisa menjadi penyebab bergesernya afiliasi politik seseorang (Steffensmeier & Smith, 1996)

#### b) Orientasi terhadap isu

Variabel kedua yang merupakan unit analisis dalam mempelajari perilaku *voting* ini adalah orientasi terhadap isu. Keberadaan isu dalam *voting* sebagai sebuah fenomena politik memiliki karakteristik yang sulit dipahami. Namun banyak ahli yang memusatkan perhatiannya pada perilaku memilih individu dengan melihat kondisi sosial, politik dan psikologis. Misalnya pada kondisi krisis yang dialami masyarakat, isu-isu *voting* muncul lebih intens dan menjadi opsi-opsi kebijakan bagi

partai politik (Niemi & Weisberg, 1984). Tentunya ini berpengaruh terhadap aspek pengetahuan (kognisi) mereka untuk memutuskan suatu pilihan.

Isu *voting* hadir dalam landasan pilihan-pilihan individu ketika akan memilih. Menurut Niemi & Weisberg (1984:146) ada dua perbedaan secara teori dan kenyataan empiris yang dapat diidentifikasi jenis-jenis isu ini:

*Issue voting of the first type involves conscious calculation of policy benefits for alternatives electoral choices. This 'hard issue' voting has its intellectual roots in downsonian tradition (Down, 1957). It presumes that issue voting is the final result of sophisticated decision calculus; that it represents a reasoned and thoughtful attempt by voters to use policy preferences to guide their electoral decision. The second type issue voting (which we shall denote 'easy') occurs when particular issue becomes so ingrained over long period that it structures voters 'gut response' to candidates and political parties. Because gut responses require no conceptual sophistication, they should be distributed reasonably evenly in the voting population*

#### c) Orientasi terhadap kandidat

Dalam Mashab Michigan, evaluasi kandidat menjadi salah satu variabel yang determinan dalam *voting*. Pengetahuan individu (*voter*) terhadap keberadaan kandidat akan berdampak pada posisi kandidat tersebut dalam pemilu. Biasanya para pemilih lebih cenderung memberikan evaluasi terhadap kandidat berdasarkan popularitas dalam suatu daerah pemilihan (distrik), reputasi yang dimiliki kandidat dan kemampuan kandidat yang bersangkutan.

Orientasi terhadap kandidat pada umumnya menjadi sesuatu yang signifikan dalam sistem pemilihan langsung, dimana kandidat menjadi wakil pada setiap daerah pemilihan. Biasanya kandidat yang memiliki reputasi yang baik dihadapan pemilihnya akan berpeluang dipilih. Apalagi kandidat berasal dari partai yang sedang berkuasa (*incumbent party*) akan memiliki peluang yang lebih besar menempati jabatan-jabatan politik tertentu ketimbang partai oposisi (*challenger party*)

Yang patut diperhatikan dalam orientasi kandidat ini bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap kandidat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Beberapa

indikator yang sering dipakai para pemilih untuk menilai seorang kandidat khususnya bagi pejabat publik yang hendak mencalonkan diri kembali, di antaranya kualitas, kompetensi, dan integritas kandidat. Para pejabat yang pada saat memegang jabatan tidak menunjukkan kualitas, kompetensi dan integritas pribadi yang memadai, mereka tidak akan terpilih kembali (Mondak, 1995:1043-1069). Upaya penilaian terhadap kandidat ini tidak berlangsung satu saat saja, misalnya, pada masa kampanye, namun sering dipengaruhi oleh informasi yang diterima pemilih melalui media massa yang diikutinya.

## BAB III

### TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### A. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam pembentukan orientasi politik petani dan responsnya terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat.
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan kecenderungan (predisposisi) petani dalam merespon kebijakan pemerintah (daerah) di bidang pertanian?

#### B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori dan penjelasan dalam memahami perilaku politik individu khususnya masyarakat petani dengan latar kultur etnis yang mengitarinya. Tidak seperti penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini dirancang sebagai salah satu bahan perbandingan terhadap kajian perilaku politik individu (*political behavior*) dan orientasinya terhadap kebijakan publik sehingga dimungkinkan adanya pengembangan dan pengayaan terhadap teori, konsep dan proposisi dalam telaah perilaku politik.

Dengan mengetahui teori, konsep dan proposisi terkait dengan perilaku petani, maka penelitian ini juga memetakan model orientasi politik dan kecenderungannya dalam merespons kebijakan publik. Hasil pemetaan terhadap petani ini jelas berguna untuk pemerintah daerah dalam upayanya mengkomodasi kepentingan petani di Sumatera Barat. Preferensi nilai politik petani yang berhasil dipetakan (*mapping*) dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan publik.

Walaupun demikian, hasil penelitian ini juga menghadirkan paparan yang mudah dipahami oleh praktisi politik terutama bagi aktivis partai politik. Bagi partai

306.2  
fus  
p.4

256/Hd/2010-p.11

politik, kajian ini sangat bermanfaat secara praktis untuk memformulasikan kebijakan partai dan atau pemerintah yang sesuai dengan karakteristik psikologis konstituennya. Dengan demikian, setiap partai politik dapat menjadikan kajian ini sebagai salah satu referensi penting khususnya yang terkait dengan bagaimana mendapatkan dukungan petani dalam proses politik di tingkat lokal.

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIV. NEGERI PADANG

## BAB IV METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian tiap tahun/tahapnya, maka pada tahun I digunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* yang dilakukan di 6 Kabupaten di Sumatera Barat dan 6 nagari. Dengan kriteria kabupaten dan nagari yang dijadikan lokasi penelitian didasarkan kepada daerah tradisional Sumatera Barat, yakni kawasan darek (darat) atau luhak dan kawasan rantau (pesisir). Kawasan darek terletak di dataran tinggi sebagai inti atau pusat dari kebudayaan Minangkabau, yang terbagi dalam tiga luhak, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota. Di ketiga luhak inilah nenek moyang Orang Minangkabau berasal, kemudian mereka menyebar ke seluruh Sumatera Barat bahkan sampai ke luar Sumatera Barat. Oleh karena itu, untuk melacak nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam upaya melakukan pemetaan orientasi politik dan respons politik petani subsisten terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat penelitian ini dilakukan di wilayah darek yakni Kabupaten Tanah Datar, Agam dan Lima Puluh Kota. Atas pertimbangan kesamaan karakteristik alam dan masyarakat yang berdekatan dengan lokasi penelitian dengan Kabupaten Agam, maka penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak dilakukan. Sehubungan dengan ini maka lokasi penelitian adalah sebagaimana terhimpun pada matriks berikut;

No.	Kabupaten	Nagari Lokasi Penelitian
1.	Kabupaten Tanah Datar	Nagari Minangkabau
2.	Kabupaten Agam	Nagari Koto Tengah
3.	Kabupaten Solok	Nagari Cupak
4.	Kabupaten Padang Pariaman	Nagari Pauh Kamba
5.	Kabupaten Pesisir Selatan	Nagari Pasar Baru
6.	Kabupaten Pasaman	Nagari Aia Manggih

Informan penelitian dipilih berdasarkan tujuan penelitian yaitu petani subsisten di setiap di kabupaten.

Selanjutnya data penelitian dilakukan dengan beberapa cara, yaitu wawancara mendalam (*in depth interview*), diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*), dan dokumentasi. Penggunaan keempat pendekatan tersebut bersifat saling melengkapi sehingga dapat menjelaskan masalah yang diteliti. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan memberikan penekanan (fokus) pada pemahaman empati atas suatu fenomena atau gejala sosial, dimana dimensi-dimensi historis yang turut membentuknya serta aspek-aspek yang terdapat dalam perilaku seseorang (Nachmias & Nachmias, 1987; 287)

Sedangkan hasil penelitian pada tahun I ini dijadikan landasan untuk memetakan (*mapping*) orientasi politik dan orientasi petani subsisten terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat yang akan diuji pada tahun II



## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan dipaparkan deskripsi lokasi penelitian dan temuan khusus serta pembahasannya.

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di enam kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Adapun enam kabupaten tersebut adalah: 1) Kabuapten Tanah Datar, 2) Kabupaten Agam, 3) Kabupaten Solok, 4) Kabupaten Padang Pariaman, 5) Kabupaten Pasaman, dan 6) Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya pada masing-masing kabupaten di pilih satu nagari untuk dijadikan seting penelitian.

##### **1. Kabupaten Tanah Datar**

Kabupaten Tanah datar terletak di tengah wilayah Provinsi Sumatera Barat. Secara administrative kabupaten ini mempunyai batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Agam dan 50 Kota, sebelah selatan dengan Kabupaten Solok, sebelah barat dengan Kabupaten Padang Pariaman, dan sebelah timur dengan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kota Sawahlunto

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat dengan ibukota Batusangkar. Kabupaten yang berada ditengah propinsi Sumatera Barat ini merupakan Kabupaten terkecil luas wilayahnya, yaitu 133.600 Ha (1.336 Km<sup>2</sup>). Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2006 adalah 345.383.

Kabupaten Tanah Datar adalah daerah agraris, lebih 70% Penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan maupun peternakan. Begitu juga dengan usaha masyarakat pada sektor lain juga berbasis pertanian seperti pariwisata dan industri kecil atau agro industri. Masyarakat yang telah bertani secara turun temurun ini mempunyai motivasi dan semangat kerja yang tinggi. Luhak Nan Tuo, nama lain dari Kabupaten Tanah Datar. Ada suatu keyakinan bagi masyarakat Minangkabau bahwa asal usul orang Minangkabau dari Kabupaten Tanah Datar, tepatnya dari Dusun Tuo Pariangan

Kecamatan Pariangan. Sebagai buktinya masih terdapat Sawah Satampang Baniah, Lurah Nan Indak Barangin, Galundi Nan Baselo dan Kuburan Panjang Datuk Tantejo Gurhano yang dikenal sebagai arsitek rumah gadang. Kemudian dari Luhak Tanah Datar inilah kemudian orang Minangkabau berkembang dan berpindah ke daerah lain seperti Luhak 50 kota dan Luhak Agam.

### **Nagari Minangkabau**

Nagari Minangkabau merupakan salah satu nagari dari 75 nagari di Kabupaten Tanah Datar dan satu dari lima nagari di Kecamatan Sungayang. Nagari Minangkabau satu-satunya nagari di Ranah Minang Sumbar ini terdapat di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanahdata dan konon keberadaan Nagari Minangkabau sama tuanya dengan keberadaan etnis Minangkabau sendiri. Luas Nagari ini adalah 845 ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Nagari Sungayang; sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Tarab; sebelah barat berbatasan dengan dengan Nagari Sungai Tarab ; dan sebelah timur berbatasan dengan Nagari Pagaruyung.

Nagari Minangkabau sendiri memiliki penduduk 2810 orang dengan 683 KK,dari penduduk sebesar itu 64 persen berprofesi petani, 8 persen PNS, 16 persen wiraswasta dan 12 persen berprofesi lain-lainnya. Lahan yang digarap 64 persen petani tadi seluas 273 hektar dan didukung peternakan 152 ekor sapi, 138 ekor kambing, 2564 ekor ayam dan 85 ekor kerbau.

Pertanian nagari ini cukup bagus karena topografi nagari berada pada posisi cukup baik yakni 500 hingga 700 meter dari permukaan laut (MDPL) dengan curah hujan 1500 M/tahun dan suhu rata-rata 20 hingga 35 derajat celsius dan jarak dengan ibu kota kabupaten yang cukup dekat yakni 4 Km mendukung pula pemasaran pertanian.

## **2. Kabupaten Padang Pariaman**

Kabupaten Padang Pariaman memiliki letak yang cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat dengan luas 1.328,79 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini berbatasan sebelah utara dengan

Kabupaten Agam, sebelah selatan dengan Kota Padang, sebelah timur dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Pariaman dan Samudera Hindia.

Dalam telaah geografis, kabupaten Padang Pariaman terletak pada posisi astronomis yaitu antara  $0^{\circ} 11'$  -  $0^{\circ}49'$  Lintang Selatan dan  $96^{\circ} 36'$  -  $100^{\circ} 28'$  Bujur Timur. Kabupaten ini tercatat memiliki wilayah seluas 1.328,79 Km<sup>2</sup>. Adapun luas daratan dari wilayah ini adalah setara dengan 3.15 persen dari luas daratan propinsi Sumatera Barat.

Diantara berbagai sektor potensial yang menjadi perhatian dan andalan dalam pergerakan ekonomi masyarakat adalah bidang pertanian. Ditinjau dari struktur perekonomian, Kabupaten Padang Pariaman masih didominasi oleh sektor pertanian. Hasil survei angkatan kerja daerah (Sakerda) pada tahun 1998 melaporkan bahwa sebagian besar penduduk Padang Pariaman mempunyai mata pencarian utama di sektor pertanian. Laporan tersebut sekaligus memperkuat hasil sensus ekonomi yang menyatakan bahwa sebanyak 76.650 (dari 125.580) atau 61,04 persen unit usaha di kabupaten tersebut bergerak pada sektor pertanian.

### **Nagari Pauh Kambar**

Nagari Pauh Kambar merupakan salah satu dari 40 nagari yang terdapat di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Nagari ini merupakan cakupan dari kecamatan Nan Sabaris dan terdiri dari 8 korong (jorong). Luas daerah yang ditetapkan sebagai kawasan administratif dari Nagari Pauh Kambar adalah seluas 6,55 Km<sup>2</sup>.

Dilihat dari segi aksesibilitas, posisi Nagari Pauh Kambar dapat diakses secara mudah karena dilalui oleh jalur lalu lintas raya yakni jalan raya Padang-Lubuk Basung. Jarak akses nagari ini dari ibu kota kecamatan adalah 0,5 Km, sedangkan jarak akses ke ibu kota kabupaten adalah 11 Km dan jarak ke ibu kota Propinsi adalah sejauh 44 Km. Dibandingkan nagari-nagari lain dalam lingkup kecamatan nan sabaris, Nagari Pauh Kambar merupakan nagari yang memiliki akses terdekat dengan ibu kota kecamatan. Sedangkan Kecamatan Nan Sabaris merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jarak akses terdekat dengan ibu kota Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu konsekuensi positif dari kedekatan

akses tersebut Nagari Pauh Kamar memiliki kesempatan lebih cepat berkembang.

Dalam hal kependudukan, Nagari Pauh Kamar dihuni oleh sebanyak 5.752 jiwa penduduk dengan komposisi yaitu sebanyak 2.654 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 3.098 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan dari sisi kondisi status keluarga, dari 1.221 KK yang tercatat berdasarkan klasifikasi yang ada, terdapat sebanyak 189 KK dengan status pra-sejahtera (PS), 256 KK dengan status sejatera-1 (S-1), 203 KK S-2, 511 KK S-3, dan sebanyak 62 KK S-3 plus.

Nagari Pauh Kamar merupakan salah satu wilayah potensial pertanian (terutama tanaman pangan) dikawasan Kab. Padang Pariaman. Dari data yang ada, Kec. Nan Sabaris menduduki urutan ketiga dari kecamatan yang memiliki lahan hamparan sawah terluas dengan luas 1.266 Ha (urutan pertama Kec. Lubuk Alung: 3.804 Ha dan kedua Kec. Batang Anai: 2.463 Ha). Potensi pertanian di Nagari Pauh Kamar, khususnya padi sawah dapat ditunjukkan dari luas panen padi seluas 576 Ha dengan banyak produksi sebesar 3.455,20 ton. Deskripsi data ini menunjukkan bahwa pertanian masih merupakan sektor dominan dan bertani adalah profesi yang umumnya menjadi tumpuan ekonomi masyarakat Nagari Pauh Kamar

### **3. Kabupaten Pasaman**

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 3.947,63,08 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 12 kecamatan dan 32 Nagari. Secara geografis dilintasi khatulistiwa dan berada pada 0° 55' Lintang Utara sampai dengan 0°6' Lintang Selatan dan 99°45' Bujur Timur sampai dengan 100°21' Bujur Timur. Ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.240 meter di atas permukaan laut. Pada beberapa kecamatan terdapat beberapa gunung, seperti Gunung Ambun di Bonjol, Gunung Sigapuak dan Kulabu di Dua Koto, Malengang di Rao, dan Gunung Tambin yang merupakan gunung tertinggi di wilayah ni terletak di Kecamatan Lubuk Sikaping.

Wilayah Kabupaten Pasaman merupakan Kabupaten paling Utara dari Propinsi Sumatera Barat dan berbatasan: bagian utara dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara, sebelah timur dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi

Riau, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Agam dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat.

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu daerah agraris di Sumatera Barat, yang pada tahun 2007 mampu memproduksi padi sawah sekitar 228.270 ton. Nilai ini menunjukkan terjadinya kenaikan sebesar 17,82 % dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 193.742 ton. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Lubuk Sikaping karena kecamatan ini satu diantara 4 kecamatan yang memiliki potensi dalam kapasitasnya terhadap luas panen dan produksi sawah. Penduduk Kabupaten Pasaman menurut hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2007 berjumlah sebanyak 258.631 jiwa dengan komposisi 128.141 jiwa laki-laki dan 130.490 jiwa perempuan. Dengan rasio jenis kelamin 98 jiwa laki-laki setiap 100 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar pada 12 ( dua belas) kecamatan di Kabupaten Pasaman.

Sektor Pertanian merupakan sektor paling dominan sebagai lapangan usaha penduduk Pasaman pada tahun 2007. Ini terlihat dari kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai 87.487 jiwa dari penduduk yang bekerja. Jika diperhatikan potensi masing-masing kecamatan di Kab. Pasaman dalam kapasitasnya terhadap luas panen dan produksi padi sawah ini, sekitar 50 persen dari total produksi Kab. Pasaman di dominasi oleh 4 (empat) kecamatan dari 12 kecamatan yang ada. Kecamatan dimaksud adalah kec. Panti, Padang Gelugur, Lubuk Sikaping dan Kec. Tigo Nagari.

Disamping komoditi padi sawah, karena hampir semua kecamatan di Kab. Pasaman dikelilingi oleh daerah perbukitan, hal ini juga membuat masyarakat Pasaman tidak terbatas hanya pada pemanfaatan lahan sawah saja, sehingga ladangpun merupakan harapan untuk ditanami padi gogo (padi ladang). Hal ini dapat dilihat dari hasil produksi padi ladang pada tahun 2007 ini tercatat sebesar 4.753 ton dengan luas panen 1.802 Ha, dan sekitar 46,39 persen produksinya terdapat di Kec. Mapat Tunggul.

#### **4. Kabuapten Solok**

Secara geografis, Kabupaten Solok terletak pada posisi astronomis yaitu antara 01° 20' 27" dan 01° 2'39" Lintang Selatan dan 100° 25'00" dan 100° 33'43" Bujur Timur dengan topografi wilayah yang sangat bervariasi yakni antara dataran, lembah dan berbukit-bukit. Luas wilayah Kabupaten adalah 373.800 Ha (3.738 Km<sup>2</sup>).

Kabupaten solok merupakan salah satu kawasan potensial pertanian (dalam arti luas) di Sumatera Barat. Dilihat dari sisi pemanfaatan lahan, dari totalitas lahan yang terdapat di kawasan Kab solok, sebanyak 8,3 persen dikelola oleh rakyat yang digunakan/diolah untuk ladang atau kebun dan sebanyak 6,7 persen dikelola oleh perusahaan perkebunan. Sedangkan pemanfaatan lahan yang digunakan untuk sawah lebih kurang seluas 4,7 persen dan merupakan areal sawah terbesar di Sumatera Barat. Sebagai konsekwensi logisnya adalah Kabupaten Solok menjadi kawasan sentra produksi padi di Propinsi Sumatera Barat. Sehubungan dengan hal tersebut sebenarnya area sawah terluas dikabupaten solok berada dalam kawasan Kecamatan Gunung Talang, diikuti oleh Kecamatan Kubung dan Bukit Sundi dengan luas areal sawah diatas 3000 Ha.

#### **Nagari cupak**

Nagari Cupak merupakan satu dari delapan nagari yang terdapat di dalam kawasan Kecamatan Gunung Talang. Luas daerah yang ditetapkan sebagai cakupan wilayah Nagari Cupak secara administratif yakni seluas 19,38 Km<sup>2</sup>.

Dari segi aksesibilitas, jarak akses dari nagari Cupak ke pusat ibu kota kecamatan adalah sejauh 3Km. Sedangkan jarak akses ke pusat ibu kota kabupaten adalah sejauh 8 Km dan jarak akses ke ibu kota Propinsi adalah sejauh 44 Km. keseluruhan akses tersebut dapat dicapai dan dilalui oleh angkutan umum yang memadai. Posisi Nagari Cupak berada cukup dekat dengan pusat pemerintahan yakni sama-sama berada dalam satu wilayah Kecamatan Gunung Talang.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Kecamatan Gunung Talang merupakan area sawah terluas dengan luas tanam seluas 7.896 Ha.

Dari luas area tanam tersebut dihasilkan produksi padi sebanyak 50.619 ton. Angka ini berbeda sangat signifikan dengan capaian produksi pada Kecamatan lainnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dan sekaligus menunjukkan bahwa profesi atau tumpuan mata pencarian penduduk yang dominan adalah bertani. Asumsi ini dibuktikan oleh data jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian/perkebunan menduduki jumlah tertinggi yakni sebanyak 10.665 orang. dan Nagari Cupak termasuk penyumbang yang besar dari angka jumlah petani tersebut. Keutamaan kawasan pertanian nagari cupak adalah bahwa nagari tersebut merupakan kawasan pertanian padi yang menghasilkan komoditi beras solok dengan kualitas terbaik yang menjadi ciri khas cita rasa produksi beras solok. Hal ini cukup menjadi alasan untuk menjadikan Nagari Cupak sebagai kawasan prioritas pertanian (Khususnya padi).

#### **5. Kabupaten Agam**

Kabupaten Agam Berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Pasaman, sebelah timur dengan Kabupaten 50 Kota, sebelah selatan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten tanah Datar, sedangkan sebelah baratnya dengan Samudera Hindia. Secara geografis, wilayah kabuapten Agam terdiri dari daratan tinggi dan daerah pesisir pantai dengan luas wilayah 2.232,30 km<sup>2</sup> atau 5,26% dari luas Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 43.22904 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini mempunyai 15 Kecamatan dengan 73 nagari.

Beras kuriak kusuik dari Tilatang Kamang paling diminati pembeli, sangat laris dan sering di bawa keluar daerah terutama Provinsi Riau, Pekanbaru dan Batam. Berasal dari Kecamatan Tialang Kamang. Lahan pertanian di Tilatang Kamang sangat subur dan luas, memberikan kelebihan bagi petani. Rata-rata petani bisa menjual beras setiap kali panen. Sistem penanaman padi menggunakan sistem organik yang tidak lagi memanfaatkan bahan kimia.

#### **Nagari Koto Tengah**

Nagari Koto Tengah berada di kecamatan Tilatang Kamang dengan luas wilayah 6.219 ha dan memilikin 28 jorong. Nagari ini berbatasan sebelah utara dengan Nagari Magek, sbelah selatan dengan Nagari Kapau dan Gadut, sebelah

barat dengan Nagari Koto rantang dan Pasia Laweh, serta sebelah timur dengan Bungo Koto Tuo dan Panampuang. Jumlah penduduk 16.296 jiwa dengan 4.491 kepala keluarga, terdiri-dari laki-laki sejumlah 7.291 jiwa dan perempuan 9.005 jiwa

#### **6. Pesisir Selatan**

Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera barat dari bagian selatan dengan luas wilayah 5749,89 km<sup>2</sup> yang terdiri dari daerah pegunungan dan pantai, 12 kecamatan, 37 nagari dan 350 kampung. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah barat dengan Samudera Hindia dan sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan Provinsi Jambi.

Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2008 berjumlah 433.181 jiwa (213.462 jiwa laki-laki dan 219.719 jiwa perempuan). Wilayah administrasi pemerintahan terdiri atas 12 kecamatan dan 37 nagari. Sebagian besar penduduk Pesisir Selatan bergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan dan perdagangan. Sementara sumber daya potensial lainnya adalah pertambangan, perkebunan dan pariwisata.



## **B. Temuan dan Pembahasan Penelitian**

Sesuai dengan Tujuan Penelitian pada tahap pertama, maka penelitian ini dilakukan dalam upaya mendiskripsikan keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam pembentukan orientasi politik petani dan responsnya terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat. Sehubungan dengan itu, ada beberapa isu yang dijadikan dasar untuk menganalisis temuan penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian. Bagaimana Keyakinan terhadap masalah pertanian dalam lingkup adat dan tradisi ke-Minangkabau-an? Bagaimana penyelesaian masalah pertanian sesuai dengan adat dan tradisi Keminangkabauan? Kesesuaian kebijakan pemerintah dibidang pertanian dengan adat dan tradisi (nilai keminangkabauan) masyarakat? Kebijakan pemerintah dibidang pertanian terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi? Dengan memahami fenomena ini, maka akan diketahui perubahan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam tradisi bertadi di Sumatera Barat.

### **I. Keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam pembentukan orientasi politik dan respons politik petani terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat**

Temuan penelitian terhadap keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dan responnya terhadap kebijakan di lokasi penelitian terungkap sebagai berikut:

Secara umum, dari enam nagari di enam kabupaten/kota di Sumatera Barat yang diteliti, ditemui bahwa pertanian merupakan bagian penting dalam masyarakat tradisional Sumatera Barat yakni Minangkabau. Dalam masyarakat adat Minangkabau, sawah dan ladang dianggap sebagai sumber pokok ekonomi dan kemakmuran. Dengan sawah dan ladang tersebut orang Minangkabau semenjak dahulu begitupun sekarang membangun dusun, teratak, koto, dan nagari, membangun kampung dan halaman, balairung dan masjid, jalan dan tepian tempat mandi, bangunan sekolah, langgar dan mushalla. Dengan hasil sawah dan ladang itulah setiap yang dibangun itu dapat diisi, dan diramaikan serta dihiasi, seperti masjid, jalan, surau, dan sekolah. Rukun Islam disempurnakan dengan hasil sawah dan ladang. Begitupun pembiayaan perang gerilya di waktu revolusi fisik

menentang penjajahan Belanda, sawah ladang berikut hasilnya disumbangkan untuk kepentingan kemerdekaan.

Secara substansial, Fungsi sawah dan ladang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau tersebut, dimanifestasikan secara adat melalui berbagai bentuk upacara adat yang diyakini dapat memberikan manfaat besar dari hasil pertanian. Upacara adat ini disebut juga dengan adat turun kesawah yang diselenggarakan melalui:

a. *Balambe hari*

*Balambe hari*, adalah aktivitas yang dilakukan oleh petani sebelum turun ke sawah. Tradisi ini terdiri-dari beberapa tahap, yakni, *pertama*, Mengumpulkan petani untuk melaksanakan pertemuan pada waktu yang sudah ditentukan. Tradisi ini diselenggarakan secara unik, dimana sebelum turun ke sawah petani menghimpun petani lainnya dengan menggunakan masjid/mushalla sebagai sebagai alat komunikasi dan informasi. Seperti yang diungkapkan oleh MD salah seorang petani dari Nagari Minangkabau,

“Disini turun ke sawah serentak, disiarkan atau diumumkan di mesjid terlebih dahulu, untuk membersihkan *banda* atau irigasi dan kemudian gotong-royong secara bersama. Kegiatan ini dilakukan satu kali dalam lima belas hingga tiga puluh hari. Itu saja yang menjadi kebiasaan masyarakat petani disini, karna kita memakai *banda* (saluran irigasi) tersebut secara bersama”.

Selain itu, tradisi unik yang dilakukan oleh petani untuk memulai turun ke sawah juga dilakukan dengan cara diumumkan oleh salah seorang petugas yang disebut dengan *upeh* keseluruh wilayah nagari. *Upeh* memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi dan memobilisasi masyarakat terkait dengan aktivitas yang akan dilaksanakan bersama oleh masyarakat nagari. Dalam menyampaikan informasi *upeh* berjalan mengelilingi nagari sambil memukul alat musik tradisonal, seperti yang diungkapkan oleh DNKS petani di Nagari Pauh Kamba, Padang Pariaman;

” Kalau cara dahulu, semasa kita masih diperintah “*kupalo nagari*” (kepala nagari), saat musim turun ke sawah tiba, diketok *canang* (alat musik tradisonal) oleh seorang petugas yang disebut *upeh* untuk memberitahukan kepada masyarakat waktunya turun kesawah karena sudah mulai musim hujan”.

*Kedua*, sebelum turun ke sawah terlebih dahulu dilakukan pertemuan di masjid/mushalla yang dihadiri oleh pemangku adat (niniak mamak) dan petani yang akan menggarap sawahnya. Peranan pemangku adat dalam pertemuan ini sangat penting dalam memprakarsai lahir kesepakatan dalam membuat perencanaan turun ke sawah. Keterlibatan pemangku adat ini juga dikarenakan dalam struktur adat minangkabau yang mempatkan peranan pemangku adat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh kaumnya termasuk dalam masalah pertanian. Menurut RDS petani di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman,

“Sebagaimana yang digariskan oleh adat minangkabau bahwa masalah sako dan pusako adalah urusan ninik mamak. Dalam konteks sako dan pusako ini terlingkupi di dalamnya masalah pengelolaan lahan pertanian yang digarap oleh anak kemenakannya. Artinya, pemangku adat (niniak mamak) merupakan unsur yang berperan penting dalam menentukan dan membuat berbagai kesepakatan dan tindakan terkait dengan dinamika dalam kehidupan bertani dari anak kemenakannya. Dengan keterlibatan Niniak mamak inilah kemudian aktivitas pertanian dalam masyarakat Minangkabau dilaksanakan dan dilestarikan secara turun temurun”.

Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang waktu yang tepat untuk turun ke sawah dan membuat beberapa kesepakatan penting terkait dengan pengelolaan sawah mulai dari masa menanam sampai pada masa panen tiba. Ini artinya, pertemuan yang diselenggarakan akan menentukan pula terhadap masa depan sawah dan petani itu sendiri, oleh karena itu setiap petani yang akan menggarap sawahnya wajib menghadiri pertemuan ini. Pertemuan tersebut juga memiliki arti penting bagi petani yang hadir dan membuat kesepakatan, dimana dalam dirinya (petani) akan menjelma menjadi tanggungjawab moral selama hidupnya untuk melaksanakan kesepakatan tadi. Sedangkan bagi yang tidak mengikuti kegiatan turun ke sawah setelah menyetujui kesepakatan yang dibuat maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi secara adat, misalnya dikucilkan dalam pergaulan sehari-hari.

*Ketiga*, sebagai bentuk implementasi pertemuan tersebut kemudian dilakukan *turun ke sawah* secara bersama. *Turun ke sawah* ini di mulai dengan membersihkan *tali banda* (saluran air) di sawah salah seorang petani dan dilanjutkan ke sawah petani yang lainnya sampai sawah tersebut benar-benar siap untuk di Tanami. Dan apabila ada sawah yang belum siap untuk di tanami, maka

orang-orang yang terlibat dalam *balambe hari* akan merasa memiliki hutang dan berusaha mencari waktu lain untuk mengerjakannya sampai sawah tersebut siap untuk di Tanami. Inilah bentuk tanggungjawab moral petani dalam tradisi *balambe hari*. Demikian juga, apabila ada salah seorang petani yang tidak ikut membersihkan sawah petani lainnya, maka sawahnya juga tidak akan di bersihkan.

*Ke-empat, bajulo-julo* (bergilir) yang dilaksanakan pada masa panen yang dilakukan bersama secara bergiliran antar sawah petani seperti sebelum bertanam di lakukan. Manfaat dari tradisi *balambe hari* pada masa panen ini adalah, petani bisa menikmati hasil penen mereka dengan lebih memuaskan karena tidak ada upah yang harus keluarkan, jika dibandingkan dengan menggarap lahan secara individu dengan sistem upahan. Sebagaimana diungkapkan oleh BS salah seorang petani di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman;

“Dalam tradisi kami turun kesawah dahulu ada istilah *lembe hari atau bajulo-julo* (bergilir). Sesama petani dalam satu kelompok hamparan besama merencanakan kapan waktu akan turun kesawah. Sawah kemudian dikerjakan secara bergilir. Minggu ini sawah si A, berikutnya sawah si B”.

Nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam tradisi *balambe hari* merupakan sebuah bentuk kearifan lokal tentang bagaimana masyarakat petani menghayati lingkungan dan ikatan sosial mereka dalam merespon berbagai perubahan untuk memenuhi kebutuhannya. *Balambe hari* yang diselenggarakan secara unik interpretasikan dalam tradisi yang diyakini memberikan manfaat memperkuat rasa kekeluargaan dan kepedulian sosial terhadap sesama masyarakat tani serta memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi manakala proses menanam padi, jenis benih yang akan ditanam dan pemanfaatan *tali banda* sampai masa panen berlangsung. Aktivitas ini memungkinkan seluruh petani saling berkontribusi secara aktif menentukan berbagai alternatif dalam membuat perencanaan mengelola sawah mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh ZB salah seorang petani di Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasaman;

“Sebelum turun ke sawah, kami juga ada berdiskusi dengan sesama petani yang lokasi sawahnya berdekatan untuk menyepakati jenis benih apa yang sama-sama akan ditanam. Kami ada gotong-royong membersihkan tali banda, bersama-sama *manaiakan aia ka ateh* sebelum turun ke sawah”.

Fenomena ini, menjelaskan bahwa dengan tradisi ini petani dapat memutuskan sendiri waktu yang tepat untuk memulai menanam bersama sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, memanfaatkan *tali banda* (saluran irigasi) secara bersama sehingga bisa mengalir semua sawah petani sampai datang masa *manyabik* dan *mairiak* (panen) juga dilakukan bersama.

#### b. *Gotong Royong*

Gotong royong dalam kerangka nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam tradisi bertani memiliki makna yang dalam yang dikaitkan dengan budi atau akhlak seseorang. Dan ini adalah salah satu syarat yang dikehendaki oleh adat yang berkualitas. Seperti yang ditulis oleh Idrus Hakimmy (1994:195) “budi ialah dapat merasakan kedalam diri apa yang dirasakan oleh orang lain” ..yang mendorong seseorang berbuat baik terhadap sesamanya.

Budi adalah berdasarkan kesanggupan merasakan perasaan orang lain yang dapat dirasakan bagi diri sendiri, karena menurut adat yang disebut *raso* (rasa) adalah yang terasa bagi diri, *pareso* (perasaan) adalah yang terkandung dalam hati, dengan demikian lahirlah rasa seperti kata adat *nan elok de awak katuju de urang, sokiek dek awak sokiek dek urang* (yang baik bagi kita juga baik bagi orang lain, yang sakit bagi kita juga sakit bagi orang lain). Dengan demikian lahirlah pada seseorang rasa kasih sayang, sopan dan santun sesamanya. Kesengsaraan dan serba kekurangan secara spontan dapat dirasakan oleh seseorang.

Dalam kehidupan sehari-hari telah dilaksanakan secara luas di dalam adat Minangkabau yang melahirkan sifat tolong-menolong, saling membantu yang terlepas dari perhitungan laba dan rugi, karenanya masyarakatnya dihubungkan oleh tali kekeluargaan yang kuat kokoh yang senantiasa menghayati budi luhur dan halus. Dari budi inilah lahirnya sifat baik lainnya dan berbagai bentuk sifat sosial dalam kehidupan. Nilai-nilai adat inilah sebenarnya yang mendasari bagaimana gotong royong itu dilakukan dalam mengelola pertanian di Sumatera Barat.

Dalam mengelola sawah, kegiatan gotong royong diselenggarakan atas dasar *raso jo pareso* (rasa dan perasaan) dimana dilakukan tanpa adanya instruksi dan sistem upah tertentu seperti yang dikenal saat ini. Artinya, masyarakat datang

bergotong royong tanpa diundang atau diminta tenaganya tetapi datang atas kesadaran sendiri ingin membantu yang lainnya. Jadi apabila ada salah seorang petani yang sedang mengerjakan sawahnya, maka serta merta siapa saja yang melihat akan langsung membantunya. (wawancara dengan salah seorang petani di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar). Gotong royong biasanya dilakukan ketika masa panen sudah dating, Seperti yang diungkapkan oleh RDS salah seorang petani di Nagari Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman:

“Saya ingat waktu kecil-kecil dahulu, orang kampung sini bertani dengan cara bersama-sama/gotong royong. Sawah dikerjakan secara bergilir mulai dari awal *maluluak* (membajak) sampai padi siap untuk dipanen. Setelah *manyabik* (potong padi), padi dibiarkan disawah ± 1 minggu kemudian baru dibawa ke *lungguak* (gunungan padi yang belum dipisah dengan batangnya) ± 2-4 minggu disini. Semua itu murni dikerjakan dengan gotong royong.”

c. *Ratik tulak bala*

*Ratik tulak bala* merupakan kegiatan seremonial dalam tradisi bertani dalam masyarakat Minangkabau. *Ratik tulak bala* dilakukan di tempat tertentu untuk mencegah terjadinya berbagai bala atau musibah yang akan mengganggu pertanian dengan memanjatkan doa-doa tertentu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan ini diselenggarakan dengan melakukan ritual-ritual tertentu yang mendasari keyakinan masyarakat saat turun kesawah. Sebagaimana diungkapkan SS petani di nagari Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman

“Seperti ritual *ma-asok* benih sebelum ditanami, kemudian menanam sebanyak tujuh rumpun terlebih dahulu. Begitu juga saat padi mulai hampir *tabik* (menguning) dilakukan ritual *ratik tulak bala* sampai pada ritual masa *manyabik* (panen) yang disebut *manuai*. Kegiatan *manuai* ini dilakukan dengan mengambil tujuh rumpun padi, diikat dan diasapi dengan kemenyan, setelah itu baru dipanen. Rangkaian tradisi ini diyakini masyarakat petani memiliki hikmah dan dapat membawa berkah pada hasil pertanian mereka. Hal ini juga dikaitkan dengan keimanan bahwa berbagai bala atau musibah yang mungkin mengganggu pertanian mereka dapat dihindari dengan jalan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan melalui *ratik* tersebut

Di Kabupaten Solok tradisi *tulak bala* juga dilakukan oleh petani untuk mengatasi hama yang menyerang tanaman yang dilakukan di mushalla dan di sawah. Sebagaimana diungkapkan AH petani Kabupaten Solok).

“Aktivitas *tulak bala* biasanya dilakukan di mushalla dan di sawah. Di tempat ini kemudian dilakukan pemotongan ayam, dimasak dan disantap bersama diikuti dengan berdoa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan tradisi *basimbua* (mencipratkan air) atau saling mencipratkan air kekawan-kawan sebagai bentuk

menolak bala. Umpamanya, hama tikus sedang mengganas, untuk bala ini ini dipotong ayam sebanyak 5 ekor. Nanti di masak dan dimakan bersama diikuti dengan *halega di sahalik sawah* (mengitari seluruh kawasan sawah) sambil membaca doa *ratik* sepanjang jalan. Atau misalnya lama tidak turun hujan, kadang-kadang menyembelih kambing di *kapalo banda* (hulu sungai)".

Tradisi *balambe hari* ini di atas merupakan nilai-nilai ke-Minangkabau-an yang sudah melembaga dalam kehidupan petani di Sumatera Barat. Sampai saat ini tradisi ini masih diselenggarakan oleh petani, karena diyakini dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pertanian. Namun demikian petani juga menyadari bahwa perubahan pola pikir petani dan intervensi pemerintah melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan petani, telah mengakibatkan tradisi *balambe hari* miulai berkurang intensitas dan mengalami pergeseran maka. Berikut secara ringkas, digambarkan dalam matriks nilai-nilai ke-Minangkabau-an tradisi bertani di Sumatera Barat :

**Tabel V.1: Keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam pembentukan Orientasi politik dan respons politik petani Terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat**

Nilai-nilai ke-Minangkabauan	Keterangan
Balambe hari	Pertemuan yang dilakukan petani sebelum turun ke sawah yang diprakarsai oleh pemangku adat (ninak mamak). Hasil kesepakatan dari pertemuan ini menjadi tanggungjawab moral bagi petani untuk melaksanakannya
Turun ke sawah	Petani secara serentak turun ke sawah yang dimulai dengan membersihkan tali Banda sampai sawah siap ditanami. Pekerjaan turun ke sawah dilaksanakan secara bergiliran diantara sawah petani
Gotong royong	Tradisi dalam pengolahan sawah mulai dari mempersiapkan talibandar sampai masa panen. Dilaksanakan secara bergiliran di setiap sawah petani tanpa di bayar.
Bajulo-Julo	Dilaksanakan pada masa panen yang dilakukan bersama secara bergiliran antar sawah petani seperti sebelum bertanam di lakukan. Manfaat dari tradisi <i>balambe hari</i> pada masa panen ini adalah, petani bisa menikmati hasil penen mereka dengan lebih memuaskan karena tidak ada upah yang harus dikeluarkan, jika dibandingkan dengan menggarap lahan secara individu dengan sistem upahan.
Ratik tulak bala	kegiatan seremonial dalam tradisi bertani dalam masyarakat Minangkabau untuk mencegah wabah yang melanda sawah

## II. Kecenderungan (predisposisi) petani Dalam Merespons Kebijakan Pemerintah (daerah) di Sumatera Barat

Tradisi bertani dalam masyarakat Minangkabau tersebut di atas, umumnya diakui oleh masyarakat petani di Sumatera Barat sampai saat ini masih berlangsung, akan tetapi pelaksanaannya telah mengalami proses perubahan seiring dengan adanya perubahan pola pikir petani yang dipengaruhi oleh kondisi alam dan intervensi yang intens dari pemerintah dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan petani. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam tradisi bertani di Sumatera Barat menghadapi perubahan yang terjadi? Nilai manakah yang dominan? Bagaimana petani merespon perubahan tersebut?

Dari penelitian yang dilakukan, umumnya diakui oleh petani di Sumatera Barat bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani sejauh ini cukup membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Seperti, Tanam Padi Sebatang (PTS), pupuk bersubsidi, pembentukan kelompok tani dan Program Penyuluhan Pertanian (PPL).

Di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar, menurut salah seorang petani, “ sejak diterapkannya PTS , produksi taninya meningkat hingga dua kali lipat” dan tentunya keadaan ini menguntungkan ekonomi keluarganya. Menurut salah seorang petani di Nagari Cupak, Kabupaten Solok, pemerintah setempat juga telah memprioritaskan di bidang pertanian padi yakni Sekolah Lapang Padi Tanam Sebatang (SLPTS). Konsep pelaksanaan kebijakan ini adalah dengan membina kelompok-kelompok tani ini menanam dan membudi dayakan varietas Padi Tanam Sebatang (PTS). Dalam sekolah lapang ini kelompok tani dibina dalam sebuah lahan hamparan milik kelompok sebagai area bertani sekaligus belajar tentang pembudidayaan PTS ini. Mulai dari penangkaran bibit unggul, pola menanam, penanganan hama dan berbagai hal yang menyangkut pengelolaan PTS secara baik dan benar. Tujuannya adalah agar petani yang umumnya berpredikat sebagai petani subsisten dapat meningkat taraf hidupnya dari konsep bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi konsep bertani sebagai *better bussines* , yaitu bertani sebagai lapangan usaha yang menjanjikan.



Di Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasaman, kebijakan pemerintah dalam bentuk pemberian pupuk bersubsidi juga dirasakan oleh petani memberikan nilai tambah dalam hal perekonomian mereka. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang petani, upiak; “ Saya kemarin membeli pupuk bersubsidi Rp. 75.000/karung dari harga sebelum disubsidi sebesar Rp. 125.000/karung”. Keringanan biaya pembelian pupuk ini dapat meringankan beban saya, karena sawah saya banyak’ sekarang saya tidak terlalu berat memenuhi kebutuhan anak sekolah. Hal yang sama juga diakui oleh Zainab, “Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga sering turun ke sawah kami untuk meninjau permasalahan pertanian yang kami hadapi. Misalnya satu kali dalam sebulan, mereka meninjau dan menanyakan kepada kami apa permasalahan yang sering dihadapi tatkala kegiatan pertanian berlangsung. Ada program pemerintah berupa Pupuk bersubsidi itu dibeli melalui kelompok tani dan dihantar kelokasi atau areal pertanian dengan mobil. Pupuk tersebut disubsidi agar kami petani terjangkau harganya”.

Demikian juga di Nagari Koto Tengah Kabupaten Agam, Menurut salah seorang petani “ eksistensi kelompok tani memang sangat dirasakan”. “melalui kelompok tani ini, pemerintah memberikan informasi adanya kebijakan padi tanam sebatang, diumumkan dimasjid, kemudian petani dikumpulkan, dan di sanalah disosialisasikan cara bertanam dengan pola tanam sebatang tersebut. Kebijakan lain seperti pupuk bersubsidi juga seperti itu, melalui kelompok tani petani baru dapat mengaksesnya. Begitu juga Di Nagari Minangkabau, menurut salah seorang petani’ “Saya terdaftar dalam kelompok tani, dengan begitu banyak kemudahan dan informasi yang terima terkait dengan kegiatan petani. Dikelompok tani, dengan pertemuan sekitar satu kali dalam sebulan kami diajarkan pola bertanam padi sebatang, benih yang baik digunakan, pokoknya semua hal baru yang datang dari pemerintah kami terima dan dengar disana”.

Meskipun diakui oleh petani di Sumatera Barat bahwa kebijakan pemerintah selama ini cukup berarti bagi mereka, namun belum dirasakan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan taraf hidup mereka. Petani di Sumatera Barat beranggapan implementasi kebijakan pemerintah belum didukung oleh *good will* pemerintah dalam memfasilitasi sejumlah masalah yang dihadapi oleh petani. Akibatnya, petani di Sumatera Barat berusaha bersikap

rasional dalam mengelola sawah-sawah mereka sebagai bentuk respons petani terhadap kebijakan pemerintah. Beberapa bentuk sikap rasional petani di Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Pertama, sikap rasionalitas petani di Sumatera Barat dalam merespon kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik alam. Karakteristik alam di Sumatera Barat terdiri dari daerah perbukitan dengan dataran tinggi dan rendah, Letak sawah berada di dataran tinggi dan dataran rendah sehingga berpengaruh pada jenis padi yang ditanam. Sedangkan pola sawah di Sumatera Barat dapat dikelompokkan, yaitu sawah berbandar langit, sawah berbandar hidup. Sawah berbandar hidup secara rutin memperoleh pasokan dari sungai dan merata di Sumatera Barat, kecuali di Padang, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pasaman. Sedangkan sawah berbandar langit selalu menggantungkan pasokan air dari air hujan. Karakteristik daerah dan pola sawah seperti ini ternyata sangat mempengaruhi jenis tanaman yang akan di tanam.

Di Nagari Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman, Pola sawah di daerah ini merupakan tadah hujan, oleh karena itu sawah-sawah di daerah ini sangat bergantung pada pengelolaan *tali banda*. Program irigasi merupakan kebijakan yang sangat sangat diharapkan oleh masyarakat petani untuk dijadikan prioritas di daerah ini. Tidak adanya sumber air tetap di daerah ini berpengaruh besar terhadap perkembangan kemampuan petani secara ekonomi. Karena bertani merupakan profesi yang dominan ditekuni oleh masyarakat. Jika tersedia sumber pengairan yang tetap, petani sangat optimis hal tersebut dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan hasil panen dan perbaikan nasib petani. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang petani:

“Permasalahan kami petani disini adalah air, untuk kebutuhan air disini istilahnya kami bergantung dari “**banda langit**” (air hujan). Kadang-kadang benih kami sudah berusia 40 hari atau sudah lewat masa tanam, tapi hujan tidak juga turun. Sawah kering tentu tidak bisa digarap.

Masalah yang sama juga demukakan oleh petani lainnya di Nagari Pauh Kamba, “Selama ini memang sudah banyak program pemerintah untuk pertanian yang paling jadi permasalahan kami disini adalah Air. Sawah disini adalah tadah hujan, jadi satu-satunya sumber air disini adalah air hujan, hal ini sangat

menyulitkan kami". Petani yang lainnya mengatakan, " Kalau ada air yang cukup disini mungkin akan bagus hasil padi kami. Kadang saat-saat padi mulai naik (masa pertumbuhan) ternyata musim kering tiba, kami tidak bisa berbuat apa-apa".

Begitu juga di Nagari Cupak Kabupaten Solok, petani petani di nagari ini beranggapan bahwa kebijakan PTS di daerah ini dianggap tidak sesuai dengan karakteristik lahan di daerahnya dan benih PTS tersebut belum mampu memberikan manfaat ekonomis yang lebih baik bagi petani, mengingat berbagai kriteria yang rumit dan biaya pengelolaan yang tinggi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang anggota kelompok tani,

"Dari segi penggunaan benih kita memang diuntungkan dari bibit PTS ini". "Tapi hanya disitu saja keuntungannya. Perbandingannya adalah kalau untuk jenis padi biasa untuk benih kita perlu menggunakan sekitar 7 sukek (= 4 liter) benih sedangkan kalau untuk PTS cukup satu Cupak saja. Kan memang sangat hemat. Tapi untuk biaya pengelolanya sangat besar dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Untuk satu petak sawah saja membutuhkan 6 orang untuk bertanam dibandingkan untuk benih biasa kita bisa mengerjakannya hanya dengan dua orang. Apalagi untuk menyiangi padi butuh lebih banyak lagi. Orang-orang tersebut kan diupah. Satu hari kerja RP. 30.000. Sedangkan hasil panennya dibandingkan dengan padi jenis biasa hampir sarna saja dan harga nya lebih rendah".

Selain itu, jika dibandingkan dengan daerah lain, daerah ini memiliki tempat tersendiri dalam bidang pertanian bagi masyarakat di Sumatera Barat. Salah satu produk unggulannya dikenal dengan *bareh Solok* (beras solok) memiliki rasa yang khas, harum dan gurih. Selama ini, petani di Solok mendapatkan kemudahan dalam dan manfaat yang besar dari produk unggulan ini, Selainnya proses menanamnya mudah dan sudah dilakukan sejak lama, *bareh solok* ini harganya di pasar stabil jika dibandingkan dengan harga komoditas lainnya. Oleh karena itu, petani beranggapan kualitas beras yang dimiliki selama ini lebih bagus dari jenis PTS. Seperti yang diungkapkan salah seorang petani lainnya di Nagari Cupak, " berdasarkan pengalaman kami, kualitas beras yang dihasilkan kurang bagus, tidak seperti *bareh solok* yang sudah menjadi komoditi unggulan Nagari Cupak. Nasi dari jenis PTS ini gampang ber-air dan sulit menakar air agar nasi matang dengan sempurna".

Kecenderung petani dalam menyikapi masalah tersebut adalah, banyak diantara petani yang kemudian memutuskan tidak bergabung dalam kelompok tani, dan kembali mengolah sawah sendiri sebagaimana yang pernah dilakukan dalam tradisi yang lama. Bagi petani, bibit PTS dianggap tidak lebih bagus kualitasnya dari bibit lokal yang selama ini digunakan, seperti Benih *anak daro*, *sokan*, dan *ceredek*. Salah seorang petani di nagari Cupak mengungkapkan;

“Akhir-akhir ini karena macam-macam bibit yang di suruh tanam oleh petani cacat kualitas pertanian kita. Lama-lama hal ini bisa merusak nama ‘bareh solok’. Selama ini bareh solok terkenal dengan kualitas nya. Karena selama ini yang di pakai adalah benih asli dari bareh solok. Benih anak daro, sokan, ceredek. Karena itu yang selama ini sesuai dengan tanah disini. Sekarang bermacam-macam benih yang diberikan. Tidak di teliti dulu apakah itu cocok untuk lahan-lahan petani”.

Kecenderungan di atas mengindikasikan bahwa respon petani adalah menerima dan mendukung kebijakan pemerintah. Rasionalitas petani ini tercermin dengan sikap petani yang membuka diri terhadap program pemerintah walaupun terjadi perubahan orientasi dari petani subsisten ke petani individual yang lebih banyak disandarkan kepada orientasi ekonomi sebagai sebuah kebutuhan utama. Ini juga tidak berarti petani tidak menyadari konsekuensi yang ditimbulkan oleh sikap menerima perubahan tersebut. Banyak diantara petani yang beranggapan kebijakan pemerintah belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan petani, dan masih spasial karena hanya diprioritaskan bagi petani yang termasuk ke dalam kelompok tani saja. Kasus yang ditemukan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Solok mengindikasikan kondisi seperti itu.

Kecenderungan lain dari sikap rasional petani terhadap masalah ini adalah menolak kebijakan pemerintah, karena beranggapan pemerintah belum mengakomodasi Kebutuhan petani dan karakteristik daerahnya. Dan ini merata sebenarnya di seluruh daerah Sumatera Barat. Tetapi, respon petani di Kabupaten Solok sangat realistis menggambarkan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Antusiasme petani terhadap komoditas lokal dengan kualitas yang bagus kelihatan telah menjadi identitas dan bernilai *prestise* bagi petani. Oleh

karena itu, ancaman terhadap *prestise* ini, diekspresikan petani dalam bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Kedua, subsidi pupuk. Umumnya program PTS sangat mengandalkan pupuk, akan tetapi jumlah pasokan pupuk tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Bahkan teridentifikasi adanya praktik *pencaloan* pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pihak distributor dengan perusahaan perkebunan yang mampu membeli pupuk dengan harga yang tinggi. Akibatnya petani tidak mampu membeli pupuk. Temuan ini juga mengindikasikan distribusi pupuk juga tidak merata dikalangan petani yang tergabung dalam kelompok tani, disamping prosedur yang sulit juga ada kecurigaan dari kelompok tani terhadap ketua kelompok tani bekerjasama dengan distributor dalam merekayasa harga pupuk.

Kebijakan pupuk bersubsidi pada dasarnya cukup bermanfaat dirasakan oleh petani, namun karena prosedur dan berbagai manipulasi terjadi dalam pengelolaan dan penyalurannya kebijakan ini belum bisa memberikan pengaruh yang nyata bagi kehidupan petani. Bahkan seringkali terjadi kelangkaan pupuk dapat mengancam hasil panen petani, bahkan kemungkinan terjadi gagal panen. Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Nagari Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman ;

“Bantuan pupuk bersubsidi tidak banyak membantu. Untuk memperoleh pupuk bersubsidi ini, petani melalui kelompok disuruh membuat proposal untuk mengajukan kebutuhan. Pupuk tersebut disalurkan melalui tingkat distributor dan pengencer, baru ke kelompok tani. Proses yang panjang ini selalu menjadi masalah. Pupuk yang diturunkan selalu tidak memenuhi kebutuhan. Misal kebutuhan kami 10 ton. Distributor selalu mengaku bahwa PT. Pusri hanya menurunkan 50% dan paling banyak 60%. Pernah pada suatu pertemuan pusri mengatakan selalu memberi sesuai kebutuhan. Jika pemerintah ingin membenahi kerja distributor ini kan sebenarnya bisa dilacak. Bahkan ada distributor yang menjual pupuk ke daerah lain seperti Pasaman yang sanggup membayar harga lebih tinggi. Artinya, pupuk bersubsidi tetap belum bisa menjamin kestabilan harga dan belum menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bagi petani.

Kondisi seperti di atas mengakibatkan posisi petani di daerah ini semakin sulit. Di satu sisi petani mengalami tekanan untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan disisi lain petani harus membeli pupuk meskipun harganya tidak terjangkau. Namun demikian, petani tetap membuat pilihan untuk membeli pupuk bersubsidi dengan harga yang mahal dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang petani di Nagari Pauh Kamba,

“Pernah kami membeli pupuk Rp.180.000/karung. Itu kan sebenarnya sudah diluar kemampuan petani”. “Adapun program pupuk bersubsidi memang sudah berjalan sekitar 3 tahun terakhir, tapi belum banyak membantu. Jatah yang diberikan selalu belum mencukupi kebutuhan. Mungkin karena banyak banyak permaianan didalamnya yang tidak kita mengerti. Buktinya meskipun karungnya bermerek pupuk bersubsidi kami tetap beli dengan harga tinggi sampai Rp.90.000/karung”.

Di Nagari Cupak Kabupaten Solok, kelangkaan pupuk bersubsidi juga menjadi masalah utama bagi petani. Petani di daerah ini menyadari bahwa pemberian pupuk bersubsidi merupakan program yang di oerintasikan untuk memberikan kemudahan bagi petani memperoleh pupuk dengan harga yang bisa dijangkau oleh petani. Namun dalam praktiknya petani mengakui sering dijadikan objek bisnis dan *bodoh-bodohan* oleh distributor ataupun pengecer pupuk. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang petani;

“Sering terjadi pupuk bersubsidi yang datang kewilayah mereka setelah sampai didistributor di *droop* ke pihak-pihak yang mau membayar dengan harga lebih mahal seperti perkebunan sawit. Kondisi ini hampir terjadi di setiap daerah. Kasus ini hampir dapat dikatakan sebagai rahasia umum namun belum ada solusi yang berarti untuk mengatasi kesulitan memperoleh pupuk serta *kong-kalngkong* yang menjadi penyebabnya”.

Petani lainnya di Nagari Cupak mengatakan “PTS ini sangat banyak butuh pupuk, sementara pupuk adalah barang yang sangat susah kita peroleh”, “kadang sudah hampir berbuah padi, pupuk belum juga datang”, PTS ini seminggu sudah ditanam sudah harus di pupuk. Selama ini kan kami petani ini selalu teraniaya karena pupuk sulit didapat”. Kelangkaan pupuk bersubsidi ini juga diakui oleh petani lainnya sebagai salah satu bentuk tekanan yang berat, karena selain berkitab kepada gagal panen, hasil panenpun juga tidak bisa dipergunakan untuk memperbaiki ekonomi keluarga, bahkan hasil panen diperuntukan untuk membayar hutang saja, sebagaimana diungkapkan salah seorang petani di Nagari Cupak, “bagaimana petani bisa sejahtera, harga pupuk mahal, sudah itu sulit diperoleh sehingga hasil padi tidak bisa maksimal”, “ pernah padi kami tidak dapat pupuk sama sekali, sehingga saat panen hasil panen kami habis untuk membayar

hutang saja”, untuk makan dan bertanam berikutnya, buat lagi hutang baru selalu seperti itu”.

Di Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasaman, petani mengakui juga mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Jikapun ada petani merasakan pupuk tersebut tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan petani. Petani di daerah ini menyadari bahwa untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus menjadi anggota dalam suatu kelompok, melalui kelompok tersebutlah kemudian pemerintah menyalurkan pupuk bersubsidi. Namun demikian, setelah menjadi anggota kelompok tani, petani di daerah ini belum memperoleh pupuk bersubsidi sebagaimana yang dianjurkan pemerintah. Merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, beberapa orang petani memutuskan untuk keluar dari kelompok tani dan bersuaha dengan inisiatif sendiri untuk mengelola sawahnya. Sebagaimana diungkapkan salah seorang petani di Nagari Aia Manggih:

“Permasalahan lain yaitu ketersediaan pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani untuk mengolah sawahnya. Saya dulunya aktif dalam kelompok tani, karena kata orang-orang dengan masuk kelompok tani kita bisa dapat pupuk bersubsidi. Tapi setelah kami terlibat di dalamnya, ternyata pupuk tersebut lambat sampainya kepada kami. Akhirnya kami memutuskan untuk secara mandiri menyelesaikan masalah pertanian ini, karena tidak ada lagi pihak yang dapat diharapkan”.

Di Nagari Minagkabau, Kabupaten Tanah Datar ketersediaan pupuk bersubsidi juga tidak memadai, meskipun petani di daerah ini sudah memesan ke pihak distributor jauh hari sebelumnya melalui kelompok tani. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang petani;

“..Saat kita memerlukan pupuk, pergi ke kios, persediaan pupuk tersebut tidak ada, padahal pupuk tersebut telah jauh-jauh hari dipesan melalui kelompok tani, masalah yang seperti ini sering terjadi. Keadaan ini hanya bisa kita terima, hingga menunggu sampai pupuk itu datang. Tentunya kondisi ini merugikan kami, sehingga akhirnya panen padi tidak memuaskan hasilnya”.

Ekspektasi petani di Sumatera Barat mendapatkan kemudahan dalam meningkatkan hasil sawah melalui pupuk bersubsidi sangat besar kepada pemerintah. Oleh karena itu, di lapangan pemerintah tidak banyak memperoleh hambatan berarti dalam menerapkan kebijakan ini. Akan tetapi, seperti yang disadari oleh petani bahwa penerapan kebijakan ini tidak diikuti oleh *goodwill* pemerintah untuk menuntaskan masalah yang dihadapi petani secara kongkrit. Fenomena ini tercermin dari rendahnya tingkat akseptabilitas dan pengawasan

pemerintah dalam memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi sebagaimana yang dibutuhkan petani. Rendahnya ketersediaan pupuk dan harga pupuk diluar kemampuan petani untuk membeli, tidak memberikan kesempatan kepada petani untuk menentukan alternatif terbaik dalam mencukupi ekonomi keluarga. Kondisi seperti inilah yang kemudian mendesak petani di Sumatera Barat untuk bersikap rasional dalam membuat keputusan.

Dalam kerangka peningkatan taraf hidup petani, tentunya bukanlah merupakan keputusan yang mudah bagi petani untuk memilih alternatif tertentu dalam mengatasi persoalan yang di hadapi. Akan tetapi, sebagian besar petani di Sumatera Barat telah memilih untuk menentukan cara terbaik mengatasi masalahnya sendiri di luar kerangka kebijakan pemerintah. Pengolahan sawah dilakukan dengan cara sendiri secara konvensional seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, sebelum adanya intervensi pemerintah. Seperti inilah rasionalitas yang diperlihatkan oleh petani di Sumatera Barat.

Ketiga, artikulasi nilai-nilai ke-Minangkabau-an pada dasarnya telah memposisikan proses pengelolaan sawah sebagai tanggungjawab bersama dan melekat dalam kehidupan petani di Sumatera Barat. Dengan artikulasi seperti itu petani subsisten lebih mudah mengatasi permasalahan yang dihadapinya, karena masalah sawah tidak menjadi tanggungjawab petani secara individu. Setidaknya ini juga yang menjadi espektasi petani ketika kebijakan pemerintah benar-benar menjadi alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tersebut dimaknai sebagai artikulasi petani subsisten dalam pengelolaan sawah. Konsekuensi kebijakan dalam hal ini tidak hanya menjadi tanggungjawab petani tetapi merupakan interaksi berkelanjutan dari pemerintah dengan memfasilitasi petani menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, apapun kebijakan terhadap petani di Sumatera Barat haruslah dimaknai sebagai upaya mengkerangkai nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam memperbaiki taraf hidup petani.

Dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat orang Minang kabau, nilai-nilai ke-minangkabau-an dalam struktur masyarakatnya dikenal adanya pemangku adat (niniak mamak) sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Pemangku adat mempunyai antusiasme tinggi dalam proses



pengolahan maupun pembukaan sawah baru, sehingga tidak ada sawah-sawah yang terlantar. Dalam konteks demikian, petani menempatkan diri sebagai bagian yang terfasilitasi dalam bentuk yang lebih kongkrit. Petani tidak saja menjadi penting dalam menempatkan antusiasme pemangku adat tersebut, tetapi juga ikut memprakarsai proses yang berlangsung secara moral, sehingga teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang membedakan tradisi petani dalam lingkup nilai-nilai ke-Minangkabau-an dengan proses yang berlangsung ketika pola hidup masyarakat mengalami perubahan dan terutama disebabkan oleh besarnya pengaruh kebijakan pemerintah terhadap petani di Sumatera Barat.

Terjadinya perubahan tradisi petani di Sumatera Barat, nampaknya berkaitan dengan kondisi ekonomi yang dihadapi oleh petani. Proses ini sebenarnya tidak benar-benar murni oleh kondisi yang dialami petani tetapi juga karena perubahan iklim dan kebijakan ekonomi pemerintah. Kondisi alam yang berubah (baca iklim) menyebabkan pola bertanam petani mengalami perubahan yang drastis bahkan seringkali terancam gagal panen, itu artinya juga akan mempengaruhi ekonomi petani subsisten. Sementara itu, program ekonomi pemerintah memberikan alternatif baru bagi petani untuk bersikap lebih rasional. Pergumulan dengan masalah ini, petani di Sumatera Barat perlahan-lahan mulai mengkomodifikasi kebijakan pemerintah dengan segala konsekuensinya. Dan sekaligus menjadi awal kecenderungan peralihan perhatian dan ekspektasi petani terhadap pemerintah.

Pertama, adalah mulai bergesernya makna tradisi *balambe hari* dimana mulai berkurangnya antusiasme pemangku adat dalam pengolahan dan pembukaan sawah baru. Petani di Sumatera Barat mengakui dewasa ini pemangku adat dalam banyak hal tidak memiliki peranan yang kuat dalam memprakarsai masalah-masalah yang dialami oleh petani. Sebagaimana diungkapkan oleh Petani di Nagari Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan, “Niniak mamak, tidak ada urusannya dengan kegiatan pertanian ke sawah, yang ada hanya untuk urusan perkawinan atau untuk *baretong*”.

Namun demikian, petani di Sumatera Barat mengakui bahwa simbol-simbol yang sering digunakan pemangku adat untuk melakukan pertemuan-pertemuan sebelum turun ke sawah sampai saat ini masih dipergunakan.

Misalnya, sampai saat ini masih dilakukan pertemuan antar sesama petani sebelum turun ke sawah dengan memanfaatkan media tradisional, seperti masjid/mushalla. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang petani di Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasaman; “ Pemerintah menginformasikan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan program program tertentu, diumumkan dimesjid, kemudian petani dikumpulkan, dan disanalah disosialisasikan cara bertanam dengan pola tanam sebatang tersebut. Program lain seperti pupuk bersubsidi juga seperti itu, melalui kemopok tani petani baru dapat mengaksesnya”.

Begitu juga yang dialami petani di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar, bahwa program atau kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah tersebut, disosialisasikan melalui berbagai media di nagari minangkabau. Seperti memanfaatkan sarana di mesjid untuk menginformasikan ke masyarakat luas, berkumpul di mesjid dan mengefektifkan keberadaan kelompok tani. Seperti yang telah disampaikan salah seorang petani; ” Periode satu kali dalam lima belas hari, di mesjid diumumkan bahwa anggota kelompok tani berkumpul dan rapat untuk membahas masalah-masalah pertanian. Melalui perkumpulan itulah informasi terkait kegiatan pertanian disampaikan”. Petani lainnya juga mengungkapkan, ” jika ada program baru, kami berkumpul bersama-sama, di dangau atau di mesjid. Orang kantor (PPL) tersebut datang dan menginformasikan program tersebut kepada kami. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, pada program pati tanam sebatang, mereka mengajarkan langsung kepada kami. Sehingga kami mengerti model seperti itu. Setelah itu mereka meninjau sesekali pekerjaan kami, bagus atau tidak”.

Kedua, petani menyadari bahwa alternatif untuk menerima kebijakan pemerintah akan berdampak kepada bentuk pengolahan sawah dari ekonomi subsisten (ekonomi keluarga) menjadi petani yang menerima berada dalam pengaturan yang mengatur hubungan diantara petani oleh penguasa (pemerintah) yang tidak dimiliki oleh petani di Sumatera Barat. Pengharus-utamaan petani untuk masuk dalam kelompok petani merupakan bentuk penguasaan baru atas petani dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Akibatnya pemaknaan sawah sebagai bagian dari kehidupan bersama dan dikelola bersama

telah mengalami proses rekonstruksi dan bernilai ekonomi dalam kehidupan petani di Sumatera Barat. Petani mengakui pengelolaan sawah dilakukan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan untuk membeli dan menanam benih. Turun ke sawah dilakukan secara sendiri. Menurut petani di Nagari Minangkabau berkurangnya pelaksanaan tradisi petani Minangkabau disebabkan karena:

"Sekarang, banyak yang memikirkan soal biaya dalam rangka mengadakan acara-acara adat tersebut. Misalnya dahulu kalau hendak turun ke sawah, diadakan makan bersama dengan orang sumandan, dan membawa nasi ke sawah. Sekarang tidak ada lagi yang seperti itu, turun ke sawah secara sendiri-sendiri. Kalau sawahnya telah mantap untuk digarap, baru dilakukan kegiatan penanaman. Bahkan sekarang ada juga yang diupahkan, mulai dari membajak hingga masa panen tiba, yang punya lahan tinggal menerima hasilnya saja".

Ketiga, pengelolaan sawah yang dilakukan secara gotong royong juga sudah mengalami perubahan drastis. Petani subsisten mengakui, makna gotong royong dalam pengelolaan sawah dewasa ini lebih bersifat individual dan lebih sering dimaknai secara ekonomi. Banyak aktivitas gotong royong yang dilaksanakan dilaksanakan dengan sistem upah. Sebagaimana diungkapkan salah seorang petani di nagari Pauh Kamba Kabupaten Padang pariaman:

"Gotong royong itu lebih menguntungkan. Tapi kan hal itu sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau gotong royong kan kita tidak membayar apa-apa, hanya tenaga kita saja yang keluar. Sekarang kalau menggarap sawah kadang kami berhutang ke tukang mesin "manjaja" (mesin bajak/traktor), tukang mesin "mairiak" (mesin pemisah padi dari batangnya). Kalau dulu setelah panen, padi bisa dibawa pulang. Tapi sekarang saat panen, setelah mairiak, padi bisa habis disawah saja untuk membayar hutang-hutang padang tukang mesin".

Di Nagari Cupak Kabupaten Solok, substansi gotong royong dalam tradisi turun ke sawah dalam konteks ke-Minangkabau-an juga sudah mulai ditinggalkan meskipun diakui oleh sebagian petani masih dilakukan tetapi dalam konteks yang berbeda. Gotongroyong sekarang dimaknai sebagai aktivitas yang bernilai ekonomi, oleh karenanya gotong-royong dilaksanakan dengan sistem upah. Sedangkan dalam tradisinya dahulu lebih bersifat tanggungjawab moral dan berorientasi kepada ekonomi keluarga (subsisten). Konsekuensi dari perubahan ini tercermin dalam sikap petani ketika akan turun ke sawah, seperti mengupahkan pekerjaan sawahnya kepada orang lain. Dalam konteks seperti ini, turun ke sawah ditentukan oleh kemampuan ekonomi (baca modal) petani mengolah sawah, sedangkan bagi petani yang belum memiliki modal belum bisa turun ke sawah,

jadi tidak heran kemudian ada ditemui sawah-sawah yang terlantarkan. Menurut salah seorang petani di Nagari Cupak,

“ Banyak diantara masyarakat petani yang tidak lagi menganggap turun kesawah bersama-sama itu penting, dengan kalkulasi ekonomis mereka jadikan pertimbangan mendorong mereka menyimpulkan bahwa mengerjakan sawah secara ber-kongsi (bersama) tadi tidak lagi menguntungkan dan membuang lebih banyak waktu dan tenaga karena mesin dapat membuatnya lebih efektif dan cepat. Petani lainnya juga mengungkapkan, “Kalau dahulu petani disini turun ke sawah bersama (serentak), tetapi sekarang susah untuk diserantakkan karena siapa yang dekat dengan aliran air bisa turun lebih dulu untuk menggarap sawahnya sehingga ada yang bisa menggarap sampai tiga kali musim tanam”.

Di Kabupaten Padang Pariaman, gotong royong dalam tradisi bertani juga sudah mulai berkurang, faktor yang ikut mempengaruhinya adalah mulai munculnya sikap individual masyarakat, masyarakat petani mulai memiliki kesibukan lain diluar bertani yang membuat mereka kekurangan waktu untuk turun kesawah secara langsung, ada juga yang sebabkan oleh semakin sedikit anggota keluarga dan masyarakat petani yang menetap di kampung halamannya (pergi merantau) sehingga orang-orang yang turut serta bergotong royong menjadi berkurang. Disamping penyebab-penyebab yang berasal dari dinamika atau perubahan sosial masyarakat petani tersebut, kebijakan dan program pemerintah serta berbagai teknologi modern dalam bidang pertanian ikut menggeser eksistensi nilai kegotongroyongan tersebut. Upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan produktifitas pertanian dengan program pemberian bantuan peralatan modern seperti mesin-mesin (teknologi pertanian) kepada masyarakat tradisonal untuk menggarap sawah. (wawancara dengan salah seorang petani di Nagari Pauh Kamba, Kabupaten Padang Pariaman).

Ke-empat, Nilai-nilai spritual yang diyakini dalam kehidupan bertani di Sumatera Barat seperti ritual-ritual adat turun kesawah, ritual *ratik tulak bala* dan ritual masa penen (*manyabik*) dimasa lampau juga sudah mulai banyak ditinggalkan. Namun demikian, tradisi ini masih ada diselenggarakan oleh petani dalam mengolah sawahnya. Berkurangnya intensitas tradisi disebabkan oleh perubahan pola pikir petani terutama diterimanya kebijakan pemerintah dalam mengolah sawah.

Kebijakan pemerintah dalam pengolahan sawah, seperti pengendalian hama dengan teknologi pertanian dan racun-racun hama yang memperlihatkan dampak instan dalam mengatasi masalah pertanian sangat diterima petani di Sumatera Barat. Banyak petani yang mengakui kebijakan pemerintah cukup membantu upaya-upaya petani mengatasi hama tanaman. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan pemerintah masih belum optimal dalam mengatasi hama tanaman. Pola sawah dan jenis hama yang dihadapi seringkali menyulitkan petani dalam menerapkan kebijakan pemerintah. Misalnya, Program TPS sangat rentan terhadap hama tikus, siput atau keong emas dan sebagainya. Sementara itu, upaya-upaya pemerintah menagani masalah ini belum optimal seperti petani melakukan tradisi *tulak bala*. Sebagaimana diungkapkan oleh petani.

“Dari yang kami perhatikan, hama tikus itu kalau diburu akan menjadi lebih mengganas wabahnya. Dengan tradisi kami, hama-hama itu kami yakini dapat dihindari dengan tradisi *ratik tulak bala*. Hal ini kami yakini dan rasakan manfaatnya bagi keselamatan padi kami”.

Perubahan tradisi Minangkabau dalam bertani juga dirasakan oleh petani di Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasaman. Saat ini tradisi *tulak bala* intensitasnya sudah berkurang, dan masih ada petani yang melaksanakannya. Hal ini disebabkan karena adanya racun tanaman dan berubahnya pola pikir petani.

“Sebelum turun ke sawah dahulunya kami percaya dengan mengadakan kegiatan *tolak bala*. Tapi sekarang tradisi itu tidak lagi dilakukan orang karena sudah ada obat racun yang mampu mengatasi masalah-masalah pertanian. Keadaan telah modern. Cara-cara tradisional telah mulai ditinggalkan, meskipun tidak semuanya. Seperti, membersihkan *banda* dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak lagi gotong royong. Himbauan turun ke sawah hanya sebatas kepada orang-orang atau petani yang lokasi lahannya berdekatan”.

Sementara itu, kecenderungan untuk melaksanakan ritual *tulak bala* dikalangan petani dapat dianggap sebagai salah satu bentuk rasionalitas petani dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Metode yang diperkenalkan pemerintah untuk memberantas hama dianggap belum membantu masalah petani secara komprehensif dan sulit untuk diterapkan. Sementara itu, pelaksanaan ritual *tulak bala* lebih mudah dan memberikan manfaat yang nyata bagi petani. Sebagaimana diungkapkan oleh Buyuang Sari;

“Dari pemerintah banyak petunjuk-petunjuk (program) yang diberikan. Tapi prosedur pelaksanaannya banyak tidak jelas bagi petani. Seperti pemberantasan hama, tidak jelas racun yang akan digunakan”. Pengentasan hama tikus oleh pemerintah dilakukan dengan “program berburu tikus”. Sementara dari yang

kami perhatikan, hama tikus itu kalau diburu akan menjadi lebih mengganas wabahnya. Dengan tradisi kami, hama-hama itu kami yakini dapat dihindari dengan tradisi “ratik tolak bala”. Hal ini kami yakini dan rasakan manfaatnya bagi keselamatan padi kami.

Pelaksanaan *tolak bala* untuk membasmi hama masih dilaksanakan karena petani beranggapan pemerintah belum melakukan pembasmian hewan pengganggu secara massif, dan masih rendahnya respon pemerintah terhadap masalah ini. Sehingga dalam menghadapi masalah ini petani melakukan sendiri melalui *tolak bala*, sebagaimana dikemukakan Erni salah seorang petani di Nagari Aia Manggih;

“Banyak hewan pengganggu di sawah kami, seperti tikus, babi dan unggas yang “menghabiskan” padi kami. Kalau dahulu ada tradisi *tolak bala* untuk menangkal adanya pengganggu tanaman, kalau sekarang hanya memasang *kauah padi*, berdoa ke mesjid dan diberinya obat. Jikapun ada penyemprotan itu dilakukan oleh petani sendiri, tidak memanfaatkan jasa PPL. Disini belum ada pembasmian hewan pengganggu yang dilakukan oleh PPL. Jadi semua kami yang mengupayakan, karena kami sendiri masih bisa mengatasi permasalahan yang ada dan muncul”

Lebih lanjut diungkap Erni;

“Masalah pertanian seperti tikus penyerang tanaman banyak di lokasi ini, tapi kami mengatasinya sendiri. PPL tidak ada datang ke lokasi kami untuk meninjau masalah pertanian. Kalau ada permasalahan pertanian, kami tidak ada mengadakan ke pihak pemerintah, karena tidak ada respon yang bersifat membantu. Pernah saya mengadakan ke pak wali. Tapi mereka hanya menyuruh kami menunggu”.

Hal yang menarik dari temuan di atas adalah disamping berhadapan dengan perubahan kondisi alam, petani di Sumatera Barat juga mengalami tekanan dari pemerintah melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan yang pelaksanaannya cenderung men-generaliskan permasalahan yang dihadapi petani di seluruh daerah Sumatera Barat. Tanam padi sebatang merupakan salah satu bentuk generalisasi pemerintah di berbagai daerah kabupaten, padahal sejak lama masing-masing daerah kabupaten tersebut memiliki karaktersitik dalam pertanian.

Namun demikian, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, petani memiliki orientasi sendiri disamping menerima dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam hal ini, orientasi petani lebih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai ke-Minangkabau-an yang pernah dimanifestasikan dalam tradisi *balambe hari*. Meskipun banyak

perubahan dan tekanan yang dialami petani dalam mengolah sawah, tradisi *balambe hari* tetap dilaksanakan meskipun suasana batin dari tradisi ini sudah jauh berbeda. Dalam kerangka demikian, maka penelitian ini menemukan bahwa sikap rasionalitas petani di Sumatera Barat terhadap kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh tradisi *balambe hari*. Oleh karena itu, dalam rangka mempermudah implementasi kebijakan pemerintah di bidang pertanian, pemerintah perlu mempertimbangkan bentuk kearifan lokal ini, sehingga mendapatkan dukungan yang luas dari petani.

Upaya untuk mendapatkan dukungan yang luas dari petani atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dapat dilihat dari beberapa kecenderungan rasionalitas petani dalam menyikapi kebijakan pemerintah, yakni;

Pertama, petani menerima dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, kebijakan tentang PTS, pupuk bersubsidi pada dasarnya mendapatkan dukungan yang luas dari petani. Karena petani merasa diuntungkan oleh kebijakan pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya juga mendapatkan dukungan dari petani, hal ini tercermin dari kesungguhan petani untuk melaksanakannya di hampir seluruh daerah di Sumatera Barat.

Kedua, petani menerima dan mendukung kebijakan pemerintah, tetapi mempertanyakan implementasi kebijakan. Secara kontekstual petani merasa diuntungkan oleh kebijakan tetapi dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi petani belum didukung oleh kebijakan yang ada. PTS dinilai menguntungkan petani tetapi dalam pelaksanaannya memiliki banyak keterbatasan, antara lain topologi sawah yang tidak sama sehingga mempengaruhi jenis dan kualitas tanaman tertentu. PTS disatu sisi sangat membutuhkan pupuk yang banyak, tetapi distribusinya tidak memadai sesuai dengan kebutuhan petani. Disisi lain banyak daerah yang topologi sawahnya berbandar langit sedangkan PTS sangat membutuhkan irigasi yang memadai. Disamping itu kualitas PTS tidak lebih bagus dari bibit lokal yang selama ini dimiliki petani, seperti bareh solok yang kualitasnya baik dan tidak pernah terpengaruh oleh pasar. Keterbatasan-keterbatasan kebijakan tersebut menyebabkan petani di Sumatera Barat memilih alternatif lain seperti melaksanakan cara-cara yang lama dalam tradisinya.

Ketiga, petani merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak menguntungkan petani sehingga petani memutuskan untuk tidak menerima dan melaksanakan kebijakan. Dalam konteks ini, banyak petani yang merasa tidak puas dengan PTS, pupuk bersubsidi yang parsial sehingga memutuskan untuk keluar dari kelompok tani, dan mengolah secara sendiri sesuai dengan tradisi dahulunya. Secara ringkas orientasi petani Sumatera Barat dapat di petakan sebagaimana terlihat pada matriks di bawah ini:

Tabel V.2: Predisposisi (kecenderungan) petani Terhadap Kebijakan Pemerintah di Sumatera Barat

<b>Kecenderungan</b>	<b>Persepsi</b>
Menerima dan melaksanakan kebijakan pemerintah	Kebijakan secara rasional menguntungkan petani
Menerima dan mempertanyakan implementasi kebijakan	Kebijakan disatu sisi dianggap menguntungkan, tetapi pada sisi lain tidak mengakomodasi nilai-nilai dan karakteristik lokal
Menolak kebijakan	Kebijakan dianggap tidak menguntungkan petani



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan temuan penelitian pada tahap I ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sawah merupakan bagian terpenting bagi masyarakat Minangkabau, dan dalam masyarakat tradisional sawah dimaknai juga sebagai sumber pokok ekonomi keluarga dan kemakmuran. Arti penting sawah tersebut selama ini dimanifestasikan ke dalam bentuk tradisi bertani dalam mengolah sawah yang dikenal dengan tradisi *balambe hari*. Tradisi ini telah melembaga dalam kehidupan petani secara turun temurun di Sumatera Barat
2. Tradisi *balambe hari* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dalam tradisi bertani subsisten di Sumatera Barat. Dengan *balambe hari* ini, petani secara fundamental menggariskan pengolahan sawah sebagai bagian dari tanggungjawab bersama, sehingga dalam prakteknya tidak ada sawah yang terlantarkan. *Balambe hari* juga menjadi sarana interaksi dan komunikasi serta wadah untuk mengaktualisasikan kebutuhan dan kepentingan antara sesama petani dalam proses pengolahan sawah. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada dalam tradisi *balambe hari* sangat menentukan bagaimana respons politik petani di Sumatera barat terhadap kebijakan pemerintah.
3. Petani di Sumatera Barat dalam mengolah sawah juga sudah mengalami proses modernisasi yang disebabkan oleh perubahan kondisi alam, kebijakan pemerintah dan pola pikir petani dalam mengolah sawah mereka. Diantara proses modernisasi tersebut, kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani memiliki peranan yang besar dan mendasar memberikan pengaruh bagi petani. Determinasi pemerintah menyebabkan tradisi *balambe hari* perlahan-lahan ditinggalkan oleh petani.

Namun demikian, kebijakan pemerintah tersebut tidak benar-benar dapat mendeterminasi pola pikir petani dalam mengolah sawah. Kenderungan ini terlihat ketika petani secara rasional menempuh berbagai alternatif untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi dan kembali melaksanakan tradisi *balambe hari* meskipun suasana bantinya sudah mengalami pergeseran nilai.

## B. Saran

1. Dikarenakan *balambe hari* merupakan sebuah bentuk kearifan lokal, maka sudah semestinya tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam membuat kebijakan tertentu. Pemerintah sebaiknya mengakomodasi nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam tradisi *balambe hari* yang selama ini dinilai sangat bermanfaat bagi petani di Sumatera Barat dalam mengelola sawah. Dengan demikian, dukungan petani terhadap implementasi kebijakan pemerintah di bidang pertanian akan semakin luas dan lebih baik.
2. Sebaliknya, pemerintah dapat memformulasikan kebijakan tertentu agar kebijakan pemerintah di bidang pertanian mudah diimplementasikan, misalnya memperhatikan karakteristik alam dan tipologi sawah yang ada di Sumatera Barat, sebaiknya pemerintah memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada petani untuk menentukan sendiri jenis bibit dan memilih cara produksi sendiri, menjamin ketersediaan air dan kesuburan tanah, melakukan pengawasan yang ketat terhadap harga dan distribusi pupuk bersubsidi karena kebijakan pemerintah selama ini membuat petani sangat tergantung kepada pupuk bersubsidi.
3. Dukungan terhadap pelaksanaan tradisi *balambe hari* dan adanya formulasi kebijakan tertentu akan mempermudah dalam memetakan model respons politik petani terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat. Untuk itu, pemetaan model ini akan dilakukan pada penelitian tahap II.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel & Verba, Sydney. 1963. *The civic culture: political attitude and democracy in five nation*. Princeton University Press.
- Anderson, Benedict R.O.G. 1972. The idea of power in Javanese culture. Dalam. Claire Holt, *Culture and politics in Indonesia*. Ithaca, N.Y: Cornell University Press.
- Campbell, Angus. et al. 1960. *The American voter*. Chicago: Row, Peterson & Co.
- Denver, David. 1989. *Election and voting behavior in Britain*. London: Philip Allen Pub.
- Fiorina, Moris. 1981. *Retrospective voting in American national elections*. New Haven: Yale University Press.
- Gaffar, Afan. 1999, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 1992. *Javanese Voters: A case study of election under a hegemonic party system*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Geertz, Clifford. 1965. *The Social history of an Indonesia town*. Cambridge, Massachusetts Institute of Technology.
- . 1974. *Agricultural involution: the process of ecological change in Indonesia*. Barkeley: University of California Press
- Greenstein, Fred I. 1975. Personality and politics". Dalam Fred I. Greenstein & Nelson W. Polsby. *Handbook of political science: micropolitical theory*. Vol.2 US: Addison-Wesley Publishing company.
- Huntington, Samuel P. 1975. Political Developmpment. Dalam Fred I. Greenstein & Nelson W Polsby (eds), 1975. *Handbook of Political Science: Macropolitical theory*. Vol. 3. US: Addison-Wesley Publishing company.
- Idrus, HakimY Dt. Rajo Penghulu. 1994. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Kartodirjo, Sartono. 1973. *Protest movement in rural Java*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Kristiadi, J. 1994. Pemilihan umum dan perilaku memilih: suatu studi kasus tentang perilaku memilih di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada pemilihan umum 1971-1987. Disertasi, Universitas Gadjah Mada.
- Kuntowijoyo, 1985. *Social change in an agrarian society: Madura, 1850-1940*. Disertasi, Columbia University
- . 2002. Radikalisasi Petani. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Lev, Daniel S. & Lyon, Margo L. 1970. *Bases of conflicts in rural Java*. Barkeley, University of California Press

- Mondak, Jeffrey J. 1995. Competence, integrity, and the electoral success of congressional incumbent. *The Journal of Politics* 57(4).
- Morgan, Clifford T. 1986. *Introduction to psychology*. Cet.Ke-7. New York: McGraw-Hill Book. Co
- Nachmias, David and Chava Nachmias, (1987), *Research Methods in the Social Sciences (Third Edition)*, St. Martin's Press, New York.
- Niemi, Richard G. & Weisberg, Herbert F. 1984. *Controversies in voting behavior*. Wahington DC: Congression Quarterly.
- Palmer, Leslie H. 1969. *Social status and Power in Java*. London: The Anthlone Press.
- Pomper, Gerald. 1978. *Voters choice: varieties of American electoral behavior*. New York: Dodd Mead Company.
- Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E. 1996. Participation in local politics in Norway: some do, some don't, some will, some won't". *Political Behavior*. New York: Plenum Publishing Corp.
- Scott, James C. 1981. *Moral ekonomi petani*. (terj). Jakarta: LP3ES
- , 1993. *Perlawanan kaum tani*. (terj). Jakarta: YOI
- , 2000. *Senjatanya orang-orang kalah: bentuk perlawanan sehari-hari kaum tani di Asia Tenggara*. (terj). Jakarta: YOI
- Sherman, Arnold K & Kolker, Aliza. 1987. *The social bases of politics*. California: A Division of Wodsworth Inc.
- Steffensmeiers, Janet M. & Smith, Renee M. 1996. The dynamics of aggregate partisanship. Dalam *American Political Science Review*. tp.
- Wertheim, W.F. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam transisi: studi perubahan sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana

# LAMPIRAN

# I INSTRUMENT PENELITIAN



# INDEPT INTERVIEW

**PEMETAAN ORIENTASI POLITIK DAN RESPONS POLITIK PETANI SUBSISTEN  
TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI SUMATERA BARAT**

**A. Orientasi terhadap Kebijakan**

1. Bagaimanakah keyakinan Bapak/Ibu/Sdr terhadap masalah pertanian dalam lingkup adat dan tradisi ke-Minangkabau-an ?
2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, bagaimanakah menyelesaikan masalah pertanian sesuai dengan adat dan tradisi Keminangkabauan ?
3. Menurut Bapak/Ibu/ Sdr, Apakah setelah melibatkan lembaga adat dan pemerintah (propinsi, kabupaten/kota, nagari) membicarakan masalah pertanian ditindaklanjuti dengan pembuatan program (kebijakan) tertentu ?

Apakah program (kebijakan) yg dibuat pemerintah dibidang pertanian tersebut telah sesuai dengan adat dan tradisi (nilai keminangkabauan) masyarakat?

Kalau Iya, apakah program (kebijakan) tersebut sesuai dengan harapan Bapak/Ibu/Sdr untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi?

Menurut Bapak/Ibu/Sdr pernahkah pemerintah (propinsi,kabupaten/kota dan, nagari) memberitahu tentang adanya program (kebijakan) yg harus Bapak/Ibu/Sdr laksanakan sebagai petani?

7. Kalau IYA, apakah program (kebijakan) tersebut sesuai dengan kebutuhan Bapak/Ibu/Sdr sebagai petani?

Apakah Bapak/Ibu/Sdr pernah dilibatkan baik ditingkat kabupaten dan nagari dalam pembuatan keputusan di bidang pertanian (msl: harga hasil panen, pola tanam, system pengairan dst) dengan posisi bapak sebagai petani?



**PEMETAAN ORIENTASI POLITIK DAN RESPONS POLITIK PETANI SUBSISTEN  
TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI SUMATERA BARAT**

**B. Respons terhadap kebijakan:**

1. Bagaimana sikap, jika ada program (kebijakan) pememerintah (propinsi,kabupaten/kota dan nagari) yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak/Ibu/Sdr ?
2. Bagaimana cara bapak/ibu/srd menyampaikan aspirasi di bidang pertanian terkait dengan program (kebijakan) pemerintah (propinsi,kabupaten/kota, nagari) yang tidak sesuai dengan adat dan tradisi yang bapak amalkan?
3. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, adakah keterlibatan lembaga adat (KAN, TTS) dalam memberikan pertimbangan kepada petani untuk mendukung pelaksanaan program (kebijakan) pemerintah (propinsi, kabuapten/kota, nagari)?
4. Jika ada program (kebijakan) pemerintah (propinsi, kabupaten/kota, nagari) yang bersifat bantuan (pupuk, bibit dst), Bagaimana bapak menyikapi program (kebijakan) tersebut ?
5. Bagaimana cara pemerintah (kabupaten, nagari) menyalurkan bantuan tersebut kepada petani? Apakah berdasarkan kriteria tertentu atau berdasarkan kedekatan petani tersebut dengan aparaturn pemerintah?
6. Menurut bapak bagaimana peranan fasilitator nagari (PNPM) dibidang pertanian mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat (nilai ke-Minangkabau-an) ?

# MODUL / PEDOMAN FGD

Pemetaan Orientasi Politik dan Respons Politik Petani Subsisten Terhadap Kebijakan Publik Di Provinsi Sumatera Barat

TAHAPAN KEGIATAN FGD

NO	Kegiatan	Waktu	Alat/bahan yang dibutuhkan
1	Perkenalan, fasilitator mengucapkan salam, memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan FGD kepada peserta	1 X 5 menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kertas,</li> <li>2. Spidol</li> <li>3. Double tip</li> <li>4. Alat perekam</li> </ol>
2	Brainstorming dengan menggali beberapa pertanyaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bertani dalam tradisi alam Minangkabau ?</li> <li>2. Apakah kebijakan (program) pemerintah sekarang tentang pertanian telah sesuai dengan tradisi adat minangkabau ?                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Iya</li> <li>b. TIDAK</li> </ol> </li> </ol>	2 X 10 menit	
	Respons Terhadap Kebijakan Publik <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sikap, jika ada program (kebijakan) pememerintah (propinsi, kabupaten/kota dan nagari) yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak/Ibu/Sdr ?  <b>Probing</b>                              Kalau TIDAK sesuai, apa yang Bapak/Ibu/Sdr lakukan berkaitan dengan ketidak setujuan terhadap program (kebijakan) tersebut?</li> <li>2. Bagaimana cara bapak/ibu/srd menyampaikan aspirasi di bidang pertanian terkait dengan program (kebijakan) pemerintah (propinsi, kabupaten/kota, nagari) yang tidak sesuai dengan adat dan tradisi yang bapak amalkan? Probing</li> <li>3. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, adakah keterlibatan lembaga adat (KAN, TTS) dalam memberikan pertimbangan kepada petani untuk mendukung pelaksanaan program (kebijakan) pemerintah (propinsi, kabuapten/kota, nagari)?                              Kalau ada, seperti apa?                              Kalau tidak mengapa tidak melibatkan?</li> </ol>	2 X 30 menit	

<p>4. Jika ada program (kebijakan) pemerintah (propinsi, kabupaten/kota, nagari) yang bersifat bantuan (pupuk, bibit dst), Bagaimana bapak menyikapi program (kebijakan) tersebut ? probing: Mendukung, mengapa ? Menolak, mengapa ?</p> <p>5. Bagaimana cara pemerintah (kabupaten, nagari) menyalurkan bantuan tersebut kepada petani? Apakah berdasarkan kriteria tertentu atau berdasarkan kedekatan petani tersebut dengan aparat pemerintah?</p> <p>6. Menurut bapak bagaimana peranan fasilitator nagari (PNPM) dibidang pertanian mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat (nilai ke-Minangkabauan) ?</p>		
<p>Penutup Ucapan terimakasih</p>	<p>1 X 5 menit</p>	

# IZIN PENELITIAN

\_\_\_\_\_



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Bagindo Azis Chan No. 72, Telp. (0751) 91115, Pariaman

= SURAT REKOMENDASI =

Nomor : B.070/685/BKPL/2009

Tentang

Izin Melakukan Penelitian / Survey

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Prop. Sumatera Barat Nomor : B.070/760/WAS-BKPL/2009 tanggal 3 Juni 2009 yang telah mempelajari surat dari Sekretaris Lembaga Penelitian UNP Padang Nomor : 227/H35.2/PG/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Izin Melakukan Penelitian/Survey, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan Penelitian/Survey yang dilaksanakan/dipimpin oleh :

Nama : **Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si**  
Tempat / Tgl Lahir : **Tabekpatah, 27 September 1973**  
Pekerjaan : **Dosen UNP**  
Nomor Kartu Identitas : **1371032709730003**  
Alamat : **Jl. Durian No. 5 Purus Baru Padang**  
Judul : **"Pemetaan Terhadap Orientasi Politik Petani Subsisten Terhadap Kebijakan Publik di Sumbar"**  
Lokasi : **Kecamatan dan Nagari se Kab. Padang Pariaman**  
Waktu Penelitian : **11 Juni s/d 30 september 2009**  
Anggota : **Siska Sasmita, Junaidi Indrawadi, Refi Ardi Putra, dan Edison**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian/survey.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Saudara yang akan melaksanakan penelitian dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Instansi terkait.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian/survey sebanyak 1 (satu) Eks kepada Bupati Padang Pariaman Cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Padang Pariaman.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Pariaman, 11 Juni 2009

An. KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Sehubungan, disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Prop. Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Prop. Sumatera Barat.
2. Bpk. Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan).
3. Bpk. Dandim 0308 Padang Pariaman.
4. Bpk. Kapolres Padang Pariaman.
5. Bpk. Kapolres Padang Pariaman.
6. Bpk. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Hortikultura Perkebunan dan Kehutanan.
7. Bpk. Kepala Bag. Adm. Pemerintahan Umum Kab. Padang Pariaman.
8. Sdr. Camat se Kab. Padang Pariaman.
9. Sdr. Walinagari se Kab. Padang Pariaman.
10. Sdr. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(KESBANGPOL DAN LINMAS)

Jln. Suprpto No. 03 Telp. (0752) 574647 Batusangkar 27219

**SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI**

Nomor : 070//62/KBPLM/2009

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi Sumatera Barat di Padang Nomor : B.070/760/WAS-BKPL/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Mohon Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dimaksud dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama : RAHMADANI YUSRAN, S.Sos, M.Si  
Tempat/Tgl. Lahir : Batusangkar/ 27 September 1973  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jl.Durian No.5 Ujung Gurun Padang  
Kartu Identitas : KTP 1371032709730003 HP : 081374381839  
Maksud dan Obyek : Penelitian  
Judul : PEMETAAN TERHADAP ORIENTASI POLITIK PETANI SUB SISTEM TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI SUMBAR  
Lokasi Penelitian : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Wilayah Kecamatan Sungai Tarab, Kec. Pariangan, Kec. Batipuh, Kec. Lima Kaum, Kec. Sungayang, Kec. Rambatan  
Waktu : 12 Juni s.d 12 September 2009  
Anggota : 4 orang  
1. Siska SAsmita 2. Junaidi Indrawadi 3. Refi Ardi Putra 4. Edison

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut diatas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Aparatur Pemerintah setempat dan institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian.
3. Dalam melaksanakan penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 12 Juni s.d 12 September 2009
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperturnya.



Batusangkar, 28 Mei 2009  
BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS  
KABUPATEN TANAH DATAR  
SEKRETARIS

Drs.ROTZAMI,M.Si  
NIP. 19680604 198903 1 008

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar
4. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
6. Camat Sungai Tarab di Sungai Tarab
7. Camat Pariangan di Simabur
8. Camat Batipuh di Kubu Kerambil
9. Camat Lima Kaum di Lima Kaum
10. Camat Sungayang di Sungayang
11. Camat Rambatan di Rambatan
12. Wali Nagari se-Kec.Sungai Tarab di tempat
13. Wali Nagari se-Kec.Pariangan di tempat
14. Wali Nagari se-Kec.Batipuh di tempat
15. Wali Nagari se-Kec.Lima Kaum di tempat
16. Wali Nagari se-Kec.Sungayang di tempat
17. Wali Nagari se-Kec.Rambatan di tempat



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Kayu Aro – Sukaramei Telp. (0755)  
**A R O S U K A**

Arosuka, 3 Juni 2009

Nomor : 070/071/KPPT-2009  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada,  
Yth. Sdr. RAHMADANI YUSRAN, S.Sos, MSI

di-  
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Badan Kesbang Pol & Linmas Propinsi Sumatera Barat No.B.070/760/WAS-BKPL/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Izin Melaksanakan Penelitian, bersama ini kami terbitkan Izin Penelitian atas nama :

Nama : RAHMADANI YUSRAN, S.Sos, MSI  
Tempat / Tgl. Lahir : Batusankar, 27-09-1973  
No. Kartu Identitas : 1371032709730003  
Alamat : Ujung Gurun Padang Barat  
Maksud / Judul Penelitian : "Pemetaan Orientasi Politik dan Respons Politik Petani Subsisten Terhadap Kebijakan Publik Di Sumatera Barat."  
Lokasi Penelitian : - Dinas Pertanian Kabupaten Solok  
- Kecamatan se Kab. Solok  
Waktu Penelitian : 1 Juni s/d 31 November 2009

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari maksud sebagaimana tersebut diatas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Pimpinan Instansi setelah tiba ditempat yang dituju dan melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian kepada Pimpinan Instansi dan Bupati Solok.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
4. Mengirim hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Solok Cq. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
5. Bila terjadi suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Solok di Arosuka (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Kepala Badan Kesbang Pol & Linmas Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok di Arosuka
4. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbang Pol & Linmas Kabupaten Solok di Koto Baru
5. Yth. Sdr. Camat se Kabupaten Solok di tempat
6. Arsip.....





PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

# KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jl. Veteran No 1. Telp. 0752 - 66354 . Padang Baru - Lubuk Basung, Kode Pos. 26415  
http://www.agamkab.go.id E-mail : yantu\_agam@yahoo.co.id

## REKOMENDASI

Nomor : B.070/57/KPT-Ag/2009

### TENTANG

### IZIN PELAKSANAAN RISET/PENELITIAN/OBSERVASI

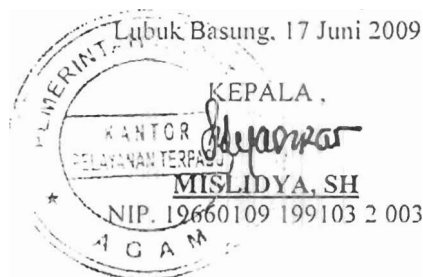
Setelah mempelajari Surat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemprov. Sumatera Barat Nomor B.070/760/WAS-BKPL/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Izin Melaksanakan Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud survey/riset/penelitian/observasi di Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

Nama : RAHMADANI YUSRAN, S.Sos, M.Si  
Tempat/Tanggal Lahir : Tabek Patah/27 September 1973  
Pekerjaan : Dosen UNP  
Alamat : Jl. Durian No. 5, Purus Baru Padang  
Nomor Kartu Identitas : 1371032709730003  
Judul Penelitian : Pemetaan Terhadap Orientasi Politik Petani Subsisten Terhadap Kebijakan Publik di Sumbar.  
Lokasi Penelitian : Wilayah Kecamatan Se - Kab. Agam.  
Waktu Penelitian : 3 bulan.  
Anggota Penelitian : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Praktek Lapangan
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah/Wilayah penelitiannya kepada Pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil Kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam dan Camat/Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikianlah surat keterangan Rekomendasi Izin Praktek lapangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.



Tembusan :

1. Bupati Agam di Lubuk Basung (sebagai Laporan);
2. Kapolres Agam di Lubuk Basung;
3. Dandim 0304 Agam di Lubuk Basung;
4. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
5. Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
6. Kecamatan Se Kabupaten Agam
7. Walingari Se Kabupaten Agam.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
DAN PENANAMAN MODAL**

Jl. H. Agus Salim - Painan Telp. 0756 - 22687

IZIN MELAKUKAN PENELITIAN / SURVEY

No. : 570/ 204 /KPPM-PS/2009

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan, telah mempelajari surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor : B.070/760/WAS-BKPL/2009 tanggal 03 Juni 2009 tentang Permohonan Izin Penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian / survey /Observasi di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh :

N a m a : RAHMADANI YUSRAN, S Sos. MSi  
Tempat Tanggal Lahir : Tabek Patah, 27 September 1973  
Pekerjaan : Dosen UNP  
No Kartu Identitas : 1371032709730003  
Judul Penelitian / Survey : Pemetaan Terhadap Orientasi Politik Petani / Observasi Subsisten Terhadap Kebijakan Publik di Sumbar  
Lokasi Penelitian : Seluruh Nagari di Kab. Pesisir Selatan  
Waktu Penelitian : Juni – Agustus 2009  
Anggota : Siska Sasmita, Junaidi Indrawadi, Refi Ardi Putra, Edison

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor pada pejabat di wilayah tempat melakukan penelitian.
2. Penelitian tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan.
3. Segera melaporkan setelah berakhir penelitian pada pejabat di wilayah tempat melakukan penelitian dan pada pejabat yang mengeluarkan izin penelitian.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dilokasi penelitian.

Demikian izin penelitian/survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 16 Juni 2009

Kepala Kantor ,



Tembusan :

1. Bapak Mendagri Cq Dirjen kesatuan dan politik di Jakarta
2. Bapak Gubernur Prop. Sumbar di Padang
3. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
4. Para Camat se Kab. Pesisir Selatan
5. Para Wali Nagari se Kab. Pesisir Selatan
6. arsip

# SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

## SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDRA BAKTI**

Walinagari : **PASAR BARU**

Menerangkan bahwa,

Nama : **RAHMADANI YUSRAN, S.Sos, M.SI**

Selaku Tim Peneliti telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik "*Pemetaan Orientasi Politik dan Respons Politik Petani Subsisten Terhadap Kebijakan Publik Di Provinsi Sumatera Barat*" pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2009 di Nagari ...**PASAR BARU**.



**SURAT KETERANGAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama SUWARDI, S.Ag

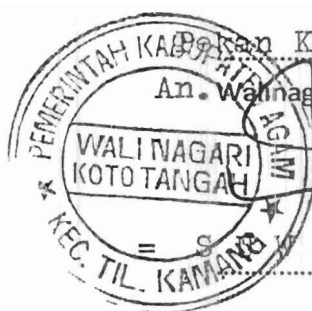
Walinagari Koto Tengah Kec. Tilatang Kamang

Menerangkan bahwa,

Nama : RAHMADANI YUSRAN, S,Sos, M.SI

Selaku Tim Peneliti telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik "Pemetaan Orientasi Politik dan Respons Politik Petani Subsisten Terhadap Kebijakan Publik Di Provinsi Sumatera Barat" pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2009 di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang

Pada hari Kamis, 31-7-2009  
An. Walinagari Koto Tengah  
WALI NAGARI  
KOTO TANGAH  
= S U W A R D I, S. A g =  
KEC. TIL. KAMANG



## CURRICULUM VITAE

### 1. IDENTITAS

1	Nama	Rahmadani Yusran S.Sos, M.Si
2	NIP	19730927 200501 1 004
3	Tempat/tanggal lahir	Tabatpatah/27 September 1973
4	Jenis kelamin	Laki-laki
5	Pendidikan Tertinggi	S2
6	Pangkat/golongan	IIIb
7	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
8	Jurusan/Prodi	Ilmu Sosial Politik/Ilmu Administrasi Negara
9	Unit Kerja	Fakultas Ilmu Sosial UNP Padang

### 2. PENDIDIKAN

No.	Universitas/institut/Lokasi	Gelar	Tahun	Bidang Studi
1.	Universitas Riau/Pekanbaru	Sarjana	2000	Ilmu Pemerintahan
2.	Universitas Gadjah Mada/ Yogyakarta	Magister	2004	Ilmu Administrasi Negara

### 3. PENGALAMAN KERJA

No.	Instansi	Jabatan	Periode
1.	FIS-UNP	Dosen	2005 sampai sekarang
2.	FIS-UNP	Pembina HIMA	2006 sampai 2007
3.	FIS UNP	Pembina HIMA	2007 sampai 2008
4.	Peneliti Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah LEMBAGA PENELITIAN-UNP	Anggota	2007 sampai sekarang
5.	Jurnal Demokrasi FIS-UNP	Sekretaris Redaksi	2008 sampai sekarang
6.	Tim e-learning Universitas Negeri Padang	Anggota	2008 sampai sekarang

### 4. MATA KULIAH YANG DIBINA

1.	Metodologi Penelitian Administrasi Negara
2.	Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik
3.	Evaluasi dan Analisis Kebijakan Publik
4.	Teori Administrasi Negara
5.	Etika Administrasi Negara
6.	Pengantar Ilmu Pemerintahan
7.	Azas-azas Manajemen
8.	E-Government

### 3. KARYA ILMIAH

No.	Judul	Tahun	Jenis
1.	Problematika Kebijakan Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Tesis pada Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada)	2004	Penelitian
2.	Peningkatan Hubungan Kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Barat	2005	Penelitian
3.	Pembinaan dan Penataan Aparatur Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Barat	2005	Penelitian
	Negara Kuat Dalam Pelaksanaan Demokrasi Lokal Di Indonesia : Tinjauan Awal Perberlakuan UU No. 32 Tahun 2004, Jurnal Demokrasi, Vol.IV No.2, Oktober -	2005	Artikel Ilmiah
4.	Dinamika Kebijakan Pemekaran daerah Di Indonesia: Studi Kabupaten Solok Selatan DIKS UNP	2006	Penelitian
5.	Buku Ajar Kebijakan Publik, Jurusan Ilmu Sosial Politik, FIS UNP. Padang	2006	Buku ajar
6.	Orientasi Politik dan Perilaku Politik Perempuan Anggota DPRD Kota Padang (Dikti)	2007	Penelitian
7.	Persepsi dan Kontrol Politik Masyarakat Kota Padang Terhadap Pelaksanaan Pilkada Gubernur Provinsi Sumatera Barat, DIKS UNP	2007	Penelitian
8.	Modul Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas ( <i>Capacity building</i> ) Aparatur Pemerintahan Nagari	2007	Buku Modul
9.	Pemberdayaan Masyarakat Adat Sebagai Basis Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	2008	Penelitian
10.	Evaluasi Kebijakan Pemekaran Daerah di Indonesia: Studi Pemekaran Kabupaten Solok Selatan, DIKS UNP	2008	Penelitian
11.	Kajian Budaya Dan Etos Kerja PNS Pada Pemerintahan Kota Padang, DIKS UNP	2008	Penelitian
12.	Buku Modul Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda, Pusat Kajian Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang	2008	Buku Modul
13.	Kebijakan Pemekaran daerah Di Indonesia: Studi Tentang Dinamika Pembentukan Kabupaten	2008	Artikel Ilmiah

	Solok Selatan, Disampaikan Dalam Konferensi Nasional Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Tanggal 27-28 Juni 2008		
14.	Kebijakan Pemekaran daerah Di Indonesia: Studi Tentang Dinamika Pembentukan Kabupaten Solok Selatan, dalam Administrasi Negara, Isu-isu Kontemporer, (ed. Samodra wibawa). Graha Ilmu. Yogyakarta.. Cetakan Pertama	2009	BUKU

Padang, Desember 2009

Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si  
NIP. 19730927 200501 1 004



## RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS PRIBADI

Nama lengkap dan Gelar : Siska Sasmita, S.IP  
Tempat/tanggal lahir : Padang/29 Desember 1981  
Alamat : Asrama TNI-AD Simpang Haru blok F no.13 Padang  
25123  
No.hp : 08122413288

### PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Mardisiwi II Padang lulus tahun 1994
2. SMP Negeri 8 Padang lulus tahun 1997
3. SMU Negeri 1 Padang lulus tahun 2000
4. Universitas Padjadjaran Bandung lulus November 2004 dengan predikat Cum Laude (IPK 3.88)

### PENDIDIKAN INFORMAL

1. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Golongan III tahun 2006 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Pendidikan Nasional dari tanggal 9 s.d. 23 September 2006, di Padang yang meliputi 135 jam pelatihan
2. Magang Staf Pengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Knowledge Management pada Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia (April-Mei 2007)

## PENGALAMAN MENGAJAR

No	Mata Kuliah	Pada Lembaga
1	Sistem Informasi Manajemen	FISIPOL Universitas Eka Sakti
2	Adminitrasi Kepegawaian	Sda
3	Pengantar Ilmu Administrasi Negara	FIS Universitas Negeri Padang
4	Teori Administrasi Negara	Sda
5	Sistem Informasi Manajemen	Sda
6	Manajemen Perkantoran	Sda
7	Statistik Sosial	Sda
8	Administrasi Pembangunan	Sda
9	Administrasi Perusahaan Publik	Sda

## PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT YANG PERNAH DILAKUKAN

1. Implementasi Kebijakan Rute Pelayanan Prima Bus Angkutan Penumpang oleh Perum Damri Unit Angkutan Bus Kota Bandung
2. Fungsi Sistem Informasi Manajemen terhadap Upaya Peningkatan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Bagian Administrasi Keuangan dan Umum PT. Bank Negara Indonesia (Tbk) Cabang Unpad Bandung
3. Ujicoba Pelayanan Publik Berbasis *Electronic Government* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Padang
4. Penyuluhan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-Formal (PTK-PNF)

Padang, Mei 2008

Siska Sasmita, S.IP.

# DRAFT ARTIKEL ILMIAH

# PEMETAAN ORIENTASI POLITIK DAN RESPONS POLITIK PETANI SUBSISTEN TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI SUMATERA BARAT

Oleh:

Rahmadani Yusran dan Siska Sasmita

## Abstrak

Artikel ini mengungkapkan temuan penelitian yang berkaitan dengan keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam pembentukan orientasi politik dan respons petani subsisten terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di enam kabupaten dan enam nagari di Provinsi Sumatera Barat yang dipilih secara *purposive sampling* dan *snowball sampling* guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan khususnya di daerah kabupaten yang memiliki lahan pertanian yang luas. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam (*in depth interview*), diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*), dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam pembentukan orientasi politik petani dan responsnya terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat dipengaruhi oleh tradisi *balambe hari*. Tradisi *balambe hari* merupakan kearifan lokal petani secara fundamental menggariskan pengolahan sawah sebagai bagian dari tanggungjawab bersama, sehingga dalam prakteknya tidak ada sawah yang terlantarkan. *Balambe hari* juga menjadi sarana interaksi dan komunikasi serta wadah untuk mengaktualisasikan kebutuhan dan kepentingan antara sesama petani dalam proses pengolahan sawah. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada dalam tradisi *balambe hari* sangat menentukan bagaimana respons politik petani di Sumatera barat terhadap kebijakan pemerintah.

*Kata Kunci : Nilai-nilai Ke-Minangkabau-an, Petani subsisten, Balambe hari.*

## A. Pendahuluan

Keterlibatan masyarakat petani di Indonesia dalam politik adalah akibat berlangsungnya suatu perubahan sosial yang dipengaruhi oleh kaum kolonial (Wertheim, 1999:26-27). Perubahan ini menempatkan setiap petani sebagai subjek politik khususnya yang berhubungan langsung dengan kehidupan komunitasnya. Ini ditandai dengan seringnya konflik bernuansa ekonomi dan politik yang disertai kekerasan baik dengan negara atau dengan kelompok lain yang didukung oleh negara. Kuntowijoyo (2002:1-2) memiliki asumsi dasar yang menarik melihat kecenderungan terlibatnya petani dalam politik. *Pertama*, adanya kesenjangan (sosial) yang berdampak pada munculnya polarisasi kepentingan antara dua kelompok yaitu petani penggarap dan tuan tanah. Dalam kehidupan modern saat ini, realitas konflik kedua kelompok tersebut meluas ke bentuk lain yakni konflik antara pihak swasta (investor perkebunan) yang

didukung negara sebagai pemilik tanah lahan dengan buruh kontrak (petani penggarap) yang secara historis adalah pemilik sesungguhnya.

*Kedua*, adalah kecenderungan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat etnis Jawa. Menurut Kuntowijoyo terdapatnya ketegangan kultural antara mereka yang kuat beragama atau kelompok santri dengan yang tidak kuat beragama atau kelompok abangan. *Ketiga*, munculnya konflik dalam masyarakat di pedesaan terutama yang berhubungan dengan perubahan sosial ekonomi (modernisasi) dengan budaya. Perubahan sosial budaya menyebabkan masyarakat petani memiliki nilai-nilai baru dalam kehidupannya. Sementara realitas yang terjadi dalam masyarakat di sekitar kehidupan mereka masih mempertahankan nilai kultur yang kental dengan budaya lokal yang dominan. Inilah yang memicu konflik nilai dalam diri mereka yang setiap saat dapat menjelma menjadi konflik terbuka dengan komunitas lain. Tetapi persoalannya benarkah petani tersebut dengan memiliki orientasi politik?

Secara teori dapat dipahami bahwa orientasi politik individu sangat bergantung pada bagaimana individu tersebut mempersepsikan lingkungan politik di sekitarnya. Proses mempersepsikan lingkungan ini berhubungan langsung dengan aspek kognisi mereka. Muara dari proses ini akan melahirkan partisipasi politik yang otonom (Greenstein, 1975:8) Jelasnya, partisipasi dan orientasi politik yang otonom tersebut terkait dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki individu. Dengan pengetahuan inilah individu kebanyakan mendasari respons politiknya (Morgan, 1986). Tetapi dalam kenyataannya, ternyata tingkat pengetahuan kelompok petani ini relatif rendah, sehingga apa yang diharapkan terkait dengan partisipasi politiknya yang otonom dan orientasi politik mereka menjadi tidak jelas. Apalagi kalau kelompok petani ini dituntut merespons kebijakan publik yang dibuat pemerintah daerah.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka penelitian ini mencoba mendalami kecenderungan yang terjadi dalam diri petani terkait dengan orientasi politik dan respons mereka terhadap kebijakan publik. Beberapa pertanyaan mendasar diajukan untuk memberi arah dan fokus pada penelitian ini, yaitu bagaimanakah keberadaan nilai-nilai budaya minangkabau mempengaruhi orientasi politik petani dan responsnya terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat? Bagaimana model

voting dan orientasi politik petani dalam proses politik terutama dalam merespons kebijakan publik yang dihadapinya?

## B. Metodologi

Sesuai dengan tujuan penelitian tiap tahun/tahapnya, maka pada tahun I digunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* yang dilakukan di 6 Kabupaten di Sumatera Barat dan 6 nagari. Dengan kriteria kabupaten dan nagari yang dijadikan lokasi peneltian didasarkan kepada daerah tradisional Sumatera Barat, yakni kawasan darek (darat) atau luhak dan kawasan rantau (pesisir). Kawasan darek terletak di dataran tinggi sebagai inti atau pusat dari kebudayaan Minangkabau, yang terbagi dalam tiga luhak, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota. Di ketiga luhak inilah nenek moyang Orang Minangkabau berasal, kemudian mereka menyebar ke seluruh Sumatera Barat bahkan sampai ke luar Sumatera Barat. Oleh karena itu, untuk melacak nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam upaya melakukan pemetaan orientasi politik dan respons politik petani subsisten terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat penelitian ini dilakukan di wilayah darek yakni Kabupaten Tanah Datar, Agam dan Lima Puluh Kota. Atas pertimbangan kesamaan karakteristik alam dan masyarakat yang berdekatan dengan lokasi penelitian dengan Kabupaten Agam, maka penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak di lakukan. Sehubungan dengan ini maka lokasi penelitian adalah sebagaimana terhimpun pada matriks berikut:

No.	Kabupaten	Nagari Lokasi Penelitian
1.	Kabupaten Tanah Datar	Nagari Minangkabau
2.	Kabupaten Agam	Nagari Koto Tangah
3.	Kabupaten Solok	Nagari Cupak
4.	Kabupaten Padang Pariaman	Nagari Pauh Kamba
5.	Kabupaten Pesisir Selatan	Nagari Pasar Baru
6.	Kabupaten Pasaman	Nagari Aia Manggih

Informan penelitian dipilih berdasarkan tujuan penelitian yaitu petani subsisten di setiap di kabupaten. Selanjutnya data penelitian dilakukan dengan beberapa cara, yaitu wawancara mendalam (*in depth interview*), diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*), dan dokumentasi.

### **C. Hasil Penelitian**

#### **I. Keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam pembentukan orientasi politik dan respons politik petani terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat**

Temuan penelitian terhadap keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dan responnya terhadap kebijakan di lokasi penelitian terungkap sebagai berikut:

Secara umum, dari enam nagari di enam kabupaten/kota di Sumatera Barat yang diteliti, ditemui bahwa pertanian merupakan bagian penting dalam masyarakat tradisional Sumatera Barat yakni Minangkabau. Dalam masyarakat adat Minangkabau, sawah dan ladang dianggap sebagai sumber pokok ekonomi dan kemakmuran. Dengan sawah dan ladang tersebut orang Minangkabau semenjak dahulu begitupun sekarang membangun dusun, teratak, koto, dan nagari, membangun kampung dan halaman, balairung dan masjid, jalan dan tepian tempat mandi, bangunan sekolah, langgar dan mushalla. Dengan hasil sawah dan ladang itulah setiap yang dibangun itu dapat diisi, dan diramaikan serta dihiasi, seperti masjid, jalan, surau, dan sekolah. Rukun Islam disempurnakan dengan hasil sawah dan ladang. Begitupun pembiayaan perang gerilya di waktu revolusi fisik menentang penjajahan Belanda, sawah ladang berikut hasilnya disumbangkan untuk kepentingan kemerdekaan.

Secara substansial, Fungsi sawah dan ladang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau tersebut, dimanifestasikan secara adat melalui berbagai bentuk upacara adat yang diyakini dapat memberikan manfaat besar dari hasil pertanian. Upacara adat ini disebut juga dengan adat turun kesawah yang diselenggarakan melalui:

a. *Balambe hari*

*Balambe hari*, adalah aktivitas yang dilakukan oleh petani sebelum turun ke sawah. Tradisi ini terdiri-dari beberapa tahap, yakni, *pertama*, Mengumpulkan petani untuk melaksanakan pertemuan pada waktu yang sudah ditentukan. Tradisi ini diselenggarakan secara unik, dimana sebelum turun ke sawah petani menghimpun petani lainnya dengan menggunakan masjid/mushalla sebagai sebagai alat komunikasi dan informasi. Seperti yang diungkapkan oleh MD salah seorang petani dari Nagari Minangkabau,

“Disini turun ke sawah serentak, disiarkan atau diumumkan di mesjid terlebih dahulu, untuk membersihkan *banda* atau irigasi dan kemudian gotong-royong secara bersama. Kegiatan ini dilakukan satu kali dalam lima belas hingga tiga puluh hari. Itu saja yang menjadi kebiasaan masyarakat petani disini, karna kita memakai *banda* (saluran irigasi) tersebut secara bersama”.

Selain itu, tradisi unik yang dilakukan oleh petani untuk memulai turun ke sawah juga dilakukan dengan cara diumumkan oleh salah seorang petugas yang disebut dengan *upeh* keseluruh wilayah nagari. *Upeh* memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi dan memobilisasi masyarakat terkait dengan aktivitas yang akan dilaksanakan bersama oleh masyarakat nagari. Dalam menyampaikan informasi *upeh* berjalan mengelilingi nagari sambil memukul alat musik tradisonal, seperti yang diungkapkan oleh DNKS petani di Nagari Pauh Kamba, Padang Pariaman;

” Kalau cara dahulu, semasa kita masih diperintah “*kupalo nagari*” (kepala nagari), saat musim turun ke sawah tiba, diketok *canang* (alat musik tradisonal) oleh seorang petugas yang disebut *upeh* untuk memberitahukan kepada masyarakat waktunya turun kesawah karena sudah mulai musim hujan”.

*Kedua*, sebelum turun ke sawah terlebih dahulu dilakukan pertemuan di masjid/mushalla yang dihadiri oleh pemangku adat (*niniak mamak*) dan petani yang akan menggarap sawahnya. Peranan pemangku adat dalam pertemuan ini sangat penting dalam memprakarsai lahir kesepakatan dalam membuat perencanaan turun ke sawah. Keterlibatan pemangku adat ini juga dikarenakan dalam struktur adat minangkabau yang mempatkan peranan pemangku adat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh kaumnya termasuk dalam masalah pertanian. Menurut RDS petani di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman,



“Sebagaimana yang digariskan oleh adat minangkabau bahwa masalah sako dan pusako adalah urusan ninik mamak. Dalam konteks sako dan pusako ini terlingkupi di dalamnya masalah pengelolaan lahan pertanian yang digarap oleh anak kemenakannya. Artinya, pemangku adat (niniak mamak) merupakan unsur yang berperan penting dalam menentukan dan membuat berbagai kesepakatan dan tindakan terkait dengan dinamika dalam kehidupan bertani dari anak kemenakannya. Dengan keterlibatan Niniak mamak inilah kemudian aktivitas pertanian dalam masyarakat Minangkabau dilaksanakan dan dilestarikan secara turun temurun”.

Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang waktu yang tepat untuk turun ke sawah dan membuat beberapa kesepakatan penting terkait dengan pengelolaan sawah mulai dari masa menanam sampai pada masa panen tiba. Ini artinya, pertemuan yang diselenggarakan akan menentukan pula terhadap masa depan sawah dan petani itu sendiri, oleh karena itu setiap petani yang akan menggarap sawahnya wajib menghadiri pertemuan ini. Pertemuan tersebut juga memiliki arti penting bagi petani yang hadir dan membuat kesepakatan, dimana dalam dirinya (petani) akan menjelma menjadi tanggungjawab moral selama hidupnya untuk melaksanakan kesepakatan tadi. Sedangkan bagi yang tidak mengikuti kegiatan turun ke sawah setelah menyetujui kesepakatan yang dibuat maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi secara adat, misalnya dikucilkan dalam pergaulan sehari-hari.

*Ketiga*, sebagai bentuk implementasi pertemuan tersebut kemudian dilakukan *turun ke sawah* secara bersama. *Turun ke sawah* ini di mulai dengan membersihkan *tali banda* (saluran air) di sawah salah seorang petani dan dilanjutkan ke sawah petani yang lainnya sampai sawah tersebut benar-benar siap untuk di Tanami. Dan apabila ada sawah yang belum siap untuk di tanami, maka orang-orang yang terlibat dalam *balambe hari* akan merasa memiliki hutang dan berusaha mencari waktu lain untuk mengerjakannya sampai sawah tersebut siap untuk di Tanami. Inilah bentuk tanggungjawab moral petani dalam tradisi *balambe hari*. Demikian juga, apabila ada salah seorang petani yang tidak ikut membersihkan sawah petani lainnya, maka sawahnya juga tidak akan di bersihkan.

*Ke-empat*, *bajulo-julo* (bergilir) yang dilaksanakan pada masa panen yang dilakukan bersama secara bergiliran antar sawah petani seperti sebelum bertanam di lakukan. Manfaat dari tradisi *balambe hari* pada masa panen ini adalah, petani

bisa menikmati hasil panen mereka dengan lebih memuaskan karena tidak ada upah yang harus dikeluarkan, jika dibandingkan dengan menggarap lahan secara individu dengan sistem upahan. Sebagaimana diungkapkan oleh BS salah seorang petani di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman;

“Dalam tradisi kami turun kesawah dahulu ada istilah *lembe hari atau bajulo-julo* (bergilir). Sesama petani dalam satu kelompok hamparan bersama merencanakan kapan waktu akan turun kesawah. Sawah kemudian dikerjakan secara bergilir. Minggu ini sawah si A, berikutnya sawah si B”.

Nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam tradisi *balabe hari* merupakan sebuah bentuk kearifan lokal tentang bagaimana masyarakat petani menghayati lingkungan dan ikatan sosial mereka dalam merespon berbagai perubahan untuk memenuhi kebutuhannya. *Balambe hari* yang diselenggarakan secara unik interpretasikan dalam tradisi yang diyakini memberikan manfaat memperkuat rasa kekeluargaan dan kepedulian sosial terhadap sesama masyarakat tani serta memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi manakala proses menanam padi, jenis benih yang akan ditanam dan pemanfaatan *tali banda* sampai masa panen berlangsung. Aktivitas ini memungkinkan seluruh petani saling berkontribusi secara aktif menentukan berbagai alternatif dalam membuat perencanaan mengelola sawah mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh ZB salah seorang petani di Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasaman;

“Sebelum turun ke sawah, kami juga ada berdiskusi dengan sesama petani yang lokasi sawahnya berdekatan untuk menyepakati jenis benih apa yang sama-sama akan ditanam. Kami ada gotong-royong membersihkan tali banda, bersama-sama *manaiakan aia ka ateh* sebelum turun ke sawah”.

Fenomena ini, menjelaskan bahwa dengan tradisi ini petani dapat memutuskan sendiri waktu yang tepat untuk memulai menanam bersama sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, memanfaatkan *tali banda* (saluran irigasi) secara bersama sehingga bisa mengalir semua sawah petani sampai datang masa *manyabik* dan *mairiak* (panen) juga dilakukan bersama.

#### b. Gotong Royong

Gotong royong dalam kerangka nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam tradisi bertani memiliki makna yang dalam yang dikaitkan dengan budi atau

akhlah seseorang. Dan ini adalah salah satu syarat yang dikehendaki oleh adat yang berkualitas. Seperti yang ditulis oleh Idrus Hakimmy (1994:195) “budi ialah dapat merasakan kedalam diri apa yang dirasakan oleh orang lain” ..yang mendorong seseorang berbuat baik terhadap sesamanya.

Budi adalah berdasarkan kesanggupan merasakan perasaan orang lain yang dapat dirasakan bagi diri sendiri, karena menurut adat yang disebut *raso* (rasa) adalah yang terasa bagi diri, *pareso* (perasaan) adalah yang terkandung dalam hati, dengan demikian lahirlah rasa seperti kata adat *nan elok de awak katuju de urang, sokiek dek awak sokiek dek urang* (yang baik bagi kita juga baik bagi orang lain, yang sakit bagi kita juga sakit bagi orang lain). Dengan demikian lahirlah pada seseorang rasa kasih sayang, sopan dan santun sesamanya. Kesengsaraan dan serba kekurangan secara spontan dapat dirasakan oleh seseorang.

Dalam kehidupan sehari-hari telah dilaksanakan secara luas di dalam adat Minangkabau yang melahirkan sifat tolong-menolong, saling membantu yang terlepas dari perhitungan laba dan rugi, karenanya masyarakatnya dihubungkan oleh tali kekeluargaan yang kuat kokoh yang senantiasa menghayati budi luhur dan halus. Dari budi inilah lahirnya sifat baik lainnya dan berbagai bentuk sifat sosial dalam kehidupan. Nilai-nilai adat inilah sebenarnya yang mendasari bagaimana gotong royong itu dilakukan dalam mengelola pertanian di Sumatera Barat.

Dalam mengelola sawah, kegiatan gotong royong diselenggarakan atas dasar *raso jo pareso* (rasa dan perasaan) dimana dilakukan tanpa adanya instruksi dan sistem upah tertentu seperti yang dikenal saat ini. Artinya, masyarakat datang bergotong royong tanpa diundang atau diminta tenaganya tetapi datang atas kesadaran sendiri ingin membantu yang lainnya. Jadi apabila ada salah seorang petani yang sedang mengerjakan sawahnya, maka serta merta siapa saja yang melihat akan langsung membantunya. (wawancara dengan salah seorang petani di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar). Gotong royong biasanya dilakukan ketika masa panen sudah dating, Seperti yang diungkapkan oleh RDS salah seorang petani di Nagari Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman:

“Saya ingat waktu kecil-kecil dahulu, orang kampung sini bertani dengan cara bersama-sama/gotong royong. Sawah dikerjakan secara bergilir mulai dari awal *maluluak* (membajak) sampai padi siap untuk dipanen. Setelah *manyabik* (potong

padi), padi dibiarkan disawah ± 1 minggu kemudian baru dibawa ke *lungguak* (gunungan padi yang belum dipisah dengan batangnya) ± 2-4 minggu disini. Semua itu murni dikerjakan dengan gortong royong..”

### c. *Ratik tulak bala*

*Ratik tulak bala* merupakan kegiatan seremonial dalam tradisi bertani dalam masyarakat Minangkabau. *Ratik tulak bala* dilakukan di tempat tertentu untuk mencegah terjadinya berbagai bala atau musibah yang akan mengganggu pertanian dengan memanjatkan doa-doa tertentu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan ini diselenggarakan dengan melakukan ritual-ritual tertentu yang mendasari keyakinan masyarakat saat turun kesawah. Sebagaimana diungkapkan SS petani di nagari Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman

“Seperti ritual *ma-asok* benih sebelum ditanami, kemudian menanam sebanyak tujuh rumpun terlebih dahulu. Begitu juga saat padi mulai hampir *tabik* (menguning) dilakukan ritual *ratik tulak bala* sampai pada ritual masa *manyabik* (panen) yang disebut *manuai*. Kegiatan *manuai* ini dilakukan dengan mengambil tujuh rumpun padi, diikat dan diasapi dengan kemenyan, setelah itu baru dipanen. Rangkaian tradisi ini diyakini masyarakat petani memiliki hikmah dan dapat membawa berkah pada hasil pertanian mereka. Hal ini juga dikaitkan dengan keimanan bahwa berbagai bala atau musibah yang mungkin mengganggu pertanian mereka dapat dihindari dengan jalan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan melalui *ratik* tersebut

Di Kabupaten Solok tradisi *tulak bala* juga dilakukan oleh petani untuk mengatasi hama yang menyerang tanaman yang dilakukan di mushalla dan di sawah. Sebagaimana diungkapkan AH petani Kabupaten Solok).

“Aktivitas *tulak bala* biasanya dilakukan di mushalla dan di sawah. Di tempat ini kemudian dilakukan pemotongan ayam, dimasak dan disantap bersama diikuti dengan berdoa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan tradisi *basimbua* (mencipratkan air) atau saling mencipratkan air kekawan-kawan sebagai bentuk menolak bala. Umpamanya, hama tikus sedang mengganas, untuk bala ini ini dipotong ayam sebanyak 5 ekor. Nanti di masak dan dimakan bersama diikuti dengan *balega di sabalik sawah* (mengitari seluruh kawasan sawah) sambil membaca doa *ratik* sepanjang jalan. Atau misalnya lama tidak turun hujan, kadang-kadang menyembelih kambing di *kapalo banda* (hulu sungai)”.

Tradisi *balambe hari* ini di atas merupakan nilai-nilai ke-Minangkabau-an yang sudah melembaga dalam kehidupan petani di Sumatera Barat. Sampai saat ini tradisi ini masih diselenggarakan oleh petani, karena diyakini dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pertanian. Namun demikian petani juga menyadari bahwa perubahan pola pikir petani dan intervensi pemerintah melalui

kebijakan peningkatan kesejahteraan petani, telah mengakibatkan tradisi *balambe hari* mulai berkurang intensitas dan mengalami pergeseran makna. Berikut secara ringkas, digambarkan dalam matriks nilai-nilai ke-Minangkabau-an tradisi bertani di Sumatera Barat :

**Tabel 1: Keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam pembentukan Orientasi politik dan respons politik petani Terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat**

Nilai-nilai ke-Minangkabauan	Keterangan
Balambe hari	Pertemuan yang dilakukan petani sebelum turun ke sawah yang diprakarsai oleh pemangku adat (niniak mamak). Hasil kesepakatan dari pertemuan ini menjadi tanggungjawab moral bagi petani untuk melaksanakannya
Turun ke sawah	Petani secara serentak turun ke sawah yang dimulai dengan membersihkan tali Banda sampai sawah siap ditanami. Pekerjaan turun ke sawah dilaksanakan secara bergiliran diantara sawah petani
Gotong royong	Tradisi dalam pengolahan sawah mulai dari mempersiapkan talibandar sampai masa panen. Dilaksanakan secara bergiliran di setiap sawah petani tanpa di bayar
Bajulo-julo	Dilaksanakan pada masa panen yang dilakukan bersama secara bergiliran antar sawah petani seperti sebelum bertanam di lakukan. Manfaat dari tradisi <i>balambe hari</i> pada masa panen ini adalah, petani bisa menikmati hasil panen mereka dengan lebih memuaskan karena tidak ada upah yang harus dikeluarkan, jika dibandingkan dengan menggarap lahan secara individu dengan sistem upahan.
Ratik tulak bala	kegiatan seremonial dalam tradisi bertani dalam masyarakat Minangkabau untuk mencegah wabah yang melanda sawah

## II. Kecenderungan (predisposisi) petani Dalam Merespons Kebijakan Pemerintah (daerah) di Sumatera Barat

Tradisi bertani dalam masyarakat Minangkabau tersebut di atas, umumnya diakui oleh masyarakat petani di Sumatera Barat sampai saat ini masih berlangsung, akan tetapi pelaksanaannya telah mengalami proses perubahan seiring dengan adanya perubahan pola pikir petani yang dipengaruhi oleh kondisi alam dan intervensi yang intens dari pemerintah dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan petani. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah

keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam tradisi bertani di Sumatera Barat menghadapi perubahan yang terjadi? Nilai manakah yang dominan? Bagaimana petani merespon perubahan tersebut?

Dari penelitian yang dilakukan, umumnya diakui oleh petani di Sumatera Barat bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani sejauh ini cukup membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Seperti, Tanam Padi Sebatang (PTS), pupuk bersubsidi, pembentukan kelompok tani dan Program Penyuluhan Pertanian (PPL).

Di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar, menurut salah seorang petani, “ sejak diterapkannya PTS , produksi taninya meningkat hingga dua kali lipat” dan tentunya keadaan ini menguntungkan ekonomi keluarganya. Menurut salah seorang petani di Nagari Cupak, Kabupaten Solok, pemerintah setempat juga telah memprioritaskan di bidang pertanian padi yakni Sekolah Lapang Padi Tanam Sebatang (SLPTS). Konsep pelaksanaan kebijakan ini adalah dengan membina kelompok-kelompok tani ini menanam dan membudi dayakan varietas Padi Tanam Sebatang (PTS). Dalam sekolah lapang ini kelompok tani dibina dalam sebuah lahan hamparan milik kelompok sebagai area bertani sekaligus belajar tentang pembudidayaan PTS ini. Mulai dari penangkaran bibit unggul, pola menanam, penanganan hama dan berbagai hal yang menyangkut pengelolaan PTS secara baik dan benar. Tujuannya adalah agar petani yang umumnya berpredikat sebagai petani subsisten dapat meningkat taraf hidupnya dari konsep bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi konsep bertani sebagai *better bussines* , yaitu bertani sebagai lapangan usaha yang menjanjikan.

Di Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasaman, kebijakan pemerintah dalam bentuk pemberian pupuk bersubsidi juga dirasakan oleh petani memberikan nilai tambah dalam hal perekonomian mereka. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang petani, upiak; “ Saya kemarin membeli pupuk bersubsidi Rp. 75.000/karung dari harga sebelum disubsidi sebesar Rp. 125.000/karung”. Keringanan biaya pembelian pupuk ini dapat meringankan beban saya, karena sawah saya banyak’ sekarang saya tidak terlalu berat memenuhi kebutuhan anak sekolah. Hal yang sama juga diakui oleh Zainab, “Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga sering turun ke sawah kami untuk meninjau permasalahan pertanian yang kami hadapi.

Misalnya satu kali dalam sebulan, mereka meninjau dan menanyakan kepada kami apa permasalahan yang sering dihadapi tatkala kegiatan pertanian berlansung. Ada program pemerintah berupa Pupuk bersubsidi itu dibeli melalui kelompok tani dan dihantar kelokasi atau areal pertanian dengan mobil. Pupuk tersebut disubsidi agar kami petani terjangkau harganya”.

Demikian juga di Nagari Koto Tengah Kabupaten Agam, Menurut salah seorang petani “ eksistensi kelompok tani memang sangat dirasakan”. “melalui kelompok tani ini, pemerintah memberikan informasi adanya kebijakan padi tanam sebatang, diumumkan dimasjid, kemudian petani dikumpulkan, dan di sanalah disosialisasikan cara bertanam dengan pola tanam sebatang tersebut. Kebijakan lain seperti pupuk bersubsidi juga seperti itu, melalui kelompok tani petani baru dapat mengaksesnya. Begitu juga Di Nagari Minangkabau, menurut salah seorang petani’ “Saya terdaftar dalam kelompok tani, dengan begitu banyak kemudahan dan informasi yang terima terkait dengan kegiatan petani. Dikelompok tani, dengan pertemuan sekitar satu kali dalam sebulan kami diajarkan pola bertanam padi sebatang, benih yang baik digunakan, pokoknya semua hal baru yang datang dari pemerintah kami terima dan dengar disana”.

Meskipun diakui oleh petani di Sumatera Barat bahwa kebijakan pemerintah selama ini cukup berarti bagi mereka, namun belum dirasakan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan taraf hidup mereka. Petani di Sumatera Barat beranggapan implementasi kebijakan pemerintah belum didukung oleh *good will* pemerintah dalam memfasilitasi sejumlah masalah yang dihadapi oleh petani. Akibatnya, petani di Sumatera Barat berusaha bersikap rasional dalam mengelola sawah-sawah mereka sebagai bentuk respons petani terhadap kebijakan pemerintah. Beberapa bentuk sikap rasional petani di Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Pertama, sikap rasionalitas petani di Sumatera Barat dalam merespon kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik alam. Karakteristik alam di Sumatera Barat terdiri dari daerah perbukitan dengan dataran tinggi dan rendah, Letak sawah berada di dataran tinggi dan dataran rendah sehingga berpengaruh pada jenis padi yang ditanam. Sedangkan pola sawah di Sumatera Barat dapat dikelompokkan, yaitu sawah berbandar langit, sawah berbandar hidup. Sawah

berbandar hidup secara rutin memperoleh pasokan dari sungai dan merata di Sumatera Barat, kecuali di Padang, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pasaman. Sedangkan sawah berbandar langit selalu menggantungkan pasokan air dari air hujan. Karakteristik daerah dan pola sawah seperti ini ternyata sangat mempengaruhi jenis tanaman yang akan di tanam.

Di Nagari Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman, Pola sawah di daerah ini merupakan tadah hujan, oleh karena itu sawah-sawah di daerah ini sangat bergantung pada pengelolaan *tali banda*. Program irigasi merupakan kebijakan yang sangat sangat diharapkan oleh masyarakat petani untuk dijadikan prioritas di daerah ini. Tidak adanya sumber air tetap di daerah ini berpengaruh besar terhadap perkembangan kemampuan petani secara ekonomi. Karena bertani merupakan profesi yang dominan ditekuni oleh masyarakat. Jika tersedia sumber pengairan yang tetap, petani sangat optimis hal tersebut dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan hasil panen dan perbaikan nasib petani. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang petani:

“Permasalahan kami petani disini adalah air, untuk kebutuhan air disini istilahnya kami bergantung dari “**banda langit**” (air hujan). Kadang-kadang benih kami sudah berusia 40 hari atau sudah lewat masa tanam, tapi hujan tidak juga turun. Sawah kering tentu tidak bisa digarap.

Masalah yang sama juga dekemukakan oleh petani lainnya di Nagari Pauh Kamba, “Selama ini memang sudah banyak program pemerintah untuk pertanian yang paling jadi permasalahan kami disini adalah Air. Sawah disini adalah tadah hujan, jadi satu-satunya sumber air disini adalah air hujan, hal ini sangat menyulitkan kami”. Petani yang lainnya mengatakan, ” Kalau ada air yang cukup disini mungkin akan bagus hasil padi kami. Kadang saat-saat padi mulai naik (masa pertumbuhan) ternyata musim kering tiba, kami tidak bisa berbuat apa-apa”.

Begitu juga di Nagari Cupak Kabupaten Solok, petani petani di nagari ini beranggapan bahwa kebijakan PTS di daerah ini dianggap tidak sesuai dengan karakteristik lahan di daerahnya dan benih PTS tersebut belum mampu memberikan manfaat ekonomis yang lebih baik bagi petani, mengingat berbagai



kriteria yang rumit dan biaya pengelolaan yang tinggi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang anggota kelompok tani,

"Dari segi penggunaan benih kita memang diuntungkan dari bibit PTS ini". "Tapi hanya disitu saja keuntungannya. Perbandingannya adalah kalau untuk jenis padi biasa untuk benih kita perlu menggunakan sekitar 7 sukek (= 4 liter) benih sedangkan kalau untuk PTS cukup satu Cupak saja. Kan memang sangat hemat. Tapi untuk biaya pengelolanya sangat besar dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Untuk satu petak sawah saja membutuhkan 6 orang untuk bertanam dibandingkan untuk benih biasa kita bisa mengerjakannya hanya dengan dua orang. Apalagi untuk menyangi padi butuh lebih banyak lagi. Orang-orang tersebut kan diupah. Satu hari kerja RP. 30.000. Sedangkan hasil panennya dibandingkan dengan padi jenis biasa hampir sama saja dan harga nya lebih rendah".

Selain itu, jika dibandingkan dengan daerah lain, daerah ini memiliki tempat tersendiri dalam bidang pertanian bagi masyarakat di Sumatera Barat. Salah satu produk unggulannya dikenal dengan *bareh Solok* (beras solok) memiliki rasa yang khas, harum dan gurih. Selama ini, petani di Solok mendapatkan kemudahan dalam dan manfaat yang besar dari produk unggulan ini, Selainnya proses menanamnya mudah dan sudah dilakukan sejak lama, *bareh solok* ini harganya di pasar stabil jika dibandingkan dengan harga komoditas lainnya. Oleh karena itu, petani beranggapan kualitas beras yang dimiliki selama ini lebih bagus dari jenis PTS. Seperti yang diungkapkan salah seorang petani lainnya di Nagari Cupak, " berdasarkan pengalaman kami, kualitas beras yang dihasilkan kurang bagus, tidak seperti bareh solok yang sudah menjadi komoditi unggulan Nagari Cupak. Nasi dari jenis PTS ini gampang ber-air dan sulit menakar air agar nasi matang dengan sempurna".

Kecenderung petani dalam menyikapi masalah tersebut adalah, banyak diantara petani yang kemudian memutuskan tidak bergabung dalam kelompok tani, dan kembali mengolah sawah sendiri sebagaimana yang pernah di lakukan dalam tradisi yang lama. Bagi petani, bibit PTS dianggap tidak lebih bagus kualitasnya dari bibit lokal yang selama ini digunakan, seperti Benih *anak daro*, *sokan*, dan *ceredek*. Salah seorang petani di nagari Cupak mengungkapkan;

"Akhir-akhir ini karena macam-macam bibit yang di suruh tanam oleh petani cacat kaulitas pertanian kita. Lama-lama hal ini bisa merusak nama 'bareh solok'. Selama ini bareh solok terkenal dengan kualitas nya. Karena selama ini yang di pakai adalah benih asli dari bareh solok. Benih anak daro, sokan, ceredek. Karena

itu yang selama ini sesuai dengan tanah disini. Sekarang bermacam-macam benih yang diberikan. Tidak di teliti dulu apakah itu cocok untuk lahan-lahan petani”.

Kecenderungan di atas mengindikasikan bahwa respon petani adalah menerima dan mendukung kebijakan pemerintah. Rasionalitas petani ini tercermin dengan sikap petani yang membuka diri terhadap program pemerintah walaupun terjadi perubahan orientasi dari petani subsisten ke petani individual yang lebih banyak disandarkan kepada orientasi ekonomi sebagai sebuah kebutuhan utama. Ini juga tidak berarti petani tidak menyadari konsekuensi yang ditimbulkan oleh sikap menerima perubahan tersebut. Banyak diantara petani yang beranggapan kebijakan pemerintah belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan petani, dan masih spasial karena hanya diprioritaskan bagi petani yang termasuk ke dalam kelompok tani saja. Kasus yang ditemukan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Solok mengindikasikan kondisi seperti itu.

Kecenderungan lain dari sikap rasional petani terhadap masalah ini adalah menolak kebijakan pemerintah, karena beranggapan pemerintah belum mengakomodasi Kebutuhan petani dan karakteristik daerahnya. Dan ini merata sebenarnya di seluruh daerah Sumatera Barat. Tetapi, respon petani di Kabupaten Solok sangat realistis menggambarkan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Antusiasme petani terhadap komoditas lokal dengan kualitas yang bagus kelihatan telah menjadi identitas dan bernilai *prestise* bagi petani. Oleh karena itu, ancaman terhadap *prestise* ini, diekspresikan petani dalam bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Kedua, subsidi pupuk. Umumnya program PTS sangat mengandalkan pupuk, akan tetapi jumlah pasokan pupuk tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Bahkan teridentifikasi adanya praktik *pencaloan* pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pihak distributor dengan perusahaan perkebunan yang mampu membeli pupuk dengan harga yang tinggi. Akibatnya petani tidak mampu membeli pupuk. Temuan ini juga mengindikasikan distribusi pupuk juga tidak merata dikalangan petani yang tergabung dalam kelompok tani, disamping prosedur yang sulit juga

ada kecurigaan dari kelompok tani terhadap ketua kelompok tani bekerjasama dengan distributor dalam merekayasa harga pupuk.

Kebijakan pupuk bersubsidi pada dasarnya cukup bermanfaat dirasakan oleh petani, namun karena prosedur dan berbagai manipulasi terjadi dalam pengelolaan dan penyalurannya kebijakan ini belum bisa memberikan pengaruh yang nyata bagi kehidupan petani. Bahkan seringkali terjadi kelangkaan pupuk dapat mengancam hasil panen petanin, bahkan kemungkinan terjadi gagal panen. Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Nagari Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman ;

“Bantuan pupuk bersubsidi tidak banyak membantu. Untuk memperoleh pupuk bersubsidi ini, petani melalui kelompok disuruh membuat proposal untuk mengajukan kebutuhan. Pupuk tersebut disalurkan melalui tingkat distributor dan pengencer, baru ke kelompok tani. Proses yang panjang ini selalu menjadi masalah. Pupuk yang diturunkan selalu tidak memenuhi kebutuhan. Misal kebutuhan kami 10 ton. Distributor selalu mengaku bahwa PT. Pusri hanya menurunkan 50% dan paling banyak 60%. Pernah pada suatu pertemuan pusri mengatakan selalu memberi sesuai kebutuhan. Jika pemerintah ingin membenahi kerja distributor ini kan sebenarnya bisa dilacak. Bahkan ada distributor yang menjual pupuk ke daerah lain seperti Pasaman yang sanggup membayar harga lebih tinggi. Artinya, pupuk bersubsidi tetap belum bisa menjamin kestabilan harga dan belum menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bagi petani.

Kondisi seperti di atas mengakibatkan posisi petani di daerah ini semakin sulit. Di satu sisi petani mengalami tekanan untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan disisi lain petani harus membeli pupuk meskipun harganya tidak terjangkau. Namun demikian, petani tetap membuat pilihan untuk membeli pupuk bersubsidi dengan harga yang mahal dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang petani di Nagari Pauh Kamba, “Pernah kami membeli pupuk Rp.180.000/karung. Itu kan sebenarnya sudah diluar kemampuan petani”. “Adapun program pupuk bersubsidi memang sudah berjalan sekitar 3 tahun terakhir, tapi belum banyak membantu. Jatah yang diberikan selalu belum mencukupi kebutuhan. Mengkin karena banyak banyak permaianan didalamnya yang tidak kita mengerti. Buktinya meskipun karungnya bermerek pupuk bersubsidi kami tetap beli dengan harga tinggi sampai Rp.90.000/karung”.

Di Nagari Cupak Kabupaten Solok, kelangkaan pupuk bersubsidi juga menjadi masalah utama bagi petani. Petani di daerah ini menyadari bahwa pemberian pupuk bersubsidi merupakan program yang di oerintasikan untuk memberikan kemudahan bagi petani memperoleh pupuk dengan harga yang bisa dijangkau oleh petani. Namun dalam praktiknya petani mengakui sering dijadikan objek bisnis dan *bodoh-bodohan* oleh distributor ataupun pengecer pupuk. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang petani;

“Sering terjadi pupuk bersubsidi yang datang kewilayah mereka setelah sampai didistributor di *droop* ke pihak-pihak yang mau membayar dengan harga lebih mahal seperti perkebunan sawit. Kondisi ini hampir terjadi di setiap daerah. Kasus ini hampir dapat dikatakan sebagai rahasia umum namun belum ada solusi yang berarti untuk mengatasi kesulitan memperoleh pupuk serta *kong-kalingkong* yang menjadi penyebabnya”.

Petani lainnya di Nagari Cupak mengatakan “PTS ini sangat banyak butuh pupuk, sementara pupuk adalah barang yang sangat susah kita peroleh”, “kadang sudah hampir berbuah padi, pupuk belum juga datang”, PTS ini seminggu sudah ditanam sudah harus di pupuk. Selama ini kan kami petani ini selalu teraniaya karena pupuk sulit didapat”. Kelangkaan pupuk bersubsidi ini juga diakui oleh petani lainnya sebagai salah satu bentuk tekanan yang berat, karena selain berkitab kepada gagal panen, hasil panenpun juga tidak bisa dipergunakan untuk memperbaiki ekonomi keluarga, bahkan hasil panen diperuntukan untuk membayar hutang saja, sebagaimana diungkapkan salah seorang petani di Nagari Cupak, “bagaimana petani bisa sejahtera, harga pupuk mahal, sudah itu sulit diperoleh sehingga hasil padi tidak bisa maksimal”, “ pernah padi kami tidak dapat pupuk sama sekali, sehingga saat panen hasil panen kami habis untuk membayar hutang saja”, untuk makan dan bertanam berikutnya, buat lagi hutang baru selalu seperti itu”.

Di Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasaman, petani mengakui juga mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Jikapun ada petani merasakan pupuk tersebut tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan petani. Petani di daerah ini menyadari bahwa untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus menjadi anggota dalam suatu kelompok, melalui kelompok tersebutlah kemudian pemerintah menyalurkan pupuk bersubsidi. Namun demikian, setelah menjadi anggota kelompok tani, petani di daerah ini belum memperoleh pupuk bersubsidi

sebagaimana yang dianjurkan pemerintah. Merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, beberapa orang petani memutuskan untuk keluar dari kelompok tani dan bersuaha dengan inisiatif sendiri untuk mengelola sawahnya. Sebagaimana diungkapkan salah seorang petani di Nagari Aia Manggih:

“Permasalahan lain yaitu ketersediaan pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani untuk mengolah sawahnya. Saya dulunya aktif dalam kelompok tani, karena kata orang-orang dengan masuk kelompok tani kita bisa dapat pupuk bersubsidi. Tapi setelah kami terlibat di dalamnya, ternyata pupuk tersebut lambat sampainya kepada kami. Akhirnya kami memutuskan untuk secara mandiri menyelesaikan masalah pertanian ini, karena tidak ada lagi pihak yang dapat diharapkan”.

Di Nagari Minagkabau, Kabupaten Tanah Datar ketersediaan pupuk bersubsidi juga tidak memadai, meskipun petani di daerah ini sudah memesan ke pihak distributor jauh hari sebelumnya melalui kelompok tani. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang petani;

“..Saat kita memerlukan pupuk, pergi ke kios, persediaan pupuk tersebut tidak ada, padahal pupuk tersebut telah jauh-jauh hari dipesan melalui kelompok tani, masalah yang seperti ini sering terjadi. Keadaan ini hanya bisa kita terima, hingga menunggu sampai pupuk itu datang. Tentunya kondisi ini merugikan kami, sehingga akhirnya panen padi tidak memuaskan hasilnya”.

Ekspektasi petani di Sumatera Barat mendapatkan kemudahan dalam meningkatkan hasil sawah melalui pupuk bersubsidi sangat besar kepada pemerintah. Oleh karena itu, di lapangan pemerintah tidak banyak memperoleh hambatan berarti dalam menerapkan kebijakan ini. Akan tetapi, seperti yang disadari oleh petani bahwa penerapan kebijakan ini tidak diikuti oleh *goodwill* pemerintah untuk menuntaskan masalah yang dihadapi petani secara kongkrit. Fenomena ini tercermin dari rendahnya tingkat akseptabilitas dan pengawasan pemerintah dalam memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi sebagaimana yang dibutuhkan petani. Rendahnya ketersediaan pupuk dan harga pupuk diluar kemampuan petani untuk membeli, tidak memberikan kesempatan kepada petani untuk menentukan alternatif terbaik dalam mencukupi ekonomi keluarga. Kondisi seperti inilah yang kemudian mendesak petani di Sumatera Barat untuk bersikap rasional dalam membuat keputusan.

Dalam kerangka peningkatan taraf hidup petani, tentunya bukanlah merupakan keputusan yang mudah bagi petani untuk memilih alternatif tertentu dalam mengatasi persoalan yang di hadapi. Akan tetapi, sebagian besar petani di

Sumatera Barat telah memilih untuk menentukan cara terbaik mengatasi masalahnya sendiri di luar kerangka kebijakan pemerintah. Pengolahan sawah dilakukan dengan cara sendiri secara konvensional seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, sebelum adanya intervensi pemerintah. Seperti inilah rasionalitas yang diperlihatkan oleh petani di Sumatera Barat.

Ketiga, artikulasi nilai-nilai ke-Minangkabau-an pada dasarnya telah memposisikan proses pengelolaan sawah sebagai tanggungjawab bersama dan melekat dalam kehidupan petani di Sumatera Barat. Dengan artikulasi seperti itu petani subsisten lebih mudah mengatasi permasalahan yang dihadapinya, karena masalah sawah tidak menjadi tanggungjawab petani secara individu. Setidaknya ini juga yang menjadi espektasi petani ketika kebijakan pemerintah benar-benar menjadi alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tersebut dimaknai sebagai artikulasi petani subsisten dalam pengelolaan sawah. Konsekuensi kebijakan dalam hal ini tidak hanya menjadi tanggungjawab petani tetapi merupakan interaksi berkelanjutan dari pemerintah dengan memfasilitasi petani menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, apapun kebijakan terhadap petani di Sumatera Barat haruslah dimaknai sebagai upaya mengkerangkai nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam memperbaiki taraf hidup petani.

Dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat orang Minang kabau, nilai-nilai ke-minangkabau-an dalam struktur masyarakatnya dikenal adanya pemangku adat (niniak mamak) sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Pemangku adat mempunyai antusiasme tinggi dalam proses pengolahan maupun pembukaan sawah baru, sehingga tidak ada sawah-sawah yang terlantar. Dalam konteks demikian, petani menempatkan diri sebagai bagian yang terfasilitasi dalam bentuk yang lebih kongkrit. Petani tidak saja menjadi penting dalam menempatkan antusiasme pemangku adat tersebut, tetapi juga ikut memprakarsai proses yang berlangsung secara moral, sehingga teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang membedakan tradisi petani dalam lingkup nilai-nilai ke-Minangkabau-an dengan proses yang berlangsung ketika pola hidup masyarakat mengalami perubahan dan terutama disebabkan oleh besarnya pengaruh kebijakan pemerintah terhadap petani di Sumatera Barat.

Terjadinya perubahan tradisi petani di Sumatera Barat, nampaknya berkaitan dengan kondisi ekonomi yang dihadapi oleh petani. Proses ini sebenarnya tidak benar-benar murni oleh kondisi yang dialami petani tetapi juga karena perubahan iklim dan kebijakan ekonomi pemerintah. Kondisi alam yang berubah (baca iklim) menyebabkan pola bertanam petani mengalami perubahan yang drastis bahkan seringkali terancam gagal panen, itu artinya juga akan mempengaruhi ekonomi petani subsisten. Sementara itu, program ekonomi pemerintah memberikan alternatif baru bagi petani untuk bersikap lebih rasional. Pergumulan dengan masalah ini, petani di Sumatera Barat perlahan-lahan mulai mengakomodasi kebijakan pemerintah dengan segala konsekuensinya. Dan sekaligus menjadi awal kecenderungan peralihan perhatian dan ekspektasi petani terhadap pemerintah.

Pertama, adalah mulai bergesernya makna tradisi *balambe hari* dimana mulai berkurangnya antusiasme pemangku adat dalam pengolahan dan pembukaan sawah baru. Petani di Sumatera Barat mengakui dewasa ini pemangku adat dalam banyak hal tidak memiliki peranan yang kuat dalam memprakarsai masalah-masalah yang dialami oleh petani. Sebagaimana diungkapkan oleh Petani di Nagari Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan, “Niniak mamak, tidak ada urusannya dengan kegiatan pertanian ke sawah, yang ada hanya untuk urusan perkawinan atau untuk *baretong*”.

Namun demikian, petani di Sumatera Barat mengakui bahwa simbol-simbol yang sering digunakan pemangku adat untuk melakukan pertemuan-pertemuan sebelum turun ke sawah sampai saat ini masih dipergunakan. Misalnya, sampai saat ini masih dilakukan pertemuan antar sesama petani sebelum turun ke sawah dengan memanfaatkan media tradisional, seperti masjid/mushalla. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang petani di Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasaman; “ Pemerintah menginformasikan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan program program tertentu, diumumkan dimesjid, kemudian petani dikumpulkan, dan disanalah disosialisasikan cara bertanam dengan pola tanam sebatang tersebut. Program lain seperti pupuk bersubsidi juga seperti itu, melalui kemopok tani petani baru dapat mengaksesnya”.

Begitu juga yang dialami petani di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar, bahwa program atau kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah tersebut, disosialisasikan melalui berbagai media di nagari minangkabau. Seperti memanfaatkan sarana di mesjid untuk menginformasikan ke masyarakat luas, berkumpul di mesjid dan mengefektifkan keberadaan kelompok tani. Seperti yang telah disampaikan salah seorang petani; " Periode satu kali dalam lima belas hari, di mesjid diumumkan bahwa anggota kelompok tani berkumpul dan rapat untuk membahas masalah-masalah pertanian. Melalui perkumpulan itulah informasi terkait kegiatan pertanian disampaikan". Petani lainnya juga mengungkapkan, " jika ada program baru, kami berkumpul bersama-sama, di dangau atau di mesjid. Orang kantor (PPL) tersebut datang dan menginformasikan program tersebut kepada kami. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, pada program pati tanam sebatang, mereka mengajarkan langsung kepada kami. Sehingga kami mengerti model seperti itu. Setelah itu mereka meninjau sesekali pekerjaan kami, bagus atau tidak".

Kedua, petani menyadari bahwa alternatif untuk menerima kebijakan pemerintah akan berdampak kepada bentuk pengolahan sawah dari ekonomi subsisten (ekonomi keluarga) menjadi petani yang menerima berada dalam pengaturan yang mengatur hubungan diantara petani oleh penguasa (pemerintah) yang tidak dimiliki oleh petani di Sumatera Barat. Pengharus-utamaan petani untuk masuk dalam kelompok petani merupakan bentuk penguasaan baru atas petani dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Akibatnya pemaknaan sawah sebagai bagian dari kehidupan bersama dan dikelola bersama telah mengalami proses rekonstruksi dan bernilai ekonomi dalam kehidupan petani di Sumatera Barat. Petani mengakui pengelolaan sawah dilakukan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan untuk membeli dan menanam benih. Turun ke sawah dilakukan secara sendiri. Menurut petani di Nagari Minangkabau berkurangnya pelaksanaan tradisi petani Minangkabau disebabkan karena:

"Sekarang, banyak yang memikirkan soal biaya dalam rangka mengadakan acara-acara adat tersebut. Misalnya dahulu kalau hendak turun ke sawah, diadakan makan bersama dengan orang sumandan, dan membawa nasi ke sawah. Sekarang tidak ada lagi yang seperti itu, turun ke sawah secara sendiri-sendiri. Kalau sawahnya telah mantap untuk digarap, baru dilakukan kegiatan penanaman. Bahkan sekarang ada juga yang diupahkan, mulai dari membajak hingga masa panen tiba, yang punya lahan tinggal menerima hasilnya saja".



Ketiga, pengelolaan sawah yang dilakukan secara gotong royong juga sudah mengalami perubahan drastis. Petani subsisten mengakui, makna gotong royong dalam pengelolaan sawah dewasa ini lebih bersifat individual dan lebih sering dimaknai secara ekonomi. Banyak aktivitas gotong royong yang dilaksanakan dilaksanakan dengan sistem upah. Sebagaimana diungkapkan salah seorang petani di nagari Pauh Kamba Kabupaten Padang pariaman:

” Gotong royong itu lebih menguntungkan. Tapi kan hal itu sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau gotong royong kan kita tidak membayar apa-apa, hanya tenaga kita saja yang keluar. Sekarang kalau menggarap sawah kadang kami berhutang ke tukang mesin “manjaja” (mesin bajak/traktor), tukang mesin “mairiak” (mesin pemisah padi dari batangnya). Kalau dulu setelah panen, padi bisa dibawa pulang. Tapi sekarang saat panen, setelah mairiak, padi bisa habis disawah saja untuk membayar hutang-hutang padang tukang mesin”.

Di Nagari Cupak Kabupaten Solok, substansi gotong royong dalam tradisi turun ke sawah dalam konteks ke-Minangkabau-an juga sudah mulai ditinggalkan meskipun diakui oleh sebagian petani masih dilakukan tetapi dalam konteks yang berbeda. Gotongroyong sekarang dimaknai sebagai aktivitas yang bernilai ekonomi, oleh karenanya gotong-royong dilaksanakan dengan sistem upah. Sedangkan dalam tradisinya dahulu lebih bersifat tanggungjawab moral dan berorientasi kepada ekonomi keluarga (subsisten). Konsekuensi dari perubahan ini tercermin dalam sikap petani ketika akan turun ke sawah, seperti mengupahkan pekerjaan sawahnya kepada orang lain. Dalam konteks seperti ini, turun ke sawah ditentukan oleh kemampuan ekonomi (baca modal) petani mengolah sawah, sedangkan bagi petani yang belum memiliki modal belum bisa turun ke sawah, jadi tidak heran kemudian ada ditemui sawah-sawah yang terlantarkan. Menurut salah seorang petani di Nagari Cupak,

“ Banyak diantara masyarakat petani yang tidak lagi meganggap turun kesawah bersama-sama itu penting, dengan kalkulasi ekonomis mereka jadikan pertimbangan mendorong mereka menyimpulkan bahwa mengerjakan sawah secara ber-kongsi (bersama) tadi tidak lagi menguntungkan dan membuang lebih banyak waktu dan tenaga karena mesin dapat membuatnya lebih efektif dan cepat. Petani lainnya juga menungkapkan, “Kalau dahulu petani disini turun ke sawah bersama (serentak), tetapi sekarang susah untuk diserantakkan karena siapa yang dekat dengan aliran air bisa turun lebih dulu untuk menggarap sawahnya sehingga ada yang bisa menggarap sampai tiga kali musim tanam”.

Di Kabupaten Padang Pariaman, gotong royong dalam tradisi bertani juga sudah mulai berkurang, faktor yang ikut mempengaruhinya adalah mulai munculnya sikap individual masyarakat, masyarakat petani mulai memiliki kesibukan lain diluar bertani yang membuat mereka kekurangan waktu untuk turun kesawah secara langsung, ada juga yang disebabkan oleh semakin sedikit anggota keluarga dan masyarakat petani yang menetap di kampung halamannya (pergi merantau) sehingga orang-orang yang turut serta bergotong royong menjadi berkurang. Disamping penyebab-penyebab yang berasal dari dinamika atau perubahan sosial masyarakat petani tersebut, kebijakan dan program pemerintah serta berbagai teknologi modern dalam bidang pertanian ikut menggeser eksistensi nilai kegotongroyongan tersebut. Upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan produktifitas pertanian dengan program pemberian bantuan peralatan modern seperti mesin-mesin (teknologi pertanian) kepada masyarakat tradisional untuk menggarap sawah. (wawancara dengan salah seorang petani di Nagari Pauh Kamba, Kabupaten Padang Pariaman).

Ke-empat, Nilai-nilai spritual yang diyakini dalam kehidupan bertani di Sumatera Barat seperti ritual-ritual adat turun kesawah, ritual *ratik tulak bala* dan ritual masa penen (*manyabik*) dimasa lampau juga sudah mulai banyak ditinggalkan. Namun demikian, tradisi ini masih ada diselenggarakan oleh petani dalam mengolah sawahnya. Berkurangnya intensitas tradisi disebabkan oleh perubahan pola pikir petani terutama diterimanya kebijakan pemerintah dalam mengolah sawah.

Kebijakan pemerintah dalam pengolahan sawah, seperti pengendalian hama dengan teknologi pertanian dan racun-racun hama yang memperlihatkan dampak instan dalam mengatasi masalah pertanian sangat diterima petani di Sumatera Barat. Banyak petani yang mengakui kebijakan pemerintah cukup membantu upaya-upaya petani mengatasi hama tanaman. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan pemerintah masih belum optimal dalam mengatasi hama tanaman. Pola sawah dan jenis hama yang dihadapi seringkali menyulitkan petani dalam menerapkan kebijakan pemerintah. Misalnya, Program TPS sangat rentan terhadap hama tikus, siput atau keong emas dan sebagainya. Sementara itu, upaya-

upaya pemerintah menagani masalah ini belum optimal seperti petani melakukan tradisi *tulak bala*. Sebagaimana diungkapkan oleh petani.

“Dari yang kami perhatikan, hama tikus itu kalau diburu akan menjadi lebih mengganas wabahnya. Dengan tradisi kami, hama-hama itu kami yakini dapat dihindari dengan tradisi *ratik tulak bala*. Hal ini kami yakini dan rasakan manfaatnya bagi keselamatan padi kami”.

Perubahan tradisi Minangkabau dalam bertani juga dirasakan oleh petani di Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasaman. Saat ini tradisi *tulak bala* intensitasnya sudah berkurang, dan masih ada petani yang melaksanakannya. Hal ini disebabkan karena adanya racun tanaman dan berubahnya pola pikir petani.

“Sebelum turun ke sawah dahulunya kami percaya dengan mengadakan kegiatan *tolak bala*. Tapi sekarang tradisi itu tidak lagi dilakukan orang karena sudah ada obat racun yang mampu mengatasi masalah-masalah pertanian. Keadaan telah modern. Cara-cara tradisional telah mulai ditinggalkan, meskipun tidak semuanya. Seperti, membersihkan *banda* dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak lagi gotong royong. Himbauan turun ke sawah hanya sebatas kepada orang-orang atau petani yang lokasi lahannya berdekatan”.

Sementara itu, kecenderungan untuk melaksanakan ritual *tulak bala* dikalangan petani dapat dianggap sebagai salah satu bentuk rasionalitas petani dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Metode yang diperkenalkan pemerintah untuk memberantas hama dianggap belum mambantu masalah petani secara komprehensif dan sulit untuk diterapkan. Sementara itu, pelaksanaan ritual *tulak bala* lebih mudah dan memberikan manfaat yang nyata bagi petani. Sebagaimana diungkapkan oleh Buyuang Sari;

“Dari pemerintah banyak petunjuk-petunjuk (program) yang diberikan. Tapi prosedur pelaksanaannya banyak tidak jelas bagi petani. Seperti pemberantasan hama, tidak jelas racun yang akan digunakan”. Pengentasan hama tikus oleh pemerintah dilakukan dengan “program berburu tikus”. Sementara dari yang kami perhatikan, hama tikus itu kalau diburu akan menjadi lebih mengganas wabahnya. Dengan tradisi kami, hama-hama itu kami yakini dapat dihindari dengan tradisi “*ratik tulak bala*”. Hal ini kami yakini dan rasakan manfaatnya bagi keselamatan padi kami.

Pelaksanaan *tolak bala* untuk membasmi hama masih dilaksanakan karena petani beranggapan pemerintah belum melakukan pembasmian hewan pengganggu secara massif, dan masih rendahnya respon pemerintah terhadap masalah ini. Sehingga dalam menghadapi masalah ini petani melakukan sendiri melalui *tolak bala*, sebagaimana dikemukakan Erni salah seorang petani di Nagari Aia Manggih;

“Banyak hewan pengganggu di sawah kami, seperti tikus, babi dan unggas yang “menghabiskan” padi kami. Kalau dahulu ada tradisi *tolak bala* untuk menangkal adanya pengganggu tanaman, kalau sekarang hanya memasang *kauah padi*, berdoa ke mesjid dan diberinya obat. Jikapun ada penyemprotan itu dilakukan oleh petani sendiri, tidak memanfaatkan jasa PPL. Disini belum ada pembasmian hewan pengganggu yang dilakukan oleh PPL. Jadi semua kami yang mengupayakan, karena kami sendiri masih bisa mengatasi permasalahan yang ada dan muncul”

Lebih lanjut diungkap Erni;

“Masalah pertanian seperti tikus penyerang tanaman banyak di lokasi ini, tapi kami mengatasinya sendiri. PPL tidak ada datang ke lokasi kami untuk meninjau masalah pertanian. Kalau ada permasalahan pertanian, kami tidak ada mengadukan ke pihak pemerintah, karena tidak ada respon yang bersifat membantu. Pernah saya mengadukan ke pak wali. Tapi mereka hanya menyuruh kami menunggu”.

Hal yang menarik dari temuan di atas adalah disamping berhadapan dengan perubahan kondisi alam, petani di Sumatera Barat juga mengalami tekanan dari pemerintah melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan yang pelaksanaannya cenderung men-generalikan permasalahan yang dihadapi petani di seluruh daerah Sumatera Barat. Tanam padi sebatang merupakan salah satu bentuk generalisasi pemerintah di berbagai daerah kabupaten, padahal sejak lama masing-masing daerah kabupaten tersebut memiliki karaktersitik dalam pertanian.

Namun demikian, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, petani memiliki orientasi sendiri disamping menerima dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam hal ini, orientasi petani lebih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai ke-Minangkabau-an yang pernah dimanifestasikan dalam tradisi *balambe hari*. Meskipun banyak perubahan dan tekanan yang dialami petani dalam mengolah sawah, tradisi *balambe hari* tetap dilaksanakan meskipun suasana batin dari tradisi ini sudah jauh berbeda. Dalam kerangka demikian, maka penelitian ini menemukan bahwa sikap rasionalitas petani di Sumatera Barat terhadap kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh tradisi *balambe hari*. Oleh karena itu, dalam rangka mempermudah implementasi kebijakan pemerintah di bidang pertanian, pemerintah perlu mempertimbangkan bentuk kearifan lokal ini, sehingga mendapatkan dukungan yang luas dari petani.

Upaya untuk mendapatkan dukungan yang luas dari petani atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dapat dilihat dari beberapa kecenderungan rasionalitas petani dalam menyikapi kebijakan pemerintah, yakni;

Pertama, petani menerima dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, kebijakan tentang PTS, pupuk bersubsidi pada dasarnya mendapatkan dukungan yang luas dari petani. Karena petani merasa diuntungkan oleh kebijakan pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya juga mendapatkan dukungan dari petani, hal ini tercermin dari kesungguhan petani untuk melaksanakannya di hampir seluruh daerah di Sumatera Barat.

Kedua, petani menerima dan mendukung kebijakan pemerintah, tetapi mempertanyakan implementasi kebijakan. Secara kontekstual petani merasa diuntungkan oleh kebijakan tetapi dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi petani belum didukung oleh kebijakan yang ada. PTS dinilai menguntungkan petani tetapi dalam pelaksanaannya memiliki banyak keterbatasan, antara lain topologi sawah yang tidak sama sehingga mempengaruhi jenis dan kualitas tanaman tertentu. PTS disatu sisi sangat membutuhkan pupuk yang banyak, tetapi distribusinya tidak memadai sesuai dengan kebutuhan petani. Disisi lain banyak daerah yang topologi sawahnya berbandar langit sedangkan PTS sangat membutuhkan irigasi yang memadai. Disamping itu kualitas PTS tidak lebih bagus dari bibit lokal yang selama ini dimiliki petani, seperti bareh solok yang kualitasnya baik dan tidak pernah terpengaruh oleh pasar. Keterbatasan-keterbatasan kebijakan tersebut menyebabkan petani di Sumatera Barat memilih alternatif lain seperti melaksanakan cara-cara yang lama dalam tradisinya.

Ketiga, petani merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak menguntungkan petani sehingga petani memutuskan untuk tidak menerima dan melaksanakan kebijakan. Dalam konteks ini, banyak petani yang merasa tidak puas dengan PTS, pupuk bersubsidi yang parsial sehingga memutuskan untuk keluar dari kelompok tani, dan mengolah secara sendiri sesuai dengan tradisi dahulunya. Secara ringkas orientasi petani Sumatera Barat dapat di petakan sebagaimana terlihat pada matriks di bawah ini:

Tabel 2: Predisposisi (kecenderungan) petani Terhadap Kebijakan Pemerintah di Sumatera Barat

Kecenderungan	Persepsi
Menerima dan melaksanakan kebijakan pemerintah	Kebijakan secara rasional menguntungkan petani
Menerima dan mempertanyakan implementasi kebijakan	Kebijakan disatu sisi dianggap menguntungkan, tetapi pada sisi lain tidak mengakomodasi nilai-nilai dan karakteristik lokal
Menolak kebijakan	Kebijakan dianggap tidak menguntungkan petani

## D. Penutup

### A. Kesimpulan

Sesuai dengan temuan penelitian pada tahap I ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sawah merupakan bagian terpenting bagi masyarakat Minangkabau, dan dalam masyarakat tradisional sawah dimaknai juga sebagai sumber pokok ekonomi keluarga dan kemakmuran. Arti penting sawah tersebut selama ini dimanifestasikan ke dalam bentuk tradisi bertani dalam mengolah sawah yang dikenal dengan tradisi *balambe hari*. Tradisi ini telah melembaga dalam kehidupan petani secara turun temurun di Sumatera Barat
2. Tradisi *balambe hari* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dalam tradisi bertani subsisten di Sumatera Barat. Dengan *balambe hari* ini, petani secara fundamental menggariskan pengolahan sawah sebagai bagian dari tanggungjawab bersama, sehingga dalam prakteknya tidak ada sawah yang terlantarkan. *Balambe hari* juga menjadi sarana interaksi dan komunikasi serta wadah untuk mengaktualisasikan kebutuhan dan kepentingan antara sesama petani dalam proses pengolahan sawah. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada dalam tradisi *balambe hari* sangat menentukan bagaimana respons politik petani di Sumatera barat terhadap kebijakan pemerintah.
3. Petani di Sumatera Barat dalam mengolah sawah juga sudah mengalami proses modernisasi yang disebabkan oleh perubahan kondisi alam,

kebijakan pemerintah dan pola pikir petani dalam mengolah sawah mereka. Diantara proses modernisasi tersebut, kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani memiliki peranan yang besar dan mendasar memberikan pengaruh bagi petani. Determinasi pemerintah menyebabkan tradisi *balambe hari* perlahan-lahan ditinggalkan oleh petani. Namun demikian, kebijakan pemerintah tersebut tidak benar-benar dapat mendeterminasi pola pikir petani dalam mengolah sawah. Kenderungan ini terlihat ketika petani secara rasional menempuh berbagai alternatif untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi dan kembali melaksanakan tradisi *balambe hari* meskipun suasana bantinya sudah mengalami pergeseran nilai.

## B. Saran

1. Dikarenakan *balambe hari* merupakan sebuah bentuk kearifan lokal, maka sudah semestinya tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam membuat kebijakan tertentu. Pemerintah sebaiknya mengakomodasi nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam tradisi *balambe hari* yang selama ini dinilai sangat bermanfaat bagi petani di Sumatera Barat dalam mengelola sawah. Dengan demikian, dukungan petani terhadap implementasi kebijakan pemerintah di bidang pertanian akan semakin luas dan lebih baik.
2. Sebaliknya, pemerintah dapat memformulasikan kebijakan tertentu agar kebijakan pemerintah di bidang pertanian mudah diimplementasikan, misalnya Memperhatikan karakteristik alam dan tipologi sawah yang ada di Sumatera Barat, sebaiknya pemerintah memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada petani untuk menentukan sendiri jenis bibit dan memilih cara produksi sendiri, menjamin ketersediaan air dan kesuburan tanah, melakukan pengawasan yang ketat terhadap harga dan distribusi pupuk bersubsidi karena kebijakan pemerintah selama ini membuat petani sangat tergantung kepada pupuk bersubsidi.
3. Dukungan terhadap pelaksanaan tradisi *balambe hari* dan adanya formulasi kebijakan tertentu akan mempermudah dalam memetakan model

respons politik petani terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat. Untuk itu, pemetaan model ini akan dilakukan pada penelitian tahap II.

### E. Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel & Verba, Sydney. 1963. *The civic culture: political attitude and democracy in five nation*. Princeton University Press.
- Anderson, Benedict R.O.G. 1972. The idea of power in Javanese culture. Dalam. Claire Holt, *Culture and politics in Indonesia*. Ithaca, N.Y: Cornell University Press.
- Campbell, Angus, et al. 1960. *The American voter*. Chicago: Row, Peterson & Co.
- Denver, David. 1989. *Election and voting behavior in Britain*. London: Philip Allen Pub.
- Fiorina, Moris. 1981. *Retrospective voting in American national elections*. New Haven: Yale University Press.
- Gaffar, Afan. 1999, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 1992. *Javanese Voters: A case study of election under a hegemonic party system*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Geertz, Clifford. 1965. *The Social history of an Indonesia town*. Cambridge, Massachusetts Institute of Technology.
- 1974. *Agricultural involution: the process of ecological change in Indonesia*. Barkeley: University of California Press
- Greenstein, Fred I. 1975. Personality and politics". Dalam Fred I. Greenstein & Nelson W. Polsby. *Handbook of political science: micropolitical theory*. Vol.2 US: Addison-Wesley Publishing company.
- Huntington, Samuel P. 1975. Political Development. Dalam Fred I. Greenstein & Nelson W Polsby (eds), 1975. *Handbook of Political Science: Macropolitical theory*. Vol. 3. US: Addison-Wesley Publishing company.
- Idrus, HakimY Dt. Rajo Penghulu. 1994. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Kartodirjo, Sartono. 1973. *Protest movement in rural Java*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Kristiadi, J. 1994. Pemilihan umum dan perilaku memilih: suatu studi kasus tentang perilaku memilih di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada pemilihan umum 1971-1987. Disertasi, Universitas Gadjah Mada.
- Kuntowijoyo, 1985. *Social change in an agrarian society: Madura, 1850-1940*. Disertasi, Columbia University



- Lev, Daniel S. & Lyon, Margo L. 1970. *Bases of conflicts in rural Java*. Barkeley, University of California Press
- Liddle, R. William, 1996. *Leadership and culture in Indonesi politics*. Singapore: ASAA Southeast Asia Publication Series.
- Mondak, Jeffrey J. 1995. Competence, integrity, and the electoral success of congressional incumbent. *The Journal of Politics* 57(4).
- Morgan, Clifford T. 1986. *Introduction to psychology*. Cet.Ke-7. New York: McGraw-Hill Book. Co
- Nachmias, David and Chava Nachmias, (1987), *Research Methods in the Social Sciences (Third Edition)*, St. Martin's Press, New York.
- Niemi, Richard G. & Weisberg, Herbert F. 1984. *Controversies in voting behavior*. Wahington DC: Congression Quarterly.
- Palmer, Leslie H. 1969. *Social status andpPower in Java*. London: The Anthlone Press.
- Pomper, Gerald. 1978. *Voters choice: varieties of American electoral behavior*. New York: Dodd Mead Company.
- Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E. 1996. Participation in local politics in Norway: some do, some don't, some will, some won't". *Political Behavior*. New York: Plenum Publishing Corp.
- Scott, James C. 1981. *Moral ekonomi petani*. (terj). Jakarta: LP3ES
- , 1993. *Perlawanan kaum tani*. (terj). Jakarta: YOI
- , 2000. *Senjatanya orang-orang kalah: bentuk perlawanan sehari-hari kaum tani di Asia Tenggara*. (terj). Jakarta: YOI
- Sherman, Arnold K & Kolker, Aliza. 1987. *The social bases of politics*. California: A Division of Wodsworth Inc.
- Steffensmeiers, Janet M. & Smith, Renee M. 1996. The dynamics of aggregate partisanship. Dalam *American Political Science Review*. tp.
- Wertheim, W.F. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam transisi: studi perubahan sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana

SINOPSIS PENELITIAN

LANJUTAN

## SINOPSIS PENELITIAN

Hasil penelitian tahun I menunjukkan bahwa bahwa petani subsisten di Sumatera Barat memiliki tradisi yang disebut dengan *balambe hari*. Tradisi *balambe hari* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dalam tradisi bertani subsisten di Sumatera Barat. Dengan *balambe hari* ini, petani secara fundamental menggariskan pengolahan sawah sebagai bagian dari tanggungjawab bersama, sehingga dalam prakteknya tidak ada sawah yang terlantarkan. *Balambe hari* juga menjadi sarana interaksi dan komunikasi serta wadah untuk mengaktualisasikan kebutuhan dan kepentingan antara sesama petani dalam proses pengolahan sawah. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada dalam tradisi *balambe hari* sangat menentukan bagaimana kecenderungan (predisposisi) petani dalam merespons kebijakan pemerintah (pemda) di Sumatera Barat. Inilah yang menjadi dasar pembentukan respons politik petani yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pemungutan suara (*voting*).

Petani di Sumatera Barat dalam mengolah sawah juga sudah mengalami proses modernisasi yang disebabkan oleh perubahan kondisi alam, kebijakan pemerintah dan pola pikir petani dalam mengolah sawah mereka. Diantara proses modernisasi tersebut, kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani memiliki peranan yang besar dan mendasar memberikan pengaruh bagi petani. Determinasi pemerintah menyebabkan tradisi *balambe hari* perlahan-lahan ditinggalkan oleh petani. Namun demikian, kebijakan pemerintah tersebut tidak benar-benar dapat mendeterminasi pola pikir petani dalam mengolah sawah. Kecenderungan ini terlihat ketika petani secara rasional menempuh berbagai alternatif untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi dan kembali melaksanakan tradisi *balambe hari* meskipun suasana bantinya sudah mengalami pergeseran nilai.

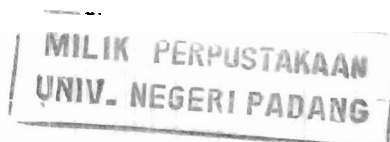
Seperti yang dipahami sebenarnya banyak faktor yang turut mempengaruhi kecenderungan perilaku seseorang dalam proses politik. Bisa saja perubahan nilai-nilai politik yang diyakini sejak kecil melalui proses sosialisasi yang gradual dan intens bisa berubah seketika. Ataupun sebaliknya, keyakinan terhadap nilai-nilai politik tersebut muncul setelah mengalami suatu peristiwa

politik yang luar biasa. Fenomena ini dapat dipahami dengan melihat pada kondisi lingkungan sekitar individu yang dianggap dapat menjadi pendorong perubahan kecenderungan tersebut. Penelitian ini berasumsi bahwa, faktor eksternal seperti *balambe hari* (nilai-nilai yang berada dalam lingkungan mereka) menjadi sesuatu yang krusial dalam pembentukan kecenderungan dalam menganalisa perilaku *voting* seseorang. Stimulus yang diterima dan respons yang diberikan seseorang berada dalam suatu lingkungan yang akan mempengaruhi manifestasi sikap politik mereka.

Sehubungan dengan itu, maka fokus penelitian pada tahun kedua akan melihat sikap dan tindakan petani (respons dalam bentuk *voting*) ketika pemilu atau pilkada di adakan. Ini karena sikap hanya dapat diketahui dengan melihat tindakan (dalam bentuk *voting*) dalam surat suara (*ballot*). Ini terkait dengan sikap petani tersebut, apakah akan mendukung atau menolak kebijakan di bidang pertanian yang dijadikan isu dalam pemilu atau pilkada. Oleh karena itu, ada beberapa masalah penting yang akan di kaji dalam penelitian tahun kedua ini. Pertama, Bagaimanakah sikap petani dalam merespons kebijakan pemerintah (pemda) dalam bidang pertanian? Apakah sikap tersebut dapat dijadikan alasan oleh petani untuk bertindak memberikan atau menolak dukungan kepada partai politik atau individu calon kepala daerah dalam pemilu atau pilkada ? Kedua, bagaimanakah model *voting* petani dalam merespons isu kebijakan dalam pemilu atau pilkada di Sumatera Barat?

Untuk menjelaskan beberapa permasalahan di atas, maka penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan sosiologis dalam memahami sikap dan model *voting* petani di Sumatera Barat. Ini sesuai dengan temuan penelitian tahun pertama, bahwa keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabuan yaitu *balembe hari* adalah bagian dari faktor eksternal yang sangat berpengaruh kepada sikap petani di Sumatera Barat.

Dengan demikian, penelitian tahun kedua ini bertujuan untuk, pertama, menganalisis sikap petani dalam merespons kebijakan pemerintah (pemda) dalam bidang pertanian. Kedua, menjelaskan alasan petani untuk bertindak memberikan atau menolak dukungan kepada partai politik atau individu calon kepala daerah



dalam pemilu atau pilkada. Ketiga, merumuskan model *voting* petani dalam merespons isu kebijakan dalam pemilu atau pilkada di Sumatera Barat.

Pendekatan perilaku (*behavioral approach*) mendapat tempat dalam penelitian ilmu politik, banyak ilmuwan politik menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan perilaku memilih individu dalam pemilihan umum. Dan, selama bertahun-tahun pula Mashab Kolombia (*Colombia school*) mendominasi penjelasan terhadap perilaku memilih seseorang. Mashab Kolombia yang menghadirkan pendekatan sosiologis ini menganalisa perilaku memilih individu pada aspek lingkungan sosial ekonomi, afiliasi etnis, tradisis keluarga, pekerjaan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin dan lain sebagainya. Di antara karya penelitian dari mashab ini adalah *The people's choice* tahun 1948 dan *Voting* tahun 1952 (Gaffar, 1992: 4-9).

Pendekatan sosiologis pada awalnya berasal dari Eropa, kemudian di Amerika Serikat dikembangkan oleh ilmuwan sosial yang mempunyai latar belakang pendidikan Eropa. Oleh sebab itu, ada sebutan bagi pendekatan ini sebagai model sosiologi politik Eropa. Istilah lain dalam pendekatan ini juga sangat beragam. Misalnya Denver (1989) menyebutnya sebagai *social determination approach*. Bagi mashab sosiologis, perilaku memilih seseorang (*voting behavior*) dipengaruhi oleh karakteristik latar belakang sosiologis, karakteristik orang tua dan status sosial seseorang (Niemi & Weisberg, 1984).

Kajian mendalam yang dilakukan oleh Pomper (1978:195-205) yang merinci pengaruh pengelompokan sosial dalam studi *voting behavior* ke dalam dua variabel, yaitu variabel predisposisi sosial ekonomi keluarga pemilih dan predisposisi sosial ekonomi pemilih (*voter*) mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Artinya, preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah atau ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak.

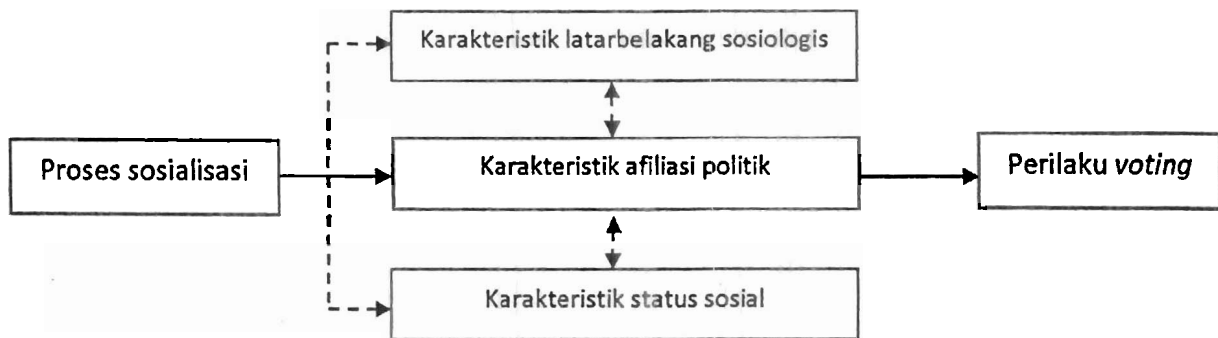
Variabel lain yang juga menjadi sorotan banyak ahli dengan menggunakan pendekatan ini adalah agama seseorang yang berpengaruh terhadap dukungan mereka kepada partai politik. Di Amerika Serikat misalnya penganut agama Katolik dan Yahudi, kulit hitam dan Hispanic (keturunan latin) merupakan pendukung setia Partai Demokrat. Sementara kaum Protestan Anglo Saxon memberikan dukungan pada Partai Republik (Niemi & Weisberg, 1984).

Kecenderungan ini juga terjadi di banyak negara, agama dan asal usul budaya tertentu juga berpengaruh pada bentuk dukungan individu pada partai tertentu. Ini dapat dicontohkan di Indonesia, dimana kelompok santri tradisional yang menuntut ilmu agama di pesantren di Jawa Timur cenderung memberi dukungannya pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Dalam berbagai ragam perbedaan dalam struktur sosial yang paling tinggi pengaruhnya terhadap perilaku politik seseorang adalah faktor kelas (status ekonomi) terutama hampir di semua negara industri. Di Eropa kelompok penghasilan rendah dan kelas pekerja cenderung memberikan suara pada Partai Sosialis atau Partai Komunis. Sedangkan kelompok menengah dan atas menjadi pendukung Partai Konservatif (Denver, 1989). Sherman & Kolker (1987:199-202) mencontohkan kecenderungan masyarakat kelas bawah dan kelas pekerja di Amerika Serikat, melalui organisasi buruh mereka cenderung mendukung Partai Demokrat, sedangkan kelas atas dan menengah menjadi pendukung Partai Republik.

Aspek lain dari pendekatan sosiologis ini adalah adanya hubungan pengaruh antara faktor geografis dengan perilaku memilih. Adanya rasa kedaerahan mempengaruhi dukungan seseorang terhadap partai politik. Di beberapa negara, wilayah tertentu mempunyai loyalitas terhadap partai tertentu, hingga bertahan selama beberapa waktu. Di Indonesia, seperti adanya loyalitas yang kuat terhadap Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan di Provinsi Bali dan Sumatera Utara. Atau loyalitas terhadap Partai Kebangkitan Bangsa di Jawa Timur, Partai Persatuan Pembangunan di Kalimantan dan Loyalitas terhadap Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Contoh lain di Skandinavia yang dijelaskan oleh Peterson & Rose (1996) yang juga melihat adanya hubungan yang signifikan antara ikatan-ikatan kedaerahan seperti adanya daerah *rural* dan *urban* sebagai basis sosial masyarakat dengan kecenderungan mereka melakukan aktifitas politik dan memberikan dukungan pada partai politik tertentu.

Gambar 1.1: Model pendekatan sosiologis



Terkait dengan teori di atas maka penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008:26) penggunaan kedua pendekatan ini saling melengkapi (*complement each other*). Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan sikap petani dalam merespon kebijakan pemerintah (pemda). Selain itu, pendekatan ini juga menjelaskan alasan petani untuk bertindak memberi atau menolak dukungan kepada partai politik atau individu calon kepala daerah dalam pemilu atau pilkada. Sementara pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjelaskan model *voting* petani dalam merespons isu kebijakan dalam pemilu atau pilkada di Sumatera Barat.

Tahapan penelitian tahun kedua ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan awal ke lokasi penelitian

Kegiatan ini bertujuan untuk menyesuaikan dan mengembangkan informan penelitian yang sudah diperoleh dalam penelitian tahun 1. Namun untuk melengkapi data yang dibutuhkan, maka perlu dikembangkan informan penelitian di lokasi penelitian. Dalam tahapan ini juga dibahas kemungkinan penambahan lokasi penelitian sehingga tujuan penelitian dapat diwujudkan. Luaran kegiatan ini adalah tersedianya lokasi dan informan tambahan dalam penelitian ini.

2. Penyusunan pedoman wawancara dan pedoman *focus group discussion*

Dalam tahapan ini peneliti akan menyusun kembali beberapa daftar pertanyaan sesuai dengan hasil tinjauan lapangan. Pengembangan terhadap instrumen penelitian ini adalah dilengkapinya alat pengumpulan data, yaitu

*focus group discussion* untuk mendapatkan gambaran respons informan terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah.

### 3. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka tim peneliti akan menganalisis data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Luaran dalam tahapan ini adalah tersedianya analisis permulaan dari data yang dikumpulkan.

### 4. Diskusi Tim Peneliti Terbatas

Dalam tahapan ini peneliti akan mendiskusikan hasil analisis sementara ini untuk dikembangkan sehingga dapat dijelaskan model *voting* dan orientasi respons petani terhadap kebijakan publik. Luaran dari tahapan ini diketahuinya model *voting* dan respons petani terhadap kebijakan publik.

### 5. Seminar/Diskusi Terbatas

Untuk mendapat masukan guna penyempurnaan dari hasil analisis yang dibuat peneliti, maka diadakan seminar/diskusi terbatas dengan pihak-pihak yang kompeten. Capaian dari hasil ini adalah tersedianya masukan untuk penyempurnaan hasil penelitian yang dibuat.

### 6. *Cross check* data lapangan

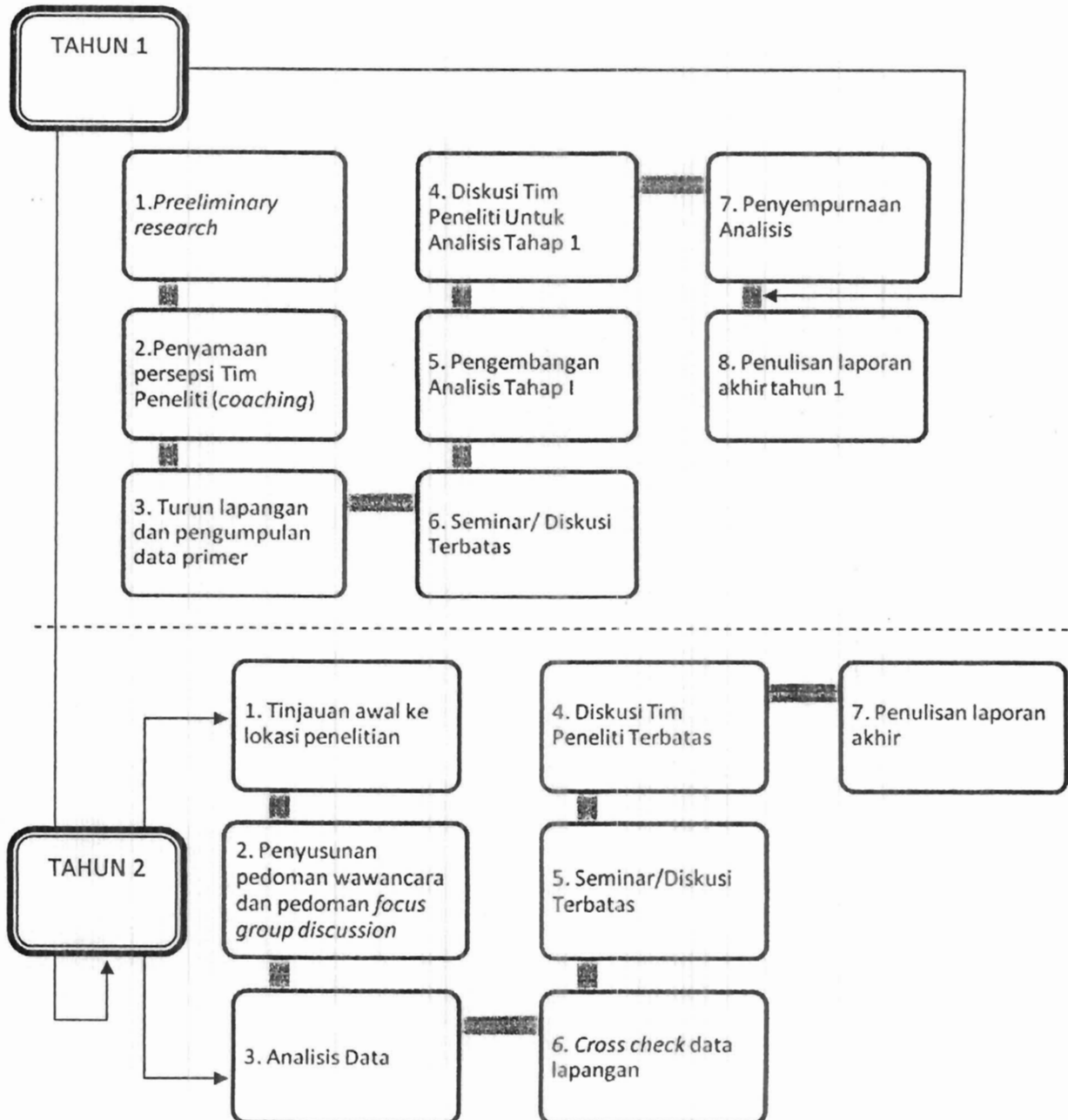
Tahapan ini adalah upaya akhir untuk melakukan konfirmasi data lapangan untuk menyesuaikan kembali data-data yang diperoleh. Ini bertujuan untuk meminimalkan efek bias dalam pengambilan kesimpulan. Luaran dari kegiatan ini adalah diminimalkannya bias data yang diperoleh.

### 7. Penulisan laporan akhir

Tahapan akhir kegiatan ini adalah disusunnya laporan akhir yang merangkumi keseluruhan hasil penelitian baik tahun 1 maupun tahun 2.



## Langkah-langkah operasional penelitian selama 2 tahun



## DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel & Verba, Sydney. 1963. *The civic culture: political attitude and democracy in five nation*. Princeton University Press.
- Anderson, Benedict R.O.G. 1972. The idea of power in Javanese culture. Dalam. Claire Holt, *Culture and politics in Indonesia*. Ithaca, N.Y: Cornell University Press.
- Campbell, Angus. et al. 1960. *The American voter*. Chicago: Row, Peterson & Co.
- Denver, David. 1989. *Election and voting behavior in Britain*. London: Philip Allen Pub.
- Fiorina, Moris. 1981. *Retrospective voting in American national elections*. New Haven: Yale University Press.
- Gaffar, Afan. 1999, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 1992. *Javanese Voters: A case study of election under a hegemonic party system*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Geertz, Clifford. 1965. *The Social history of an Indonesia town*. Cambridge, Massachusetts Institute of Technology.
- 1974. *Agricultural involution: the process of ecological change in Indonesia*. Barkeley: University of California Press
- Greenstein, Fred I. 1975. Personality and politics". Dalam Fred I. Greenstein & Nelson W. Polsby. *Handbook of political science: micropolitical theory*. Vol.2 US: Addison-Wesley Publishing company.
- Huntington, Samuel P. 1975. Political Development. Dalam Fred I. Greenstein & Nelson W Polsby (eds), 1975. *Handbook of Political Science: Macropolitical theory*. Vol. 3. US: Addison-Wesley Publishing company.
- Kartodirjo, Sartono. 1973. *Protest movement in rural Java*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Kristiadi, J. 1994. Pemilihan umum dan perilaku memilih: suatu studi kasus tentang perilaku memilih di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada pemilihan umum 1971-1987. Disertasi, Universitas Gadjah Mada.
- Kuntowijoyo, 1985. *Social change in an agrarian society: Madura, 1850-1940*. Disertasi, Columbia University
- , 2002. Radikalisasi Petani. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Lev, Daniel S. & Lyon, Margo L. 1970. *Bases of conflicts in rural Java*. Barkeley, University of California Press
- Liddle, R. William, 1996. *Leadership and culture in Indonesi politics*. Singapore: ASAA Southeast Asia Publication Series.

- Mondak, Jeffrey J. 1995. Competence, integrity, and the electoral success of congressional incumbent. *The Journal of Politics* 57(4).
- Morgan, Clifford T. 1986. *Introduction to psychology*. Cet.Ke-7. New York: McGraw-Hill Book. Co
- Nachmias, David and Chava Nachmias, (1987), *Research Methods in the Social Sciences (Third Edition)*, St. Martin's Press, New York.
- Niemi, Richard G. & Weisberg, Herbert F. 1984. *Controversies in voting behavior*. Wahington DC: Congression Quarterly.
- Palmer, Leslie H. 1969. *Social status andpPower in Java*. London: The Anthlone Press.
- Pomper, Gerald. 1978. *Voters choice: varieties of American electoral behavior*. New York: Dodd Mead Company.
- Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E. 1996. Participation in local politics in Norway: some do, some don't, some will, some won't". *Political Behavior*. New York: Plenum Publishing Corp.
- Scott, James C. 1981. *Moral ekonomi petani*. (terj). Jakarta: LP3ES
- 1993. *Perlawanan kaum tani*. (terj). Jakarta: YOI
- 2000. *Senjatanya orang-orang kalah: bentuk perlawanan sehari-hari kaum tani di Asia Tenggara*. (terj). Jakarta: YOI
- Sherman, Arnold K & Kolker, Aliza. 1987. *The social bases of politics*. California: A Division of Wodsworth Inc.
- Steffensmeiers, Janet M. & Smith, Renee M. 1996. The dynamics of aggregate partisanship. Dalam *American Political Science Review*. tp.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susan Stainback; William Stainback. 1988. *Uderstanding & Conducting Qualitative Research*. Kendall/Hunt Publishing Company. Dubuque Iowa.
- Wertheim, W.F. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam transisi: studi perubahan sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana